



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 - 2013**

**Diperbanyak Oleh :  
BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS  
PURWOKERTO 2010**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas merupakan penjabaran visi, misi, program prioritas Bupati dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013, akan tetapi berdasarkan Pasal 150 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RPJM Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu dicabut dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,



Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

dan

**BUPATI BANYUMAS  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS TAHUN 2008 - 2013.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.



9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan serta sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

#### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;
  - d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Pentahapan;
  - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
  - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program;
  - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
  - j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
  - k. BAB XI : Penutup.

- (2) Rincian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Program Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja SKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

- (1) RPJM Daerah diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi untuk penyusunan RKPD tahun 2014 sebelum tersusunnya



RPJM Daerah Tahun 2013 - 2018 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2013 - 2018.

- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati periode tahun 2013 - 2018.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama masa jabatan Bupati periode tahun 2013 - 2018.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

RPJM Daerah selama periode tahun 2008 - 2009 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal  
BUPATI BANYUMAS,**

**ttd**

**MARDJOKO**

**Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 31 Desember 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**M.ISKANDARARIFIN, SKM, MSc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19531204 197603 1 003**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009  
NOMOR 11 SERI E**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 24 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008- 2013**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran.

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013, namun berdasarkan Pasal 150 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1)

Dokumen RPJM Daerah Tahun 2008-2013 ini diberlakukan sebagai Dokumen RPJM



Daerah transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebelum RPJM Daerah Tahun 2013-2018 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 24 Tahun 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008 - 2013**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2008-2013). RPJM Daerah menjadi landasan bagi penyusun dokumen rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah atau rencana kerja pemerintah daerah maupun perencanaan pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJM Daerah ini adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Kepala Daerah terpilih. Disamping itu, penyusunan RPJM Daerah ini juga diserasikan dengan RPJP Nasional, RPJM Nasional,



RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Daerah Provinsi, serta berbagai kebijakan dan regulasi lain yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan.

RPJM Daerah berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Proses penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Banyumas.

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 2008-2013.

## **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya RPJM Daerah adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang akan digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan dilakukan oleh segenap unsur pemerintah beserta pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2013).

## **2. Tujuan**

- a. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan pembangunan dan unsur pemerintah tentang mekanisme, proses, dan substansi perencanaan pembangunan selama lima tahun dengan baik.
- b. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan periode 2008-2013, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis sehingga memberikan hasil yang optimal.
- d. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas selama lima tahun.
- e. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

## **C. Landasan Hukum**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas



(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E Nomor 20);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7).

#### **D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun RPJM Daerah Kabupaten Banyumas yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJM Daerah ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyumas.

Hubungan RPJM Daerah mengacu kepada RPJP Daerah digambarkan dengan hubungan antara muatan kunci dari visi kedua dokumen tersebut. Muatan kunci visi RPJM Daerah meliputi kata Maju, Amanah, Bangkit, dan Sejahtera. Sedangkan muatan kunci dari visi RPJP Daerah meliputi Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari. Muatan kunci Sejahtera dalam visi RPJP Daerah memberi acuan kepada muatan kunci sejahtera dalam visi RPJM Daerah, muatan kunci Maju dalam visi RPJP Daerah memberi acuan kepada muatan kunci Maju dalam visi RPJM Daerah, muatan kunci Berdaya Saing dalam visi RPJP Daerah memberi acuan kepada muatan kunci Bangkit dalam visi RPJM Daerah, dan muatan kunci Mandiri dan Lestari dalam visi RPJP Daerah memberi acuan kepada muatan kunci Amanah dalam visi RPJM Daerah.



**Gambar 1.1.**  
**Diagram hubungan RPJP Daerah Kabupaten Banyumas**  
**2005-2025 dengan RPJM Daerah Kabupaten Banyumas 2008-**  
**2013**



Pada awalnya Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal tersebut mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mekanisme peningkatan status Peraturan Bupati dijadikan menjadi Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2008. Kemudian untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dibentuk Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah. Keberadaan RPJM Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah yang akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif, yang nantinya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

**Gambar 1.2.**  
**Bagan Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**





E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- A. Kondisi Geografis
- B. Perekonomian Daerah
- C. Sosial Budaya Daerah
- D. Prasarana dan Sarana Daerah
- E. Pemerintahan Umum

**BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

- A. Pendapatan Daerah
- B. Belanja Daerah
- C. Pembiayaan Daerah

**BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

- A. Analisis Lingkungan Strategis Daerah
- B. Isu-Isu Strategis Daerah

**BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran

**BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN**

- A. Strategi Pembangunan Daerah

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

C. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013

**BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- A. Program Pembangunan Daerah
- B. Rencana Kerja
- C. Tujuan
- D. Sasaran

**BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**

- A. Program Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

- A. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
- B. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

**BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

- A. Program Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan

**BAB XI. PENUTUP**

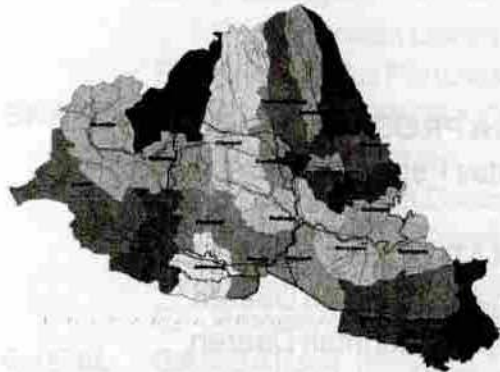


## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### A. Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara 108 39'17"-109 27'15"



Gambar 2.1.  
Wilayah Kabupaten Banyumas

Bujur Timur dan 7 15'05"-7 37'10" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27%, sedangkan sisanya 100.533 Ha atau 75,23% merupakan lahan bukan sawah.

Letak Kabupaten Banyumas berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu :



Gambar 2.2.  
Wilayah Eks karesidenan Banyumas

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;

- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Secara administratif wilayah seluas 132.759 Ha tersebut terdiri atas 27 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan, seperti terlihat dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Kecamatan, Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan
1.	Lumbir	10.266	10	-
2.	Wangon	6.078	12	-
3.	Jatilawang	4.816	11	-
4.	Rawalo	4.964	9	-
5.	Kebasen	5.399	12	-
6.	Kemranjen	6.071	15	-
7.	Sumpiuh	6.001	11	3
8.	Tambak	5.203	12	-
9.	Somagede	4.011	9	-
10.	Kalibagor	3.573	12	-
11.	Banyumas	3.809	12	-
12.	Patikraja	4.323	13	-
13.	Purwojati	3.786	10	-
14.	Ajibarang	6.653	15	-
15.	Gumelar	9.395	10	-
16.	Pekuncen	9.270	16	-
17.	Cilongok	10.534	20	-
18.	Karanglewas	3.248	13	-
19.	Kedungbanteng	6.022	14	-
20.	Baturaden	4.553	12	-
21.	Sumbang	5.342	19	-
22.	Kembaran	2.592	16	-
23.	Sokaraja	2.992	18	-
24.	Purwokerto Selatan	1.375	-	7
25.	Purwokerto Barat	740	-	7
26.	Purwokerto Timur	842	-	6
27.	Purwokerto Utara	901	-	7
<b>Jumlah</b>		<b>132.759</b>	<b>301</b>	<b>30</b>

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008



## 2. Topografi

Kabupaten Banyumas secara topografis, lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 - 100 M dpl (seluas 42.310,3 Ha) dan 100 - 500 M dpl (seluas 40.385,3 Ha). Kategori kemiringan wilayah di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi:

- a. Kemiringan 0 - 2 meliputi areal seluas 43.876,9 Ha (33,05%) yaitu wilayah bagian Tengah dan Selatan;
- b. Kemiringan 2 - 15 meliputi areal seluas 21.294,5 Ha (16,04%) yaitu sekitar Gunung Slamet;
- c. Kemiringan 15 - 40 meliputi areal seluas 35.141,3 Ha (26,47%) yaitu daerah lereng Gunung Slamet;
- d. Kemiringan lebih dari 40 meliputi areal seluas 32.446,3 Ha (24,44%) yaitu daerah lereng Gunung Slamet;

## 3. Hidrologi dan Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi yaitu 2.579 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,3 derajat Celcius, suhu minimum sekitar 24,4 derajat Celcius dan suhu maksimum sekitar 30,9 derajat Celcius. Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, wilayah Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi tiga kategori daerah, yaitu:

- a. Daerah pegunungan disebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang;

- b. Dataran rendah terletak diantara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km;
- c. Dataran rendah di sebelah selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen, dengan lebar rata-rata 10 km.

Kabupaten Banyumas dilintasi sungai yang termasuk sungai besar di Jawa Tengah yaitu Sungai Serayu. Selain itu juga terdapat sungai-sungai yang relatif kecil seperti Sungai Logawa yang membentang di sebelah barat Kota Purwokerto, Sungai Kranji yang membentang di tengah kota Purwokerto, Sungai Banjaran yang juga membentang di tengah Kota Purwokerto, Sungai Pelus, dan Sungai Tajum.

## 4. Penggunaan Tanah sebagai gambaran saat ini. Penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Penggunaan lahan Rural atau Pedesaan yang meliputi penggunaan tanah sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, yang menyebar pada beberapa bagian di wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Penggunaan lahan Urban atau Pusat Keramaian yang meliputi penggunaan tanah perumahan, perekonomian, jasa, perdagangan, industri dan lain sebagainya, yang tersebar di bagian utara, tengah dan selatan wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. Penggunaan lahan *environmental conservation* atau konservasi lingkungan yang meliputi penggunaan lahan pada



Daerah kerucut Gunung Slamet, yaitu meliputi kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumbang. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo sampai ke Kecamatan Tambak yang melewati Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas berada di wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Purwojati. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Namun demikian dari pemanfaatan tanah yang ada masih belum maksimal penggunaannya terhadap kegiatan produktif. Sebagai gambaran proporsi pola tata guna lahan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2.**

**Pola Tata Guna Lahan Kabupaten Banyumas Tahun 2007**

No.	Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	32.226	24,274
2.	Pekarangan/Tanah untuk bangunan	15.291	11,518
3.	Tegalan/Kebun	27.122	20,430
4.	Padang Rumput	12	0,009
5.	Rawarawa yang tidak ditanami	2	0,002
6.	Kolam/Empong	407	0,307
7.	Hutan rakyat	10.237	7,711
8.	Hutan negara	27.087	20,403
9.	Perkebunan	12.134	9,140
10.	Lainlain	8.241	6,207
<b>Jumlah</b>		<b>132.759</b>	<b>100,000</b>

Sumber: Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Dari data di atas diketahui bahwa secara umum pola tata guna lahan di Kabupaten Banyumas didominasi untuk sawah, tegalan/kebun, hutan negara dan pekarangan/tanah untuk bangunan. Luas sawah mencapai 24,274% dari luas lahan di Banyumas, luas hutan negara mencapai 20,430%, luas tegalan/kebun 20,430% dan luas bangunan/ pekarangan mencapai 11,518%. Sedangkan untuk lahan yang lain seperti hutan rakyat, perkebunan dan penggunaan lainnya luasnya relatif kecil yaitu 23,375%. Dari luasan penggunaan tanah tersebut sektor pertanian masih merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Aspek lain yang terkait dengan aspek pertanahan adalah pengelolaan administrasi pertanahan. Data pada tabel 2.3 berikut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Jumlah tanah bersertifikat meliputi Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan tanah Wakaf. Jumlah tanah bersertifikat Hak milik merupakan jumlah yang terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Secara keseluruhan, jumlah tanah bersertifikat menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2007 jumlah tanah bersertifikat mencapai jumlah paling banyak, yaitu 7.678, sementara pada tahun 2008 hanya menunjukkan jumlah 6.752 unit tanah bersertifikat.



**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Sertifikat Tanah Tahun 2004 - 2008**

No.	Tanah Bersertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat (unit)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Hak Milik	5024	6.118	5184	6479	5799
2.	Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
3.	Hak Guna Bangunan	211	738	706	1.142	878
4.	Hak Pakai	96	171	67	56	58
5.	Hak Pengelolaan	-	-	3	-	-
6.	Wakaf	26	11	9	1	17
<b>Jumlah</b>		<b>5357</b>	<b>7.038</b>	<b>5.969</b>	<b>7.678</b>	<b>6.752</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas, 2008

Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan adanya pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah dan penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan serta Pemanfaatan Tanah. Beberapa permasalahan pertanahan adalah banyaknya petak tanah yang belum mempunyai sertifikat dan banyaknya bangunan yang menempati tanah negara, berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2008 dari 994.659 bidang tanah yang belum terdaftar mencapai 76,40 %.

#### 5. Tata Ruang

Konsep penataan tata ruang untuk pemanfaatan pembangunan, harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, produktifitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan beberapa aspek tersebut diperlukan kejelasan pendekatan dalam pelaksanaan serta penerapan dilapangan, hal tersebut penting untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, keterpaduan antar daerah, antara daerah dengan pusat, antar sektor serta

antar pemegang kebijakan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, keterkaitan beberapa aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar serta sesuai dengan kapasitas atau potensi suatu wilayah.

Lebih jauh dijelaskan pula tentang klasifikasi penataan, Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dokumen tata ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kawasan Wisata Baturraden;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Ajibarang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Sokaraja;



- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Baturraden;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 42 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Banyumas;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Cilongok;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Kedungbanteng;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Kalibagor;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Jatilawang;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Tambak;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Patikraja;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Wangon;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota/Ibu Kota Kecamatan Ajibarang;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Purwokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Purwokerto;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas.

## 6. Kawasan Budidaya

Pengelolaan kawasan budidaya ini meliputi: kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan wisata, dan kawasan permukiman (pedesaan dan perkotaan).

### a. Kawasan Hutan Produksi

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi, yang berupa hutan produksi terbatas dan tetap.



Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan-kecamatan; Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Baturaden dan Sumbang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap terletak di Kecamatan : Lumbir, Jatilawang, Purwojati, Ajibarang, Cilongok dan Patikraja.

**b. Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian secara umum di bedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering (tegalan, kebun dan kebun campuran).

**1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah**

Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok untuk komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan tanah sawah. Kawasan ini digunakan tidak hanya sebagai lahan produksi tetapi juga digunakan sebagai daerah resapan air. Persebaran lahan pertanian lahan basah antara lain meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Jatilawang, serta wilayah Kecamatan Rawalo, Wangon dan terutama daerah yang dikenal dengan sebutan Sabuk Gunung Slamet: meliputi wilayah Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Kedungbanteng, Baturaden dan Sumbang.

**2) Kawasan Pertanian Lahan Kering**

Kawasan pertanian lahan kering adalah areal pertanian yang tidak memiliki ketersediaan air secara baik dan cocok untuk tanaman serta

sistem pengolahan lahan kering. Tanaman yang dimaksud meliputi tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan budidaya lahan kering antara lain di wilayah Kecamatan Kalibagor, Pekuncen, Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak.

**3) Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan / Perkebunan** Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi. Adapun yang termasuk dalam kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pertimbangan penetapan alokasi ruang untuk kegiatan perkebunan adalah :

- Kesesuaian lahan untuk jenis tanaman perkebunan dan tanaman tahunan.
- Kondisi perkebunan yang telah berkembang.

**c. Kawasan Peternakan**

Kawasan peternakan merupakan suatu kawasan yang fungsi utamanya didasarkan atas pengembangan potensi ternak yang telah ada. Berdasarkan jenis ternaknya, peternakan di Kabupaten Banyumas dibedakan menjadi dua, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yaitu sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Sedangkan untuk ternak kecil yaitu kambing/domba, ayam ras, dan ayam kampung.



Pendistribusian hewan ternak di Kabupaten Banyumas sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan. Untuk mengembangkan peternakan dapat ditempuh melalui kerjasama antara pihak swasta dan masyarakat pada areal-areal yang memiliki ternak unggulan. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan dapat membentuk *breeding centre* yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan.

Beberapa kawasan ternak antara lain : Ternak besar jenis sapi potong dan sapi perah di Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas dan Kedungbanteng. Kawasan ternak ayam Buras di Kecamatan Karanglewas, Breeding centre ayam ras di Kecamatan Rawalo, dan beberapa kawasan peternakan lain, seperti kuda, babi, itik, kerbau, kambing dan domba yang tersebar di beberapa kecamatan.

#### **d. Kawasan Perikanan**

Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya. Pengembangan Kawasan Perikanan merupakan salah satu strategi dalam pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Banyumas karena memiliki potensi yang cukup besar. Kawasan perikanan dibedakan atas kawasan pembenihan dan kawasan pembesaran. Kawasan pembenihan atau pendederan meliputi wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara, yaitu Kecamatan Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, Cilongok, Sumbang, Kembaran, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat.

Kawasan Pembesaran meliputi wilayah Kabupaten Banyumas bagian selatan yaitu Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Tambak, Somagede, Jatilawang, Rawalo, Sokaraja, Kebasen, Banyumas dan Patikraja. Kecamatan Kedungbanteng merupakan sentra terbesar perikanan budidaya di Kabupaten Banyumas dilihat dari hasil produksi dan pemanfaatan lahan yaitu 26,32% relatif terhadap seluruh pemanfaatan luas lahan budidaya perikanan dengan pangsa produksi pembenihan mencapai 36,62% dan pembesaran serta mina padi sebesar 13,66% dari total produksi perikanan. Pemerintah Kabupaten Banyumas saat ini telah mengembangkan perikanan budidaya di Kecamatan Kedungbanteng dengan pedekatan konsep Minapolitan, terutama di desa Beji sebagai kota tani utama (minapolis) dan Desa Karangsalam Kidul, Kebocoran serta Desa Karangangka sebagai kawasan hinterland.

#### **e. Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambangan pada umumnya merupakan kawasan yang tidak nyaman untuk di jadikan sebagai kawasan hunian atau tempat tinggal, sehingga pada kawasan ini tidaklah di lakukan peralihan fungsi seperti pemukiman. Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang memiliki kekayaan bahan tambang yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain.

Kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan layak untuk dikembangkan dengan resiko kerusakan yang relatif kecil. Kegiatan pertambangan yang rawan terhadap kerusakan lingkungan adalah penambangan sirtu di sepanjang sungai.



Mengingat kawasan pertambangan merupakan kawasan yang rawan terhadap masalah lingkungan, maka pemanfaatan kawasan tambang harus memperhatikan:

- Perubahan struktur tanah dan pembuangan residu sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.
- Keterlibatan penduduk sekitar.

Sumber daya mineral yang telah teridentifikasi di wilayah Kabupaten Banyumas terutama berupa bahan galian golongan B dan bahan galian golongan C. Keberadaan sumberdaya mineral di wilayah Kabupaten Banyumas ini belum dilakukan eksploitasi secara optimal sehingga sektor Pertambangan/penggalian masih dapat ditingkatkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya mineral secara umum secara kuantitatif dapat diketahui pendekatan perkiraan cadangannya berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu, seperti terukur, tereka dan hipotetik.

- Cadangan terukur merupakan salah satu sumberdaya mineral yang sudah dengan pasti baik kuantitas meliputi penyebaran, bentuk dan ukurannya maupun kualitasnya. Tingkat kepercayaan sumberdaya mineral secara terukur adalah 80 - 85%.
- Cadangan terindikasi merupakan cadangan sumberdaya mineral yang sudah diteliti dengan tingkat keyakinan cadangan yang dapat diperoleh antara 50 - 60%.

- Cadangan tereka merupakan cadangan sumberdaya mineral yang sudah diketahui batas penyebaran dan ukuran serta bentuk cadangannya dengan tingkat keyakinan perolehan cadangan antara 20 - 30%, termasuk kualitasnya juga sudah tereka.
- Cadangan hipotetik, yaitu sadangan sumberdaya mineral yang bersifat dugaan dari kemungkinan faktor-faktor geologi yang mengontrolnya atau merupakan dugaan dari penyelidikan tahap awal. Tingkat keyakinan perolehan dari cadangan sumberdaya mineral hipotetik ini berkisar antara 10 - 15% dari total cadangan terduga.

Bahan galian golongan B berupa emas diperkirakan tersebar di beberapa tempat, seperti di Kecamatan Gumelar, Lumbir, Cilongok, Somagede dan Tambak. Namun sampai saat ini yang sudah dilaksanakan eksplorasi detil adalah yang masuk dalam wilayah kecamatan Gumelar dan Lumbir dengan cadangan terindikasi sebesar 9,6 ton. Mengingat dalam kegiatan eksplorasi emas biayanya sangat mahal, maka belum banyak investor yang tertarik dengan bahan galian ini.

Bahan galian golongan C yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 17 jenis dengan kategori sebagai cadangan sumberdaya mineral terukur adalah jenis bahan galian andesit hornblende dan kaolin. Jenis bahan galian andesit hornblende terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dengan kegunaan selain sebagai batu belah juga sangat baik dimanfaatkan untuk ornamen bangunan dan cinderamata dari batu. Sedangkan jenis kaolin banyak terdapat di wilayah Kecamatan Lumbir, Cilongok,



dan Gumelar. Cadangan sumberdaya mineral yang merupakan cadangan terindikasi adalah jenis andesit, diorit, granodiorit, basalt, batugamping, fosfat, pasir, sirtu, dan tanah liat. Sedangkan cadangan sumberdaya mineral yang merupakan cadangan teroka adalah jenis bahan galian oker, trass, kaolin dan tanah urug.

Sumberdaya mineral yang telah dieksploitasi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah jenis andesit, basalt, batugamping, fosfat, pasir, sirtu, tanah urug dan tanah liat.

Sumberdaya mineral untuk keperluan bahan bangunan dari wilayah ini mempunyai potensi pasar yang cukup baik, yaitu selain untuk kebutuhan pembangunan di wilayah sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan di kota lain. Bagi masyarakat setempat, kegiatan penambangan yang dikelola dengan baik akan memberi kesempatan kerja dan penghasilan baru.

Penting untuk diperhatikan dalam penambangan bahan galian ini adalah perlunya kelayakan secara teknis, ekonomi, dan sosial daerah yang bersangkutan. Agar dapat diantisipasi dampak (positif maupun negatif), terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah terjadinya tanah longsor dan erosi, hilangnya daerah resapan air, rusaknya bentang alam, pelumpuran sungai, kerusakan jalan akibat truk pengangkut hasil tambang, dan mengganggu keberadaan air tanah. Dampak negatif terhadap lingkungan perlu segera diupayakan penanggulangannya, misalnya dengan melakukan reklamasi terhadap lahan bekas penambangan bukan tidak mungkin akan lebih bermanfaat daripada sebelum dilakukan penambangan.

Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut dalam melakukan kegiatan penambangan:

- Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan air atau akuifer air sehingga tidak mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya.
- Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari permukiman penduduk sehingga suara bising maupun debu yang timbul akibat aktifitas penambangan tidak akan mengganggu penduduk.
- Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air yang diproduksi dan untuk menjaga kemungkinan hilangnya mata air.
- Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dampaknya bisa sampai ke daerah hilir.
- Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (hutan lindung, suaka alam, dan suaka margasatwa).
- Jumlah cadangan bahan galian cukup banyak dan mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga biaya operasional dapat kembali dan mempunyai nilai lebih.
- Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting.

**f. Kawasan Pengembangan Industri**

Kawasan perindustrian merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk kegiatan industri dengan integrasi sarana dan



prasarana serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Kawasan industri diutamakan kawasan yang memiliki kondisi:

- Memiliki kondisi tanah yang stabil dengan erodibilitas rendah.
- Tersedia sumber bahan baku industri dan pembuangan limbah yang memadai.

Disamping syarat-syarat fisik juga adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber energi, tenaga kerja, transportasi, aglomerasi, dan pasar. Oleh karena itu, lokasi kawasan perindustrian yang potensial juga harus mempertimbangkan kondisi pengembangan industri sebelumnya dan keterkaitan dengan pembangunan industri yang telah ada maupun sedang dalam perencanaan, termasuk dalam kerangka pengembangan kawasan industri secara regional dan nasional.

Berdasarkan pendekatan tersebut dan beberapa masukan analisis maka ditetapkan rencana kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri eksisting berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas yang berlokasi pada jalur transportasi nasional dan berada dalam lingkup Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang. Hal ini karena daerah tersebut sudah ada industri-industri sehingga arahan pengembangannya dipusatkan pada daerah-daerah yang sudah ada. Sebagai contoh adanya potensi batu gamping untuk industri semen di Ajibarang.

Industri yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas ini merupakan industri menengah dan atas dan tetap memperhatikan industri-industri kecil atau rumah tangga. Industri ini antara lain industri yang mengolah hasil pertanian maupun industri lainnya.

2. Industri yang berorientasi pada potensi sumberdaya lokal (local resource), termasuk industri kecil dan industri rumah tangga, dialokasikan pada zona industri. Adapun lokasi zona industri yaitu :

- (a) Lokasi zona industri dengan kriteria sangat layak berlokasi di Kecamatan Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Cilongok, Kemranjen, Banyumas, Pekuncen, dan Somagede.
- (b) Lokasi zona industri dengan kriteria layak berlokasi di luar kawasan (a) dan di luar kawasan lindung (khususnya di luar kawasan kerucut Gunung Slamet).

Adapun pemanfaatan kawasan perindustrian diatur dengan:

- Pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan perindustrian dan memperhatikan dampak lingkungan sekitar.
- Melibatkan penduduk sekitar dalam proses produksi untuk menghindari kesenjangan interwilayah.
- Pengembangan di luar kawasan harus berbasis pada potensi lokal setempat.
- Pembinaan industri kecil dan rumah tangga dilakukan guna meningkatkan nilai produk hasil-hasil pertanian



Pengembangan industri diarahkan agar memperhatikan potensi lokal dan mempertimbangkan keterkaitan antar potensi lokal. Kawasan perindustrian juga harus dekat dengan sumber energi, tenaga kerja sekaligus pasar yang tercermin dari kedekatan dengan sarana pengangkutan ekspor. Selain itu syarat lain yang harus diperhatikan adalah keberadaan industri yang telah ada dan keterkaitan antar industri sehingga dapat saling mendukung dan sinergis.

#### **g. Kawasan Pariwisata**

Kawasan wisata adalah kawasan dengan fungsi utama kegiatan pariwisata dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Pengembangan kawasan ini harus melihat potensi yang dimiliki dan menjadi daya tarik konsumen wisata. Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan antara lain :

- Keindahan alam, panorama, potensi pertanian, dan kekayaan alam yang khas dan menarik.
- Kekayaan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang bernilai tinggi dan diminati wisatawan.
- Peninggalan budaya dan peninggalan lain yang bernilai sejarah.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka lokasi yang cukup potensial bagi pengembangan kawasan wisata adalah di kawasan lereng Gunung Slamet yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Sumbang, Cilongok untuk wisata alam dan buatan serta di Kecamatan Banyumas, kota Purwokerto dan Karanglewas untuk wisata budaya dan peninggalan sejarah.

Pengembangan pariwisata memiliki karakteristik yang khas dibandingkan kegiatan-kegiatan pengembangan lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan harus menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang berbeda dengan kebutuhan penduduk lokal. Pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pemanfaatan kawasan wisata diatur melalui :

- Pengembangan kawasan wisata dengan potensi utama panorama, dan keindahan alam menghindari kerusakan terhadap lingkungan terutama pada daerah-daerah kemiringan tinggi.
- Pengembangan kawasan wisata dengan potensi utama budaya dan tradisi menghindari eksploitasi budaya yang menghilangkan kesakralan budaya.
- Pengembangan kawasan wisata dengan potensi utama peninggalan sejarah diupayakan dengan mempertimbangkan kelestarian peninggalan.
- Penyediaan sarana dan prasarana berstandar sesuai tingkat layanan obyek wisata (misal obyek wisata regional maka sarana dan prasarana berstandar regional) tanpa mendiskriminasi pelayanan terhadap penduduk lokal.

#### **h. Kawasan Permukiman**

Pengembangan kawasan permukiman mendapatkan prioritas dalam menentukan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena



jauh dari jangkauan sarana.

Kriteria fisik yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan permukiman adalah : Kemiringan antara 0-15% atau lebih dengan pembatasan-pembatasan tertentu (Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, teknik pengelolaan lahan) dan Erodibilitas rendah dan bebas banjir atau air genangan.

#### 1) Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktifitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi.

Untuk membentuk profil permukiman yang mendukung aktifitas perkotaan tersebut, maka dibutuhkan kriteria-kriteria khusus diluar kriteria fisik sebagai berikut :

Kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan.

- Aksesibilitas yang baik dan dekat dengan pusat-pusat kegiatan.

Untuk mencapai kondisi permukiman yang mendukung kegiatan perkotaan, maka dibutuhkan pengaturan pengembangan kawasan perkotaan sebagai berikut:

Melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh

- menjadi kawasan- kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai.

- Pengaturan ijin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif.

#### 2) Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri perdesaan. Kendala utama pengembangan kawasan permukiman perdesaan adalah adanya kecenderungan permukiman yang terpusat sehingga terisolasi.

Pemusatan permukiman perdesaan menyebabkan penurunan kawasan perdesaan. Penurunan tersebut disebabkan perubahan status wilayah dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Untuk mengantisipasi keberadaan fungsi permukiman perdesaan maka dibutuhkan pengembangan kawasan permukiman yang mampu terbuka bagi pusat-pusat kegiatan sekitarnya.

Pengaturan permukiman perdesaan yang kondusif dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada simpul-simpul kegiatan (nodes).
- Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantong permukiman perdesaan.
- Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupun pariwisata.



## 7. Lingkungan Hidup

Secara umum tujuan pembangunan adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah, termasuk di Kabupaten Banyumas khususnya di daerah Purwokerto yang perkembangannya ke arah sektor jasa dan perdagangan serta industri kecil dan menengah.

Permasalahan lingkungan tersebut ditandai antara lain dengan luasnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran lingkungan, dan berkurangnya hutan produktif serta terjadinya bencana alam. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 lahan kritis terus bertambah luasannya, dari 15.975 hektar pada tahun 2005 meningkat menjadi 17.775 hektar pada tahun 2008. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Banyumas :

**Tabel 2.4.**  
**Luas Lahan Kritis Tahun 2005 - 2008**

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Perubahan (%)
1.	2005	15.975	-
2.	2006	17.000	6,42
3.	2007	17.000	0,00
4.	2008	17.775	4,56

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2008

Kabupaten Banyumas memiliki kawasan hutan yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah meliputi :

- Kawasan Hutan Banyumas Timur yang dikelola oleh Perum Perhutani Banyumas Timur dengan luas kawasan mencapai 18.059,50 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 9.082,20 Ha dan hutan produksi seluas 8.977,30 Ha;
- Kawasan Hutan Banyumas Barat yang dikelola oleh Perum Perhutani Banyumas Barat dengan luas kawasan mencapai 8.235,80 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 79,30 Ha dan hutan produksi seluas 8.156,50 Ha; dan
- Kawasan Hutan Kedu Selatan, yang meliputi wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara dengan luas kawasan mencapai 2.791,09 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 318,8 Ha dan hutan produksi seluas 2.472,29 Ha.

Berdasarkan fungsi hutan, pada tahun 2007 Kabupaten Banyumas mempunyai hutan lindung seluas 9.082,20 Ha di wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur dan 79,30 Ha di wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat. Hutan Produksi seluas 8.977,30 Ha di wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur dan 8.156,50 Ha di wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat. Tabel berikut memberikan rincian fungsi hutan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007.



**Tabel 2.5.**

**Luas Hutan Menurut Fungsinya di wilayah Perum Perhutani  
Banyumas Timur dan Wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat  
Tahun 2007**

No.	Fungsi Hutan	Luas Hutan (Ha)		
		Perum Perhutani Banyumas Timur	Perum Perhutani Banyumas Barat	Perum Perhutani Kedu Selatan
1.	Hutan Suaka	-	-	-
2.	Hutan Lindung	9.082,20	79,30	318,80
3.	Hutan Produksi	8.977,30	8.156,50	2.472,29
4.	Hutan Lainnya (LDTI)	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18.059,50</b>	<b>8.235,80</b>	<b>2.791,09</b>

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2008

Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks wilayah internal maupun regional, membentuk satu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kawasan lindung ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banyumas adalah kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik lahan kawasan yang disesuaikan dengan kriteria kawasan lindung yang telah dikemukakan sebelumnya (Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 698/Kpts/Um/8/1981 dan Nomor 837/Kpts/Um/11/1980), maka kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Daerah kerucut Gunung Slamet, yaitu meliputi kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumbang.

- b. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo sampai ke Kecamatan Tambak yang melewati Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede.
- c. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas yang berada di wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Purwojati.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Kegiatan pertanian tanaman tahunan masih dapat dilakukan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah, yaitu: Kecamatan Pekuncen, Gumelar, Lumbir, Wangon, Cilongok, Purwojati, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Kebasen, Patikraja, Kedungbanteng dan Rawalo.

Di sisi lain kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada bagian selatan Kabupaten Banyumas yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak. Pada daerah rawan banjir ini Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat untuk melindungi daerah rawan bencana, seperti adanya pemantapan kawasan lindung di antaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus (tanaman tahunan).

Dari hal tersebut diatas, pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup.



Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML) dan dijadikan sebagai suatu dokumen lingkungan baik dalam bentuk Amdal, UKL/UPL maupun SPPLH.

Permasalahan yang mendasar dan perlu penanganan serius untuk pengembangan lingkungan hidup adalah masalah penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar sektor dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan usaha yang belum mempunyai dokumen lingkungan.

## B. Perekonomian Daerah

### 1. Struktur Perekonomian

Untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten Banyumas secara umum, dapat diketahui dari indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut akan diuraikan pertumbuhan PDRB dan kontribusi sektor PDRB selama lima tahun terakhir (tahun 2004-2008) berdasarkan atas harga berlaku dan harga konstan. Hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat menjelaskan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi. Apabila diurutkan, maka sektor unggulan pertama adalah Pertanian, kemudian sektor industri dan sektor jasa berdasar hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketiga sektor yaitu sektor Pertanian, sektor industri dan Sektor Jasa merupakan andalan utama Kabupaten Banyumas saat ini karena kontribusinya cukup besar.

Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

**Tabel 2.6.**  
**PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (dalam ribuan rupiah)**

No.	Sektor	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	1.122.272.029	1.265.760.363	1.457.203.665	1.670.954.044	1.834.498.944
2.	Penggalian	71.080.811	80.84.488	90.451.557	100.848.125	114.847.903
3.	Industri	834.711.764	969.908.730	1.091.060.469	1.197.826.817	1.387.082.547
4.	Listrik	73.789.141	82.525.854	88.682.746	98.770.143	109.470.628
5.	Bangunan	445.020.853	534.72.651	629.796.026	699.656.875	788.050.576
6.	Perdagangan	681.988.315	785.321.390	913.737.765	1.054.625.260	1.214.540.892
7.	Pengangkutan	492.203.525	562.621.567	614.019.934	665.308.359	752.127.153
8.	Keuangan,sewa	388.81.929	463.006.181	543.481.754	633.759.379	756.890.157
9.	Jasa	725.316.131	836.086.113	999.785.619	1.146.450.714	1.386.135.355
	PDRB	4.835.240.498	5.580.804.337	6.428.219.534	7.268.199.715	8.343.644.145
	Jumlah Pendduk (Jiwa)	1.518.678	1.531.040	1.543.431	1.548.100	1.555.653
	PDRB / Kapita	3.183.848	3.645.107	4.164.889	4.694.916	5.363.497

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008

Secara rinci kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selama lima tahun ditunjukkan pada tabel 2.7 berikut ini. Ketiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, sektor industri dan Sektor Jasa kontribusinya selama lima tahun menunjukkan angka yang relatif besar, yaitu antara 15% sampai dengan 20% dari PDRB.



**Tabel 2.7.****Kontributor Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen)**

No.	Sektor	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	23,21	22,68	22,67	22,90	21,99
2.	Penggalian	1,47	1,45	1,41	1,39	1,38
3.	Industri	17,26	17,38	16,97	16,48	16,62
4.	Listrik	1,53	1,48	1,38	1,36	1,31
5.	Bangunan	9,20	9,58	9,80	9,63	9,44
6.	Perdagangan	14,10	14,07	14,21	14,51	14,56
7.	Pengangkutan	10,18	10,08	9,55	9,15	9,01
8.	Keuangan	8,04	8,30	8,45	8,72	9,07
9.	Jasa	15,00	14,98	15,55	15,77	16,61
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, diketahui bahwa sumbangan tertinggi terhadap pembentukan PDRB lima tahun terakhir terdapat pada sektor Pertanian, sektor Industri dan sektor Jasa. Secara rinci PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8.**
**PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Sektor	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	787.619.381	800.977.116	814.815.101	840.404.203	875.737.586
2.	Penggalian	48.377.052	50.357.987	52.684.405	55.408.014	58.001.478
3.	Industri	602.635.190	617.386.776	637.418.512	659.537.345	681.529.041
4.	Listrik	30.695.515	33.491.610	35.218.195	37.862.290	39.523.838
5.	Bangunan	319.185.258	332.338.503	345.851.744	362.126.057	381.604.075
6.	Perdagangan	506.180.247	525.396.984	560.700.320	597.057.373	631.003.909
7.	Pengangkutan	367.730.771	379.241.054	395.613.431	416.104.964	440.880.108
8.	Keuangan	282.793.660	298.619.249	319.089.156	344.749.310	365.311.166
9.	Jasa	541.416.615	560.589.880	598.156.51	645.396.389	699.190.784
<b>PDRB</b>		<b>3.486.633.689</b>	<b>3.598.399.159</b>	<b>3.759.547.615</b>	<b>3.958.645.946</b>	<b>4.172.781.985</b>
Jumlah Penduduk (Jiwa)		1.503.917	1.531.040	1.543.431	1.548.100	1.555.635
<b>PDRB Per Kapita</b>		<b>2.225.627</b>	<b>2.350.297</b>	<b>2.435.837</b>	<b>2.557.100</b>	<b>2.682.366</b>

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2008

Berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2000 diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2004-2008 relatif tidak mengalami banyak perubahan. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian dari tahun ke tahun tetap dimiliki oleh sektor pertanian, industri, dan jasa. Walaupun memiliki proporsi kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung mengalami penurunan peran dari tahun ke tahun (Tabel 2.9). Apabila kedua sektor ini akan dipertahankan sebagai sektor unggulan, diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap kedua sektor ini. Hal menarik yang perlu diperhatikan, penurunan sektor pertanian yang juga diikuti dengan penurunan sektor industri, menandakan keduanya tidak bersubstitusi, penurunan sektor pertanian tidak dipindahkan ke sektor industri tetapi ke sektor lainnya. Pada tabel 2.9 juga dapat diketahui sektor yang memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sektor Listrik.

**Tabel 2.9.**
**Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2000 (dalam persen)**

No.	Sektor	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	22,59	22,26	21,67	22,99	20,99
2.	Penggalian	1,39	1,40	1,40	1,39	1,39
3.	Industri	17,28	17,16	16,95	16,48	16,33
4.	Listrik	0,88	0,93	0,94	1,36	0,95
5.	Bangunan	9,15	9,24	9,20	9,63	9,14
6.	Perdagangan	14,52	14,60	14,91	14,51	15,12
7.	Pengangkutan	10,55	10,54	10,52	9,15	10,57
8.	Keuangan	8,11	8,30	8,49	8,72	8,75
9.	Jasa	15,53	15,58	15,91	15,77	16,76
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008



## 2. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Tabel 2.10 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut sektor atas dasar harga konstan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi sektor Listrik yang meliputi sub sektor listrik dan air bersih menempati posisi pertama untuk laju pertumbuhan rerata Tahun 2004-2008 yaitu sebesar 6,87%. Kemudian diikuti oleh sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,42% serta Sektor Jasa-jasa sebesar 5,66%.

Untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari dua sisi keadaan perekonomian agar pilihan sektor mana yang mampu memacu laju pertumbuhan lebih tepat. Hal utama yang dilihat adalah kontribusi sektor. Sektor yang memiliki kontribusi dominan akan mampu menggerakkan aktivitas perekonomian, selain itu perlu juga melihat laju pertumbuhan sektor, namun bisa dikesampingkan apabila kontribusi sektor tersebut terlalu rendah, karena dalam jangka waktu lima tahun tidak mungkin ada pergeseran peran sektor secara berarti, sehingga untuk jangka waktu lima tahun ke depan peran sektor yang terlalu kecil dengan laju pertumbuhan tinggi tidak cukup berperan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, misalnya sektor listrik dan air bersih memiliki laju pertumbuhan rerata 6,87% merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibanding sektor yang lain, namun kontribusi dalam PDRB hanya 0,95% maka akan sangat sulit merubah atau meningkatkan PDRB secara keseluruhan, sebaliknya sektor pertanian yang memiliki kontribusi 20,99% dan rerata pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten Banyumas akan tetap memiliki arti penting dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.10.**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)**

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	2,38	1,70	1,73	3,14	4,20
2.	Penggalian	3,75	4,09	4,62	5,17	4,68
3.	Industri	4,19	2,45	3,24	3,47	3,33
4.	Listrik	8,19	9,11	5,16	7,51	4,39
5.	Bangunan	4,63	4,12	4,07	4,71	5,38
6.	Perdagangan	4,35	3,80	6,72	6,48	5,69
7.	Pengangkutan	5,93	3,13	4,32	5,18	5,69
8.	Keuangan	5,67	5,6	6,85	8,04	5,95
9.	Jasa	4,21	3,54	6,7	7,90	5,96
PDRB		3,71	3,21	4,48	5,30	8,34

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008 (diolah)

Untuk mengetahui sektor ekonomi basis dilakukan penghitungan nilai LQ (Location Quotient) yaitu dengan menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara share output sektor i di kabupaten/kota dan share output sektor i di provinsi. Untuk mengetahui nilai LQ menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, dapat diketahui dengan membandingkan kondisi PDRB Kabupaten Banyumas terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, seperti tampak pada tabel 2.11. Angka LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak terhingga. Angka LQ yang kurang dari 1 artinya bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan relatif. Angka LQ sama dengan satu mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang sama dengan



rata-rata semua daerah. Sedangkan angka LQ lebih besar dari 1 memiliki makna bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata.

Melalui pendekatan dengan menggunakan analisis (LQ) dapat dipetakan posisi masing-masing sektor yang ada di Kabupaten Banyumas. Potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangkan pada suatu daerah dan merupakan sektor yang sangat mendukung perkembangan daerah tersebut merupakan sektor basis. Dari hasil analisa dengan menggunakan data PDRB tahun 2004-2008 atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat diketahui sektor yang masuk kategori unggul dan sektor yang tidak unggul. Investasi sebagai penggerak pembangunan daerah bisa dilakukan pada sektor-sektor yang masuk kategori unggul atau sektor basis.

**Tabel 2.11.**

**Nilai LQ Menurut Harga Konstan Tahun 2000**

No.	Sektor	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	1,093	1,087	1,064	1,053	1,060
2.	Penggalian	1,389	0,011	1,377	1,258	1,249
3.	Industri	0,540	0,541	0,532	0,530	0,521
4.	Listrik	1,117	1,138	1,128	1,123	1,135
5.	Bangunan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,607
6.	Perdagangan	0,677	0,705	0,695	0,706	0,708
7.	Pengangkutan	2,096	2,131	2,065	2,128	2,077
8.	Keuangan	2,284	2,335	2,396	2,369	2,403
9.	Jasa	1,549	1,565	1,557	1,552	1,571

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2007

Berdasar nilai LQ seperti yang tampak pada tabel 2.11 diatas, dapat diketahui beberapa sektor basis yang dapat atau berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Hasil dari penghitungan LQ menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sektor merupakan sektor basis di Kabupaten Banyumas, kecuali sektor industri dan perdagangan yang mempunyai nilai LQ dibawah 1 (sektor non basis), yang menunjukan sektor tersebut memiliki kecenderungan impor dari wilayah lain. Sektor bangunan selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai LQ yang stabil, yaitu 1 yang berarti sektor tersebut telah mencukupi dalam kegiatan tertentu.

Data PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa sektor yang utama atau yang paling besar kontribusinya adalah sektor pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Kabupaten Banyumas ternyata juga merupakan sektor basis, hal ini nampak dari analisis Location Quotient (LQ). Selama 5 tahun terakhir sektor pertanian merupakan sektor basis dengan nilai LQ diatas 1 artinya sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan daerah dan mampu mengekspor produksinya keluar daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan Kabupaten Banyumas untuk berswasembada pangan khususnya beras dimana pada tahun 2006 terjadi surplus sebesar 23.869 ton. Selain itu, Sub Sektor Peternakan juga menunjukkan adanya kemampuan Kabupaten Banyumas untuk mencukupi kebutuhan daerah dan mengekspor produksinya ke daerah lain. Hal ini didukung dengan peningkatan populasi dan produksi ternak.

Sektor basis lainnya adalah sektor penggalian dengan nilai LQ diatas 1, kecuali pada tahun 2004 dimana nilai LQ sektor penggalian hanya sebesar 0,011. Sektor listrik dan air bersih, Komunikasi/Angkutan,



Keuangan dan Jasa juga merupakan sektor basis karena selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai LQ diatas 1. Sektor jasa termasuk didalamnya jasa pemerintahan, sosial kemasyarakatan, jasa hiburan serta jasa perorangan dan rumah tangga, jasa pendidikan, jasa kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, dokter praktek dan lain-lain.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi (Tabel 2.12). Pada tahun 2004 dan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 12% dan 40%. Namun, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami penurunan sebesar 23%. Kebijakan pemerintah menaikkan BBM pada bulan Oktober tahun 2005 memberikan efek kenaikan harga diberbagai komoditas, sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi di tahun tersebut. Selain itu, pada tahun tersebut terjadi penurunan pada sektor pertanian sebagai akibat adanya berbagai perubahan musim yang mempengaruhi produktivitas sektor ini. Padahal, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB.

**Tabel 2.12.**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan
1.	2004	4,17	0,12
2.	2005	3,21	-0,23
3.	2006	4,48	0,40
4.	2007	5,30	0,18
5.	2008	5,41	0,02

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi diatas, maka dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut (tabel 2.13):

**Tabel 2.13.**

**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2008	5,41
2.	2009	5,61
3.	2010	5,81
4.	2011	6,01
5.	2012	6,21
6.	2013	6,41

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Kab. Banyumas

Proyeksi pertumbuhan ekonomi seperti tampak pada tabel 2.13 merupakan prediksi berdasarkan analisis trend dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi lima tahun sebelumnya, yaitu data pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menggunakan judgement berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain misal dengan mempertimbangkan prediksi kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah yang ada untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada Tahun 2013 dengan skenario optimis 6,41%, maka optimalisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas diarahkan pada pilihan alternatif kebijakan di bidang ekonomi yang dapat menciptakan multiplier effect yang besar dan peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah.



Tentu saja untuk mewujudkan hal itu diperlukan investasi yang tidak sedikit, baik bersumber dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah pusat, masyarakat maupun dunia usaha. Sumber dana investasi ini tidak terbatas dari sumber dana dalam negeri yang biasanya berasal dari tabungan domestik maupun pinjaman domestik, melainkan tidak tertutup kemungkinan (dalam sistem perekonomian yang terbuka saat ini) sumber dana dari pinjaman luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan dorongan investasi pada berbagai sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan PDRB yang diikuti dengan peningkatan efisiensi terhadap pembiayaan investasi.

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga dalam wilayah eks Karesidenan Banyumas, pertumbuhan ekonomi Banyumas tahun 2007 menempati posisi kedua setelah Kabupaten Purbalingga (Tabel 2.14). Sehingga perlu ditekankan kembali percepatan pertumbuhan ekonomi agar Banyumas tidak tertinggal bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga.

**Tabel 2.14.**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah**  
**Eks Karesidenan Banyumas (%)**

No.	Tahun	Kabupaten			
		Banyumas	Banjarnegara	Cilacap	Purbalingga
1.	2003	3,71	2,96	6,33	3,14
2.	2004	4,17	3,81	6,65	3,35
3.	2005	3,21	3,95	7,72	4,18
4.	2006	4,48	4,32	5,00	5,06
5.	2007	5,30	5,01	2,64	6,19

Sumber: *Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2007*

Selanjutnya dapat diketahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 pada tabel 2.15 berikut ini:

**Tabel 2.15.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dan**  
**Propinsi Jawa Tengah (%)**

No.	Tahun	Kab. Banyumas	Prop. Jawa Tengah
1.	2003	3,71	4,98
2.	2004	4,17	5,13
3.	2005	3,21	5,35
4.	2006	4,48	5,33
5.	2007	5,30	5,59

Sumber : [www.Jateng.BPS.go.id](http://www.Jateng.BPS.go.id) (diolah)

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dan selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi.

#### 4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita

Perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyumas tidak hanya dilihat dari PDRB sektoral, tetapi juga harus diperhatikan perkembangan PDRB per kapita dan pendapatan per kapita dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gambaran mengenai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas merupakan hasil akumulasi dari PDRB Per Kapita menurut Kecamatan. Dari perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku tahun 2008 diketahui bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita dibawah PDRB Per Kapita Kabupaten adalah



Kecamatan Wangon, Banyumas, Ajibarang, Baturaden, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara.

Bila dilihat dari PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kecamatan Tahun 2008, rata-rata pendapatan perkapita Kecamatan Eks Kotip (4 Kecamatan) sebesar Rp. 9.914.209,- bila dibandingkan dengan pendapatan rata-rata perkapita kecamatan lainnya (23 Kecamatan) yang sebesar Rp. 4.331.909,- angka kesenjangan pendapatan rata-rata perkapita antara Kecamatan Eks Kotip (4 Kecamatan) dan pendapatan rata-rata perkapita kecamatan lainnya (23 Kecamatan) sebesar Rp. 5.582.299,-

**Tabel 2.16.**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Lumbir	2.448.638	2.646.912	2.999.481	3.391.111	3.848.636
2.	Wangon	3.790.310	4.247.869	4.790.953	5.409.198	6.261.687
3.	Jatilawang	3.156.566	3.538.556	4.021.506	4.544.297	5.231.110
4.	Rawalo	2.739.313	3.102.779	3.560.749	4.038.804	4.563.262
5.	Kebasen	1.991.537	2.168.442	2.457.601	2.676.556	3.049.213
6.	Kemranjen	1.961.735	2.197.221	2.504.943	2.844.092	3.266.306
7.	Sumpiuh	2.377.269	2.691.228	3.052.637	3.478.500	4.011.330
8.	Tambak	2.157.930	2.426.593	2.773.808	3.124.460	3.559.163
9.	Somagede	3.281.227	3.628.445	4.116.030	4.599.874	5.215.006
10.	Kalibagor	3.696.763	4.147.138	4.697.868	4.640.904	5.223.145
11.	Banyumas	3.603.519	4.127.430	4.719.698	5.300.671	6.181.903
12.	Patikraja	2.484.383	2.832.414	3.227.961	3.608.905	4.121.103
13.	Purwojati	3.119.128	3.496.667	3.979.482	4.497.632	5.120.273

No.	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008
14.	Ajibarang	3.460.887	3.915.278	4.423.648	4.939.849	5.702.126
15.	Gumelar	1.657.433	1.882.588	2.146.365	2.423.565	2.809.415
16.	Pekuncen	2.052.281	2.307.843	2.634.444	2.985.639	3.458.234
17.	Cilongok	3.059.826	3.330.250	3.388.297	4.164.760	4.788.655
18.	Karanglewass	2.667.875	3.009.288	3.113.531	3.757.859	4.265.669
19.	Kedungbanteng	2.494.128	2.748.192	4.410.012	3.505.959	3.993.229
20.	Baturaden	3.394.930	3.915.529	4.410.012	4.957.717	5.612.691
21.	Sumbang	2.185.144	2.397.034	2.747.624	3.111.001	3.540.552
22.	Kembaran	2.804.626	3.181.395	3.570.210	3.969.954	4.519.361
23.	Sokaraja	3.410.631	3.838.417	4.344.985	4.856.162	5.633.764
24.	Purwokerto Selatan	3.889.096	4.618.995	5.296.805	5.939.955	6.916.633
25.	Purwokerto Barat	5.606.058	6.694.839	7.686.930	8.586.179	10.092.226
26.	Purwokerto Timur	8.775.168	10.679.310	12.513.370	14.262.943	17.014.014
27.	Purwokerto Utara	2.765.988	3.804.261	4.347.594	4.843.066	5.633.961
<b>PDRB Per Kapita</b>		<b>2.903.029</b>	<b>3.183.848</b>	<b>3.645.107</b>	<b>4.640.490</b>	<b>5.363.497</b>

*Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008*

**Tabel 2.17.**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

No.	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)	Penbahaan (%)
1.	2004	3.183.848	9,67
2.	2005	3.645.107	14,49
3.	2006	4.150.760	14,71
4.	2007	4.640.490	11,42
5.	2008	5.363.497	14,24

*Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008*



Walaupun perekonomian di Kabupaten Banyumas terus mengalami pertumbuhan, tetapi pendapatan per kapita masyarakat Banyumas masih tergolong rendah. Dengan mendasarkan pada standar kemiskinan Bank Dunia terendah sebesar US \$ 1 per orang (dengan asumsi 1 US\$ sebesar Rp.9.100,- dan satu tahun 360 hari), maka standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita menurut Bank Dunia adalah sebesar Rp. 3.276.000,- per tahun. Dengan demikian pendapatan perkapita masyarakat Banyumas untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 masih di bawah standar kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Namun dengan menggunakan standar kemiskinan terendah dari Sayogyo sebesar 320 kilogram beras selama setahun dan harga beras dihitung sebesar Rp. 5.000,- maka pendapatan per kapita masyarakat Banyumas berada di atas standar kemiskinan sebesar Rp. 1.600.000,-.

Berdasarkan harga konstan, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan. Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2002 mencapai Rp. 2.163.321,- meningkat menjadi Rp. 2.427.574,- pada tahun 2006. Meskipun pendapatan perkapita mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun pendapatan per kapita tersebut masih jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2004 mencapai Rp. 5.172.390,- ([www.jateng.go.id](http://www.jateng.go.id)). Dari perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan tahun 2008 diketahui bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita dibawah PDRB Per Kapita Kabupaten adalah Kecamatan Lumbir, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas,

Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, dan Kembaran. Sedangkan Kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita diatas PDRB Per Kapita Kabupaten adalah Kecamatan Wangon, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara.

**Tabel 2.18.**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

No.	Tahun	PDRB Per Kapita	% Perubahan
1.	2004	2.295.835	3,15
2.	2005	2.350.297	2,37
3.	2006	2.427.574	4,05
4.	2007	2.527.456	3,76
5.	2008	2.682.366	4,90

Sumber: Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008

## 5. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Banyumas (Kota Purwokerto) selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Purwokerto sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 14,54% pada tahun 2005. Hal yang sama terjadi juga pada laju inflasi Provinsi dan Nasional, yang memiliki laju inflasi tertinggi pada tahun 2005. Kondisi ini terjadi disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga BBM, yang berdampak pada peningkatan semua Indeks Harga Konsumen. Meski demikian, laju inflasi tertinggi Kabupaten Banyumas pada tahun 2005 tersebut masih lebih rendah atau dibawah laju inflasi Provinsi sebesar 16,46% dan laju inflasi Nasional sebesar 17,11%. Sedangkan laju inflasi Kota Purwokerto pada tahun 2007 sebesar 6,14% lebih rendah



dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 6,59% dan Jawa Tengah sebesar 6,57%.

**Tabel 2.19.**  
**Laju inflasi Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2004 - 2008**

No	Tahun	Banyumas, Purwokerto (%)	Semarang, Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2004	6,32	5,98	6,40
2	2005	14,54	16,46	17,11
3.	2006	8,45	7,89	8,45
4.	2007	6,14	6,57	6,59
5.	2008	12,06	10,56	11,06

## 6. Investasi

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan adanya iklim investasi yang kondusif, salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran

daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya, juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dalam memenangkan persaingan. Investasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, baik untuk investasi PMDN maupun PMA, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.20.**  
**Jumlah PMA dan PMDN**

No	Tahun	PMA (unit)	PMDN (unit)	Jumlah
1.	2003	1	2	3
2	2004	1	2	3
3.	2005	2	3	5
4.	2006	2	3	5
5.	2007	2	4	6

*Sumber: Badan Penanganan Modal Kab. Banyumas, 2008*

Kebutuhan investasi pembentukan modal tetap bruto diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut terdiri dari investasi swasta dan investasi pemerintah. Peranan investasi swasta dalam perekonomian daerah relatif besar, antara 70% - 80%, sedangkan investasi pemerintah relatif kecil hanya 20%-30% dari total investasi. Di Kabupaten Banyumas, jumlah Penerbitan (Unit Usaha Baru) Non Fasilitas tahun 2004 sebanyak 45 buah dan terus mengalami peningkatan menjadi 243 buah di tahun 2005, 381 buah di tahun 2006, 306 buah di tahun 2007 dan 351 buah di tahun 2008 dengan nilai investasi / aset Non Fasilitas tahun 2004 sebesar Rp. 1.557.680.000,- meningkat menjadi Rp. 103.675.402.000 pada tahun 2005, Rp. 181.124.454.759,- pada tahun 2006, Rp. 159.338.703.000,- pada tahun 2007 dan Rp. 321.336.155,- pada tahun 2008.



Investasi di dalam 5 tahun terakhir diantaranya: PT. Dharma Setya Nusantara Pengolahan Kayu, PT. Fatmaba Taman Rekreasi dan Olah Raga, Buaran Market Purwokerto, PT. PAN Indonesia Bank Purwokerto, PT. Bank Mega Purwokerto, PT. Mentari T.U. Nusantara. Pengolahan Batu, Terminal Purwokerto, Purwokerto City Walk, PT. Indokores Sahabat (Kerajinan Wig/Rambut Palsu), SPBU Banyumas, SPBU Arcawinangun, SPBU Karanglewas.

Potensi Investasi di Kabupaten/Kota saat ini di Bidang Pariwisata adalah: Pengembangan Loka Wisata Nirwana Manggala Karang tengah Kecamatan Cilongok, Pengembangan Loka Wisata Air Serayu River Voyage, Goa Karst (Darmakradenan Ajibarang), Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Pengembangan Loka Wisata Kota Lama Banyumas, Pengembangan Loka Wisata Sejarah Peninggalan Amangkurat I di Kalisalak, Wisata Religi Masjid Saka Tunggal dan Taman Kera, Pengembangan Loka Wisata Baturaden, Pengembangan Loka Wisata Masjid Saka Tunggal Cikakak, Wangon, Pengembangan Obyek Wisata Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman, Pembangunan Serayu Bridge Rest and Resto.

Beberapa potensi investasi di Bidang Agrobisnis antara lain Budidaya Gurami di Kecamatan Kemranjen, Baturaden, Kedungbanteng, Budidaya Jagung di Kecamatan Sumbang, Kembaran, Budidaya Durian di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Budidaya Anggrek di Kecamatan Baturaden, Banyumas, Rawalo, Purwokerto, Budidaya Nilam di Kecamatan Cilongok, Baturaden.

Di bidang Industri, Kabupaten Banyumas memiliki potensi investasi seperti Industri Minyak Atsiri, Pabrik Gula Kelapa, Pabrik Bioetanol, Industri Kecap dan atau Industri Hilir berbahan baku gula kelapa lainnya,

Industri primer hasil hutan; Chipwood, veneer, plywood, jointingwood dan lain-lain, Industri Klinker Semen Portland, Industri Kemasan.

Potensi dibidang perdagangan adalah; Purwokerto Trade Center, Pasar Sokaraja, Pasar Hewan, Mix used Building/Plasa, Supplier Kebutuhan Bahan Baku Sentra Logam Pasir.

Di bidang Pertambangan Kabupaten Banyumas memiliki potensi investasi pada tambang phospat, tambang granit; sedangkan di bidang pelayanan publik adalah Penginapan Sopir di Terminal Bus Purwokerto Tipe A, Pembangunan Bengkel di Terminal Bus Purwokerto Tipe A, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Kota Purwokerto dan sekitarnya, Pengelolaan TPA Sampah dan Industri Pengolahan Sampah dan Tinja, Pembangunan Terminal Bongkar Muat Kendaraan Darat, Pengembangan Sistem Penyediaan Air bersih Kota Purwokerto dan sekitarnya.

Dengan adanya potensi investasi seperti tersebut diatas, maka pemerintah perlu untuk mendorong berkembangnya investasi di Kabupaten Banyumas. Mengacu penelitian KPPOD (2003), sejumlah variabel, konsep yang mempunyai variasi nilai/intensitas/jumlah yang menggambarkan atribut dari variabel tersebut digunakan untuk menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Berdasarkan identifikasi tingkat dan elemen-elemen untuk tujuan daya tarik peningkatan investasi daerah, terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi investasi; yang dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) faktor sebagai berikut : kelembagaan (Kepastian hukum dan penegakan hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah, keuangan daerah), sosial politik (keamanan, sosial politik, budaya masyarakat), perekonomian daerah (potensi ekonomi, struktur ekonomi), tenaga kerja dan produktifitas



(ketersediaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja), dan infrastruktur fisik (ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas akses infrastruktur fisik). Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan berbagai kebijakan pemerintah seperti peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Investasi Kabupaten Banyumas**

No.	Indikator	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Penerbitan (tit Usaha Baru) Non Fasilitas	45	243	381	306	351
2.	Nilai Investasi /Aset (Rp) Non Fasilitas	1.577.680.000	103.675.402.000	181.124.454.759	159.338.703.000	321.336.155
3.	Nilai Investasi Fasilitas PMA/PMON:					
	1. PMA (US\$)	-	250.000,00	-	-	-
	2. PMON (Rp)	-	21.000.000.000	21.490.000.000	-	6.859.200.000
4.	Jumlah TK	612	2.392	3.984	3.992	5.835
5.	Penerbitan SIUP Baru & Perpanjangan					
	1. SIUP Besar	10	9	23	24	32
	2. SIUP Menengah	85	97	86	93	100
	3. SIUP Kecil	1.142	1.792	843	693	773
	Jumlah Penerbitan SIUP Baru dan Perpanjangan	1.237	1.898	952	810	905
6.	Penerbitan TDP Baru					
	1. PT	62	78	80	78	55
	2. CV	171	185	204	235	203
	3. Fa	0	1	0	0	0
	4. Koperasi	21	15	22	24	10
	5. Perseorangan	895	1.288	789	644	530
	6. Badan Usaha Lainnya	8	15	0	4	0
	Jumlah Penerbitan TDP Baru	1.157	1.582	1.095	985	798

Sumber: Badan Penanaman Modal Kab. Banyumas, 2008

Permasalahan umum yang berkaitan dengan investasi adalah masih rendahnya realisasi investasi, pemanfaatan dan pendayagunaan informasi potensi dan peluang investasi yang belum efektif, pelayanan penanaman modal di daerah masih belum dapat dilaksanakan secara efisien, cepat dan murah dan sarana

prasarana penunjang penanaman modal belum dapat disediakan secara maksimal.

## 7. Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien telah dibentuk Badan Penanaman Modal (BPM) Kabupaten Banyumas dan juga telah dikeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Pelayanan Publik. Ada 24 Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh BPM.

**Tabel 2.22.**  
**Jumlah Permohonan dan Jumlah SK Terbit Tahun 2004 - 2008**

No.	Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Permohonan	2.247	1.701	2.106	3.913	4.053
2.	Jumlah SK Terbit	2.061	1.660	2.026	3.763	3.850

Dilihat perkembangan jumlah permohonan dan SK terbit dari Tahun 2004 sampai dengan 2008 terdapat perkembangan yang positif, kecuali pada tahun 2004 dan 2005 yang menunjukkan penurunan jumlah permohonan dan jumlah SK terbit. Pada Tahun 2004 terdapat jumlah permohonan sebanyak 2.247 meningkat menjadi 4.053 pemohon pada Tahun 2008. Rata-rata kenaikan jumlah permohonan dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 adalah 22,22%. Sementara jumlah SK terbit Tahun 2004 sebanyak 2.061 meningkat menjadi 3.850 pada Tahun 2008 atau kenaikan rata-rata pertahun sebesar 22,66%. Permasalahan dalam pelayanan pemerintah daerah di bidang ekonomi adalah semakin banyaknya pemohon dan masih rendahnya kualitas



pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prima.

## 8. Perdagangan

Dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 15,12% pada Tahun 2008. Sub sektor perdagangan terdiri dari perusahaan dagang besar, perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil. Perusahaan dagang kecil merupakan perusahaan dagang dengan jumlah yang paling banyak, yaitu 94% dari total perusahaan dagang yang ada. Data Tahun 2003-2007 pada tabel 2.23 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan dagang di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya agar perusahaan khususnya perusahaan dagang kecil, dapat terus bertahan dan meningkat setiap tahunnya sehingga dapat menopang perekonomian rakyat.

**Tabel 2.23.**

**Banyaknya Perusahaan Perdagangan menurut Golongan Usaha**

No	Uraian	Tahun (unit)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Perusahaan Dagang Besar	74	90	90	90	114
2.	Perusahaan Dagang Menengah	756	923	970	970	1.063
3.	Perusahaan Dagang Kecil	10.470	12.638	17.920	17.920	18.613
Jumlah		11.300	13.651	18.980	18.980	19.790

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Beberapa permasalahan pokok pada bidang perdagangan adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan usahanya, kurangnya kesadaran pelaku dunia usaha terhadap perlindungan konsumen dan standarisasi barang dan jasa, terbatasnya jaringan informasi perdagangan dalam negeri maupun global dan belum optimalnya peran institusi pendukung dalam mekanisme distribusi barang dan jasa.

## 9. Koperasi dan UKM

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor pendukung keberhasilan dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari ketahanan dan keberadaan koperasi dan UKM pada saat krisis moneter beberapa tahun lalu yang cukup stabil. Pada saat banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Oleh sebab itu keberadaan koperasi dan UKM ini sangat dibutuhkan dalam menunjang ekonomi daerah. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan Koperasi dan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Koperasi dan UKM, disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling



menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (think globally and act locally) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan Koperasi dan UKM.

Banyaknya Koperasi berbadan hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007 adalah 456 unit koperasi dengan jumlah anggota 106.306 orang. Koperasi tersebut terdiri dari Koperasi Unit Desa sebanyak 25 unit dan Non Koperasi Unit Desa sebanyak 431 unit. Besarnya modal KUD adalah Rp.16.980.685 juta, sedangkan Non KUD memiliki modal sebesar Rp. 92.439.852 juta.

Dalam bidang UKM, data tahun 2004-2008 menunjukkan jumlah pengusaha yang terus meningkat, baik untuk pengusaha besar, menengah maupun kecil. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pengusaha besar.

**Tabel 2.24.**  
**Banyaknya Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Tahun 2004-2008 (orang)**

No.	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pengusaha Kecil	10.470	12.944	578.564	578.564	579.024
2.	Pengusaha Menengah	756	924	1.059	1.059	1.059
3.	Pengusaha Besar	74	98	105	105	105

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  
Kab. Banyumas, 2008*

Jumlah UKM di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari jumlah 11.226 unit pada tahun 2004, meningkat secara tajam mencapai jumlah 580.083 unit pada tahun 2008. Jumlah UKM dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1.025,80%. Peningkatan yang tertinggi adalah pada tahun 2005, dari 13.868 unit UKM pada tahun sebelumnya, menjadi 579.623 unit atau meningkat tajam sebesar 4.079,57%. Perkembangan jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini :

**Tabel 2.25.**  
**Jumlah Usaha Kecil Menengah Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Jumlah UKM (unit)
1.	2004	11.226
2.	2005	13.868
3.	2006	579.623
4.	2007	579.623
5.	2008	580.083

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  
Kab. Banyumas, 2008*

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM adalah rendahnya kualitas lembaga dan usaha, struktur permodalan, daya inovasi dan kreatifitas serta etos kerja dan profesionalisme, terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi, peluang pasar serta kurangnya kemitraan antar UKM, lemahnya jaringan usaha dan terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar lokal, nasional maupun internasional.



Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan dan belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Koperasi dan UKM.

#### 10. Industri

Sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar pada perekonomian di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2008 peranan sektor industri sebesar 16,33% dari total PDRB dengan laju pertumbuhan sekitar 12,49%. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 adalah sebanyak 39.549 unit, dengan rincian Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) mempunyai jumlah unit yang terbesar yaitu 34.985 unit atau 88,46%, Industri Kimia Anorganik (IKA) sebesar 2.571 unit dan Industri Logam, mesin dan elektronika (ILME) sebesar 1.997 unit. Dilihat dari perkembangannya, sektor industri mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun, baik dari jumlah unit yang terdaftar maupun dari penyerapan tenaga kerjanya, seperti tampak pada tabel 2.26 berikut:

**Tabel. 2.26.**  
**Banyaknya Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja**  
**Tahun 2004 - 2008**

	Tahun	Jumlah Terdaftar (unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	2004	39.620	93.675
2.	2005	41.176	97.731
3.	2006	39.547	91.170
4.	2007	39.548	91.245
5.	2008	39.549	91.330

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2008

Beberapa permasalahan pokok pada bidang industri adalah keterbatasan IKM terhadap akses pasar dan permodalan, lemahnya daya saing produk IKM di pasar, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan IKM, kurangnya kerjasama antara pengusaha kecil menengah dengan pengusaha besar dan belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri.

#### 11. Pariwisata

Sektor pariwisata perlu mendapatkan penanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankan karena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Sektor pariwisata secara ekonomis dapat meningkatkan perekonomian daerah karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, karena mempunyai sifat multiplier effect terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya. Sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2008 yaitu sebesar 16,76%. Potensi objek pariwisata memberikan harapan untuk dikembangkan, baik itu berupa wisata alam maupun wisata sejarah.



Sampai dengan saat ini terdapat 12 buah obyek wisata yang berada di Kabupaten Banyumas, yaitu Curug Cipendok, Telaga Sunyi, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Bumi Perkemahan Baturaden, Lokawisata Baturaden, Kalibacin, Wanawisata Baturaden, Curug Gede, Curug Ceheng, Museum Wayang Sendang Mas dan THR Pangsar Soedirman. Dilihat dari jumlah pengunjung, Obyek wisata Baturaden (Lokawisata Baturaden) merupakan tempat yang paling diminati wisatawan.

Pada tahun 2004 jumlah pengunjung Lokawisata di Kabupaten Banyumas mencapai 671.280 orang, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah pengunjung yang cukup besar, terutama pada tahun 2006 dimana penurunan jumlah pengunjung mencapai 20,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah pengunjung Lokawisata di Kabupaten Banyumas mulai mengalami peningkatan sebesar 1,28 % bahkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,40%.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah pengunjung obyek wisata di wilayah**  
**Kabupaten Banyumas**

	Obyek wisata	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Curug Cipendok	29,730	33,703	38,662	45,374	49,941
2.	Telaga Sunyi	3,144	3,237	2,745	3,425	2,611
3.	Pancuran Tiga	23,191	80,866	23,595	22,557	16,207
4.	Pancuran Tujuh	66,977	49,773	51,373	26,327	12,352
5.	BUPER Baturaden	2,590	1,659	1,563	1,518	2,323
6.	Lokawisata Baturaden	464,876	437,785	351,523	385,143	428,978
7.	Kalibacin	6,741	5,726	6,372	4,858	5,394
8.	Wanawisata Baturaden	52,023	46,773	46,587	27,086	14,706
9.	Curug Gede	1,602	7,540	7,679	16,133	25,218
10.	Curug Ceheng	14,490	14,763	8,717	8,537	10,827
11.	Museum Wayang SM	2,246	1,220	1,038	1,208	788
12.	THR Pangsar Soedirman	3,670	4,061	6,100	10,791	18,838
	<b>JUMLAH</b>	<b>671,280</b>	<b>687,106</b>	<b>545,954</b>	<b>552,957</b>	<b>588,183</b>
	Perubahan (dalam Persen)	7.56	2.35	-20.54	1.28	6.40

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas (diolah)

Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karena fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akan membuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal di lokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyak membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi PAD.

Permasalahan pariwisata di Kabupaten Banyumas adalah belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. Selain itu, masih terdapat beberapa obyek wisata yang keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat dan wisatawan baik wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara, karena promosi untuk menarik pengunjung dirasakan masih sangat kurang, tidak adanya kerjasama antar kabupaten di wilayah Barlingmascakeb dalam bidang kepariwisataan, perilaku pelaku kepariwisataan baik yang berasal dari sebagian masyarakat maupun aparatnya yang tidak proaktif.

## 12. Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian merupakan sektor penting yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 20,99% pada tahun 2008. Besarnya sumbangan sektor pertanian dimungkinkan oleh luasnya lahan pertanian yang ada. Disamping itu sektor pertanian memiliki backward dan forward linkages, sehingga aktivitas sektor pertanian mampu menumbuhkan sektor yang lainnya, misalnya aktivitas budidaya pertanian secara umum memerlukan pupuk, benih/bibit, tenaga kerja, obat-obatan, alat dan mesin



pertanian dan sebagainya; sedangkan pada saat/pasca panen memerlukan transportasi, tenaga kerja, alat dan mesin pengolah, packaging serta pemasaran, sehingga peningkatan aktivitas pertanian mampu menarik input dari sektor industri benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian serta tenaga kerja; output sektor pertanian digunakan sebagai input pada sektor industri pengolahan baik industri mikro, kecil, menengah maupun industri besar (misalnya penggilingan padi, lumbung desa modern, perusahaan makanan/minuman, pabrik gula, pabrik makanan ternak, industri krupuk/kripik dan sebagainya); produk pertanian juga mampu mengaktifkan perdagangan produk primer dan setengah jadi pada pedagang pengepul komoditas, pasar atau pusat perdagangan, serta menghidupkan restoran, warung dan pengusaha makanan perorangan. Dari uraian di atas sektor pertanian mampu menggerakkan multiplier effect yang sangat berperan dalam menghasilkan value added (nilai tambah) sehingga sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa komoditas dalam sektor pertanian ini antara lain adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau, beberapa tanaman sayuran seperti : Cabe, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, Tomat, Buncis dan lain-lain. Komoditas ini dianggap mempunyai nilai jual dan dapat dibudidayakan, volume produksi tinggi dan dapat diperkirakan nilai keuntungan produksi setiap tonnya. Berdasarkan kepada kondisi diatas maka diperlukan perhatian dari pemerintah kabupaten dalam hal peningkatan jumlah luas panen dan produksi dari tiap-tiap komoditas diatas dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana yang menunjang kepada peningkatan produksi komoditas tersebut seperti, irigasi, penyuluhan pertanian, dan sarana produksi lainnya.

Disamping itu terdapat kelemahan produk-produk pertanian diantaranya harga komoditas pertanian relatif labil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat produk yang mudah busuk, cepat rusak, ketersediaannya tergantung musim, tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya agar produk pertanian mempunyai nilai jual yang tinggi. Langkah tersebut diantaranya peningkatan kualitas produk, kejelasan harga produk, pemilihan lokasi dan saluran pemasaran yang strategis dan promosi produk ;

Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan atau meningkatkan produksi sebagai akibat penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian. Produktifitas Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seperti tertera pada Tabel 2.28 berikut :

**Tabel 2.28.**  
**Produktifitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya Tahun 2004 - 2008**

Produktifitas (ton/ha)	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Padi sawah	5.42	5.11	4.71	5.09	5.50
Padi Gogo	3.69	4.06	4.43	4.56	3.49
Jagung	7.11	5.54	6.42	7.04	4.90
Kedelai	0.78	0.79	1.38	0.74	1.35

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Banyumas, 2008

Padi merupakan komoditi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian, memiliki posisi yang sangat strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Tabel 2.29 memberikan gambaran tentang produksi padi di Kabupaten Banyumas.



Luas Panen, Produksi dan rata-rata produksi Padi sawah dan Padi Ladang dari tahun 2004 sampai dengan 2008 relatif menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan ketahanan pangan ini adalah tingginya ketergantungan konsumsi pada bahan pokok beras (padi), sementara kelancaran distribusi pangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan petani masih belum optimal. Dalam kaitannya dengan upaya mengurangi ketergantungan konsumsi pada padi (beras), maka perlu dilakukan upaya-upaya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Diversifikasi pangan dapat diukur dengan melihat Pola Pangan Harapan (PPH)

**Tabel 2.29.**

**Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Ratarata Produksi (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Ratarata Produksi (Ton/Ha)
1.	2004	63.348	343.035	5.42	4.080	15.060	3,69
2	2005	63.572	325.121	5.11	3.963	16.079	4,06
3.	2006	63.441	298.789	4.71	3.922	17.364	4,43
4.	2007	61.763	314.613	5.09	3.720	16.950	4,56
5.	2008	61.328	337.365	5.50	3.062	10688	3,49

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan adalah dengan melihat indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alat statistik untuk mengukur kemampuan daya tukar barang-barang hasil produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diharapkan adalah di atas 100 yang berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar. Pengukuran indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dilakukan pada tahun 2005 sebesar 100,13 dan meningkat menjadi 101,66 pada tahun 2006. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Bidang peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Sektor peternakan di Kabupaten Banyumas, dilihat dari jumlah populasi ternak besar (sapi potong dan perah) cenderung terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2007 terjadi penurunan sebanyak 3.177 ekor. Demikian juga untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) populasinya terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2007 populasi ternak kecil menurun sebanyak 82.102 ekor. Sedangkan untuk jenis unggas dan kelinci, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari jumlah populasi 6.202.963 ekor pada tahun 2004, naik menjadi 7.599.741 ekor pada tahun 2008. Peningkatan populasi unggas dan kelinci ini terjadi pada semua jenis populasi, baik pada ayam ras petelur, ayam pedaging, ayam kampung, itik, angsa, kelinci, entok maupun puyuh.



**Tabel 2.30.**  
**Banyaknya Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Kelinci (ekor)**  
**di Kabupaten Banyumas**

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Ternak Besar :					
	- Sapi Potong	18,210	18,245	18,360	15,311	17,233
	- Sapi Perah	1,920	2,023	1,637	1,509	1,104
	- Kerbau	3,250	3,560	3,110	3,156	3,206
	- Kuda	302	302	283	266	359
2.	Ternak Kecil :					
	- Kambing	224,945	284,407	257,835	182,703	192,952
	- Domba	19,570	24,700	23,682	16,664	19,513
	- Babi	3,600	4,865	5,115	5,163	7,668
3.	Unggas & kelinci :					
	- Ayam Ras Petelur	769,550	772,700	667,650	684,114	1,261,050
	- Ayam Ras Broiler	3,727,338	3,756,065	3,943,868	3,113,694	5,013,790
	- Ayam Kampung	1,377,456	1,374,695	1,177,860	1,169,210	1,016,614
	- Itik	169,492	177,589	130,500	113,872	139,607
	- Kelinci	8,041	8,055	8,069	5,617	5,763
	- Entok	75,625	103,249	132,773	93,898	69,537
	- Angsa	3,103	3,556	4,075	3,887	3,689
	- Puyuh	72,358	79,558	87,474	54,576	89,691

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008  
Dinas Peternakan dan Perikanan

Dalam upaya mencukupi kebutuhan konsumsi hewani, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat. Konsumsi protein hewani masyarakat masih cukup rendah sebesar 4,19 gr/kapita/hari masih jauh dari konsumsi minimal sebesar 6 gr/kapita/hari. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi daging, telur dan susu. Produksi daging,

telur dan susu masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan potensi wilayahnya, dengan produksi tahun 2008 sebagai berikut, produksi daging 14.161.811 kg, telur 14.161.811 kg dan susu 1.427.003 liter.

Pada sektor pertanian jenis komoditi potensial tanaman pangan unggulan Kabupaten Banyumas yang dapat dikembangkan adalah padi, mengingat Kabupaten Banyumas merupakan salah satu penyangga pangan nasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan komoditi potensial peternakan yang memiliki nilai produksi cukup besar adalah: Sapi, kambing dan ayam. Usaha penggemukan sapi potong, ayam ras pedaging dan petelur diharapkan dapat menjadi usaha yang potensial dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Beberapa permasalahan pokok pada sektor pertanian adalah adanya alih fungsi lahan, Produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang rendah. Masalah lain yang harus diatasi adalah penerapan teknologi yang masih rendah yang mampu diadopsi oleh masyarakat yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pemanfaatan teknologi dan hasil pertanian, masih kurangnya investasi di bidang agro industri, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian serta kredit dan infrastruktur pertanian.

Permasalahan umum peternakan berkaitan dengan lambatnya pertumbuhan populasi ternak dan kesehatan hewan ternak karena terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan.

### 13. Kehutanan

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya



(tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat atau lahan milik negara. Apabila pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, maka akan memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Jenis komoditi kehutanan yang memiliki nilai produksi terbesar di Kabupaten Banyumas adalah Kayu Rimba Pertukangan. Pada tahun 2007, produksi Kayu Rimba Pertukangan di Wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur sebanyak 7.540 m<sup>3</sup> dan di Wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat adalah sebesar 450 m<sup>3</sup>. Produksi kayu bulat dan kayu olahan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, seperti dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.31.**  
**Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun 2004 - 2008**

No	Tahun	Kayu bulat (m <sup>3</sup> )	Kayu Olahan (m <sup>3</sup> )
1.	2004	204.361,10	195.321,44
3.	2005	98.92,07	223.486,16
4.	2006	155.957,27	244.034,75
5.	2007	80.438,89	217.463,937
6.	2008	77.854,43	2.070.513,96

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyumas, 2007

Permasalahan yang dihadapi sub sektor kehutanan pada umumnya merupakan masalah lama dimana potensi hutan alam semakin menurun karena lemahnya pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati, sehingga hutan-hutan alam mengalami degradasi (penurunan baik luasan maupun kualitasnya) dan menambah luasan lahan kritis. Hancurnya sektor kehutanan telah berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial terutama masyarakat sekitar hutan yang masih banyak dalam kondisis para sejahtera. Hilangnya penghasilan masyarakat ini telah memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mudah tergiur dengan bujukan untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Penurunan luas hutan rakyat dari tahun ke tahun menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam sektor kehutanan. Luas hutan rakyat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Luas hutan rakyat menurun dari 10.237 Ha pada tahun 2007 menjadi 9.579 Ha pada tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya agar hutan rakyat dapat ditingkatkan luasnya pada waktu-waktu mendatang.

#### 14. Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan sektor pertanian. Pembangunan bidang perkebunan merupakan usaha yang penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dari berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan, Kelapa deres, jahe dan cengkeh merupakan komoditi yang cukup berpotensi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007. Kelapa deres digunakan untuk membuat gula merah dan pada tahun 2007 mampu mencapai produksi sebesar 49.608,53 ton gula merah. Komoditi jahe mencapai 34,20 ton rimpang jahe basah dan tanaman cengkeh menghasilkan 230,15 ton bunga kering.



Pembangunan perkebunan selain untuk fungsi ekonomi juga sekaligus berfungsi ekologis untuk menjaga ekosistem hutan dan kesuburan lahan.

Permasalahan dalam bidang perkebunan antara lain adalah kurangnya perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dibidang peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan serta pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan kecil (rakyat) dan perkebunan besar (swasta), kurangnya permodalan dan penguasaan teknologi perkebunan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengupayakan keberadaan usaha perkebunan sebagai sub sistim lingkungan hidup.

#### 15. Perikanan

Kabupaten Banyumas terletak pada posisi yang jauh dari pantai, sehingga Kabupaten Banyumas hanya memiliki sub sektor perikanan darat. Sub sektor perikanan darat ini meliputi kolam (kolam pendederan, kolam pembesaran, kolam pembenihan), mina padi, sungai dan cekdam. Produksi ikan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut :

**Tabel 2.32.**

**Produksi Ikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008**

	Keterangan	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
	Kolam, terdiri dari :					
	a. Kolam Pendederan (ekor)	-	-	-	-	-
	b. Kolam Pembesaran (kg)	2.660.137	3.091.762	3.168.029	3.336.444	4.109.368
	c. Kolam Pembenihan (ekor)	134.142.695	137.850.308	138.252.931	129.852.537	156.585.347
2.	Mina Padi (kg)	179.321	179.541	194030	152.038	148.827
3.	Sungai (kg)	1.138.416	1.105.28	1.154.394	668.558	678.875
4.	Cek Dam (kg)	2.750	2.785	2.785	2.785	2.829

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas

Berdasarkan Tabel 2.32 tersebut di atas dapat diketahui bahwa produksi perikanan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, dengan produksi terakhir tahun 2008 sebesar 4.939.899 kg. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan guna mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan aliran sungai dan perairan umum di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk memanfaatkan aliran sungai dan perairan umum dapat dilakukan dengan penebaran ikan di area tersebut. Penebaran ikan di perairan umum sampai dengan saat ini belum sesuai dengan harapan dengan rata-rata penebaran berkisar 300.000 s.d. 400.000 benih ikan pertahun. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan jumlah penebaran ikan di aliran sungai dan perairan umum dengan mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) sebagai sentra pembenihan ikan.

Permasalahan yang masih dihadapi pada sektor perikanan antara lain disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya modal dan kurangnya penyuluhan. Untuk peningkatan mutu pengolahan dan belum dimilikinya sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan perikanan yang efektif dan efisien dan kurangnya benih bersertifikat. Selain itu juga rendahnya teknik pengolahan produk-produk perikanan, masih adanya gangguan penyakit ikan, rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk-produk perikanan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati perairan umum.

#### 16. Pertambangan

Kabupaten Banyumas memiliki kekayaan bahan tambang yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung



kegiatan lain. Bahan galian yang memiliki kadar maupun jumlah sumber daya dan cadangan yang rendah umumnya kurang diminati oleh pelaku usaha pertambangan bersekala besar, oleh karena itu perlu upaya untuk dapat memanfaatkannya meskipun dengan penambangan skala kecil, hal ini dilakukan agar potensi bahan galian tersebut dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah maupun devisa negara. Kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan layak untuk dikembangkan dengan resiko kerusakan yang relatif kecil.

Usaha pertambangan di Banyumas pada umumnya kategori pertambangan rakyat atau dapat dikatakan sebagai pertambangan skala kecil. Pengusahaan bahan galian di wilayah ini meliputi kegiatan penambangan dan pengolahan bahkan sampai pemasaran. Adapun bahan galian yang diusahakan cukup beragam, seperti batugamping, andesit dan diorit, (istilah setempat batukali, batu gunung), pasir, batu lempung. Pendulangan emas dilakukan masyarakat sejak terjadinya krisis ekonomi hingga saat ini bahkan telah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di sekitar aliran Sungai Larangan dan Kali Arus. Masyarakat dalam mencari emas ini melakukan dengan cara penggalian pada endapan aluvial tua yang kemudian dilakukan pendulangan. Di Desa Gancang (Kali Arus), penambangan dilakukan dengan cara menggali pasir yang mengandung emas di dalam sumur-sumur berkedalaman 4-5 m dan diteruskan dengan pembuatan terowongan-terowongan, untuk mengeluarkan genangan air di dalamnya dibantu dengan menggunakan pompa. Selain itu, di bidang Pertambangan Kabupaten Banyumas memiliki hasil tambang berupa Phospat dan Granit serta Industri Pertambangan Kapur: produksi 15 ton perhari di Desa Darmakradenan.

Permasalahan pokok yang muncul adalah banyaknya kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, belum optimalnya pengelolaan kegiatan pertambangan masyarakat, belum tersedianya peta potensi pertambangan serta masih banyaknya persentase penambangan yang belum memiliki izin. Pada tahun 2005, persentase jumlah penambangan tidak berizin mencapai 86,61% dan pada tahun 2008 ini mengalami penurunan menjadi 59%. Untuk lebih menurunkan persentase penambangan tidak berizin, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi.

### C. Sosial Budaya Daerah

#### 1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas relatif rendah, terutama pada tahun 2005 dan 2006 dimana laju pertumbuhan penduduk berturut-turut hanya 0,456% dan 0,449%. Dari tabel 2.33 diketahui laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan angka yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2003 sebesar 1,029% atau bertambah 15.534 jiwa, tahun 2004 sebesar 0,878% atau bertambah 13.384 jiwa, tahun 2005 sebesar 0,456% atau bertambah 7.014 jiwa, tahun 2006 sebesar 0,449% atau bertambah 6.953 jiwa, dan tahun 2007 sebesar 1,230% atau bertambah 19.362 jiwa. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk selama lima tahun dari tahun 2003-2007 hanya sebesar 0,808%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas akan arti pentingnya program keluarga berencana dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik sehingga mempengaruhi usia perkawinan masyarakat yang bertambah dewasa.



**Tabel 2.33.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2002-2007**

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Laki-laki	753.138	761.151	767.988	771.075	775.056	785.007
2.	Perempuan	756.229	763.750	770.297	774.224	777.196	786.607
3.	Total	1.509.367	1.524.901	1.538.285	1.545.299	1.552.252	1.571.614
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk		15.534 (1,029%)	13.384 (0,878%)	7.014 (0,456%)	6.953 (0,449%)	19.362 (1,230%)

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 (diolah)

Gambaran sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Atas dasar data pada tabel 2.34, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, yaitu sebesar 10.694 dan yang terendah adalah Kecamatan Purwojati dengan angka kepadatan penduduk sebesar 3.444. Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat, karena penambahan infrastruktur yang tidak terencana dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari.

**Tabel 2.34.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2007**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Lumbir	48.473	4.847
2.	Wangon	72.438	6.037
3.	Jatilawang	56.761	5.160
4.	Rawalo	47.069	5.230
5.	Kebasen	57.658	4.805
6.	Kemranjen	65.726	4.382
7.	Sumpiuh	55.934	3.995
8.	Tambak	48.332	4.027
9.	Somagede	35.971	3.997
10.	Kalibagor	49.466	4.122
11.	Banyumas	47.414	3.951
12.	Patikraja	48.692	3.746
13.	Purwojati	34.444	3.444
14.	Ajibarang	88.110	5.874
15.	Gumelar	48.852	4.885
16.	Pekuncen	65.527	4.095
17.	Cilongok	113.161	5.658
18.	Karanglewas	54.409	4.185
19.	Kedungbanteng	52.352	3.739
20.	Baturaden	43.997	3.666
21.	Sumbang	71.243	3.750
22.	Kembaran	67.161	4.198
23.	Sokaraja	73.516	4.084
24.	Purwokerto Selatan	65.407	9.344
25.	Purwokerto Barat	51.236	7.319
26.	Purwokerto Timur	64.164	10.694
27.	Purwokerto Utara	44.111	6.302
<b>Jumlah</b>		<b>1.571.614</b>	

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 2.35. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten



Banyumas pada kelompok usia 0-14 tahun cukup tinggi. Pada tahun 2007, jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun adalah sebesar 438,538 jiwa (27,90%). Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 65 tahun keatas (lanjut usia) mempunyai persentase yang relatif kecil dibandingkan dengan kelompok usia produktif, yaitu hanya sebesar 100,888 jiwa atau 6,41%. Dari tabel 2.35 juga dapat diketahui rasio beban ketergantungan (dependency ratio). Pada tahun 2007 dependency ratio Kabupaten Banyumas adalah sebesar 52,26%, yang berarti setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung sekitar 50 orang yang dianggap belum produktif (usia di bawah 0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas).

**Tabel 2.35.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Berdasarkan kelompok Usia**

Tahun	Jumlah	Kelompok Usia			Beban Ketergantungan
	%	15 - 64	65 +		
2002	Jumlah		93.420		53,55
	%	28,68	65,13	6,19	
2003	Jumlah	390.505	1.023.900	110.496	48,93
	%	25,61	67,15	7,25	
2004	Jumlah	418.940	1.016.056	103.289	51,4
	%	27,23	66,05	6,71	
2005	Jumlah	416.745	1.026.748	101.806	50,5
	%	26,97	66,44	6,59	
2006	Jumlah	407.899	1.033.104	111.249	50,25
	%	26,28	66,56	7,17	
2007	Jumlah	438.538	1.032.188	100.888	52,26
	%	27,90	65,67	6,41	

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008 (diolah)

Permasalahan kependudukan dan catatan sipil umumnya adalah tingginya angka kepadatan penduduk dimana peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat seperti perluasan pengembangan wilayah perkotaan, karena beberapa

permasalahan perkotaan akan semakin bertambah besar, seperti; banjir, kesemrawutan pedagang kaki lima, kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu:

- (1) Rasio penduduk ber-KTP,
- (2) Rasio penduduk ber-KK dan
- (3) Rasio penduduk ber-Akte Kelahiran

**Tabel 2.36.**  
**Rasio Penduduk Ber KTP dan Ber Akte Kelahiran di Kabupaten Banyumas**

No.	Elemen Data	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Rasio penduduk ber - KTP	53,62 %	55,46 %	57,37 %	59,34 %	61,21%
2.	Rasio penduduk ber- Akte Kelahiran	28,30%	38,84%	26,10%	40,51%	39,08%

Sumber : Dindukcapil, 2009

Untuk rasio penduduk ber-KK tahun 2008 adalah 66,94 % dengan wajib KK sebanyak 458.019 KK dan penduduk yang sudah ber KK sebanyak 306.616 KK. Permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas adalah keterbatasan blangko KTP, KK dan akte kelahiran; dinamika jumlah penduduk (fluktuatif) sehingga menyulitkan pendataan administrasi kependudukan

## 2. Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator sosial yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan



suatu daerah. Secara nasional kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat masih cukup tinggi. Hal ini diakibatkan masih kurang jumlah sarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya.

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas masyarakat yang bersangkutan.

Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun capaian indikator tersebut menggunakan 2 indikator yaitu indikator kabupaten sehat dan indikator standar pelayanan minimal (SPM).

#### a. Indikator Kabupaten Sehat

Kondisi indikator utama kesehatan Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti persentase kunjungan ibu hamil (KIH), persalinan nakes, angka kematian ibu, angka kematian bayi, masalah gizi buruk dan angka kesakitan yang belum stabil pencapaiannya. Adapun data indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas dari tahun 2003-2008 sebagai berikut:

**Tabel 2.37.**  
**Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2003-2008**

No.	INDIKATOR DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	TAHUN					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	USIA HARAPAN HIDUP	69,2	69,2	69,4	69,5	69,5	69,6
2.	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)	107,81/100.000 KH	80,16 / 100.000 KH	126,96 / 100.000 KH	96,13 / 100.000 KH	145,81 / 100.000 KH	98,03 / 100.000 KH
3.	JUMLAH KEMATIAN IBU	29	21	32	26	41	27
4.	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)	8,03/1.000 KH	9,81 / 1.000 KH	2,46 / 1.000 KH	10,35/ 1.000 KH	9,6/ 1.000 KH	8,17/ 1.000 KH
5.	JUMLAH KEMATIAN BAYI	216	257	62	280	270	256
6.	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP		26.195	25.204	27.047	28.027	27540
7.	STATUS GIZI BALITA **)						
	- GIZI LEBIH		835	866	2.408	3.593	1.580
	- GIZI BAIK		25.661	26.509	79.191	109.090	59.002
	- GIZI KURANG		3.534	3.964	5.582	11.152	8.314
	- GIZI BURUK	72	342	42	62	48	133
8.	Kunjungan ke - 4 Bumil	84,04%	86,03%	80,96%	91,91%	93,52%	92,84%
9.	Persalinan Nakes	93,11%	85,59%	86,68%	96,50%	98,06%	94,53%
10.	ANGKA KESAKITAN						
	A. MALARIA						
	- Jumlah penderita Malaria	913	236	238	246	267	177
	- Angka Kesakitan Malaria (API)	0,62/1.000 penduduk	0,16/1.000 penduduk	0,16/1.000 penduduk	0,17/1.000 penduduk	0,18/1.000 penduduk	0,16/1.000 penduduk
	B. DBD						
	- Jumlah Penderita DBD	71	176	132	329	241	685
	- Angka Kesakitan DBD (IR)	5/100.000 penduduk	11/100.000 penduduk	9/100.000 penduduk	20/100.000 penduduk	15,52/100.000 penduduk	42,8/100.000 penduduk
	C. TB. PARU						
	- Jumlah Penderita TB.PARU	655	567	600	533	615	613
	- Angka Kesakitan TB PARU	43/100.000 penduduk	38/100.000 penduduk	39/100.000 penduduk	34/100.000 penduduk	39/100.000 penduduk	36/100.000 penduduk
	D. HIV	21	46	58	123	183	272
	E. PHEMONIA BALITA						
	- Jumlah Penderita Phemonia	7.154	4.586	3.830	4.371	3.053	3.694
	- Angka kesakitan Phemonia	474/100.000 penduduk	160/ 100.000 penduduk	249/ 100.000 penduduk	283/ 100.000 penduduk	121/ 100.000 penduduk	231/ 100.000 penduduk
	F. DIARE	24.269	29.061	32.997	30.941	20.959	24.979

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008



Berdasarkan tabel 2.37 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mortalitas (Angka Kematian)

a. Angka Kematian Ibu

Berdasarkan data tahun 2007 jumlah kematian ibu sebanyak 41 orang sedangkan pada tahun 2008 jumlah kematian ibu sebanyak 27 orang. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banyumas tahun 2007 sebesar 145,81 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2008 sebesar 98,03 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian AKI pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 47,78 per 100.000 kelahiran hidup.

Menurut Indikator Indonesia Sehat (IIS 2010) AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Indikator Kabupaten Sehat 2008 AKI sebesar 100/100.000 KH, jika dibandingkan nilai tersebut AKI di Kabupaten Banyumas masih dibawah target.

Permasalahan yang muncul sebagai penyebab lambatnya penurunan AKI dan AKB tersebut dapat disebabkan oleh ketrampilan tenaga kesehatan yang kurang dalam penanganan persalinan, adanya faktor keterlambatan (terlambat mengambil keputusan (T1), terlambat merujuk (T2) atau terlambat dalam penanganan di fasilitas kesehatan (T3), kondisi Ibu hamil dari segi ekonomi, pendidikan, status kesehatan ibu dan kondisi lingkungan. Kondisi yang demikian sudah mulai dilakukan perbaikan dengan menyusun perencanaan yang optimal melalui kegiatan penyuluhan kesehatan ibu kepada masyarakat dan peningkatan ketrampilan tenaga Kesehatan melalui pelatihan.

b. Angka Kematian Bayi

Pada Tahun 2008 di Kabupaten Banyumas jumlah kematian bayi sebanyak 256 dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 8,17 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2007 AKB sebesar 9,6 per 1.000 kelahiran hidup, berarti adanya penurunan jumlah kematian bayi pada tahun 2008 sebanyak 14 bayi atau 1,43 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target Indikator Kabupaten Banyumas 2008 dan Indikator Indonesia Sehat (IIS) 2010 maka AKB tersebut terhitung masih rendah (Target Kab. Banyumas 2008=10/1.000 KH dan IIS 2010= 40/1.000 KH).

2. Status Gizi

Kasus gizi buruk dari tahun 2003-2007 cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2008 terjadi peningkatan kasus gizi buruk sebesar 85 kasus dibandingkan jumlah kasus gizi buruk tahun 2007. Hal ini disebabkan kegiatan surveilans gizi masyarakat telah berjalan dengan optimal di puskesmas sehingga kasus gizi buruk yang ada di masyarakat dapat terpantau semuanya.

Walaupun status gizi buruk sudah tertangani namun ada beberapa permasalahan antara lain :

- Sebagian besar balita gizi buruk disebabkan oleh adanya penyakit penyerta bukan karena kekurangan pangan sehingga intervensi lebih ditekankan pada faktor penyebab.
- Masih kurangnya tingkat pengetahuan, ketrampilan serta kepedulian keluarga dalam penyelenggaraan makanan terutama mengenai pola konsumsi, pola asuh dan pemberian ASI.



Perlu diwaspadai juga jumlah kasus gizi lebih karena dari tahun 2003 sampai 2007 menunjukkan grafik peningkatan kasus. Sedangkan pada tahun 2008 telah mengalami penurunan sebanyak 2.013 kasus dibandingkan tahun 2007. Kasus gizi lebih berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang tinggi lemak, kolesterol dan karbohidrat dan kurang olahraga.

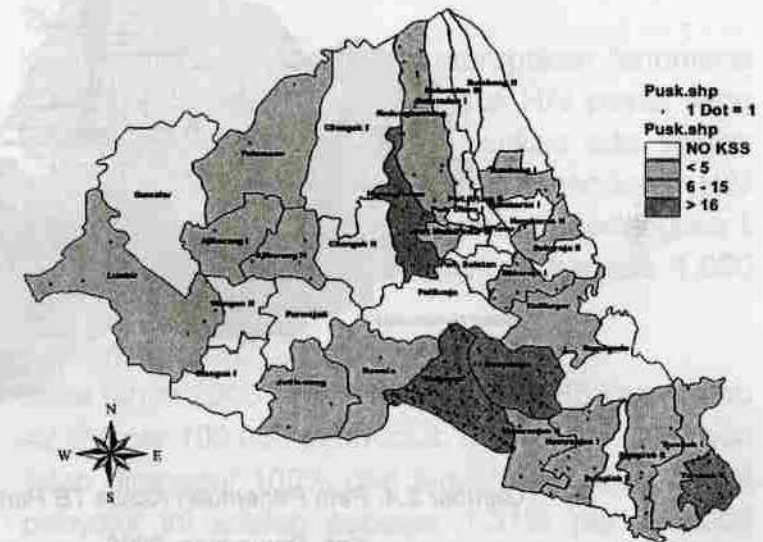
Dari hasil PSG tersebut belum dapat menggambarkan kondisi status gizi balita yang sesungguhnya di masyarakat karena kemungkinan masih banyak kasus gizi kurang dan gizi buruk yang belum terdeteksi, mengingat penemuan kasus ini dilakukan secara random sampling (acak). Disamping itu hasil pelaporan penimbangan rutin (F/III/Gizi) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penimbangan Balita di Posyandu relatif kurang (D/S = 75,01%).

### 3. Morbiditas (Angka Kesakitan)

#### a. Malaria

Tahun 2008 kasus penyakit Malaria klinis sebanyak 3.406 kasus dan positif sebesar 177 kasus dengan persentase sebesar 5,2% dan telah diobati 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007 maka dalam satu tahun kasus malaria mengalami kenaikan sebanyak 267 kasus. Tahun 2008 Desa MCI dan HCI tidak ada (Nol). Sedangkan desa yang masuk kategori LCI di tahun 2008 sebesar 331. Adapun API Kabupaten Banyumas Tahun 2008 adalah sebesar 0.16 per 1000 penduduk. Jumlah kasus Malaria Care Plasmodium Falciparum sebesar 34,4%,

Plasmodium Vivax sebesar 65,6% dan karena Plasmodium Mix tidak ada (Nol). Sedangkan jumlah penyakit Malaria berdasarkan asalnya sebagai berikut. Import sebesar 56,8%, Indigenus sebesar 33,6%, dan kambuh sebesar 9,6%. Jika dibandingkan dengan target IIS 2010 sebesar < 5 per 1.000 penduduk dan Indikator Kab. Banyumas 2008 sebesar 43 per 1.000 penduduk maka angka kesakitan Malaria di Kab. Banyumas masih rendah. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan surveilans (Active Case Detection/ACD), aktifnya petugas Juru Malaria Desa (JMD) dalam penemuan penderita dan kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri sudah cukup baik. Besarnya API per Puskesmas di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar 2.3. sebagai berikut :



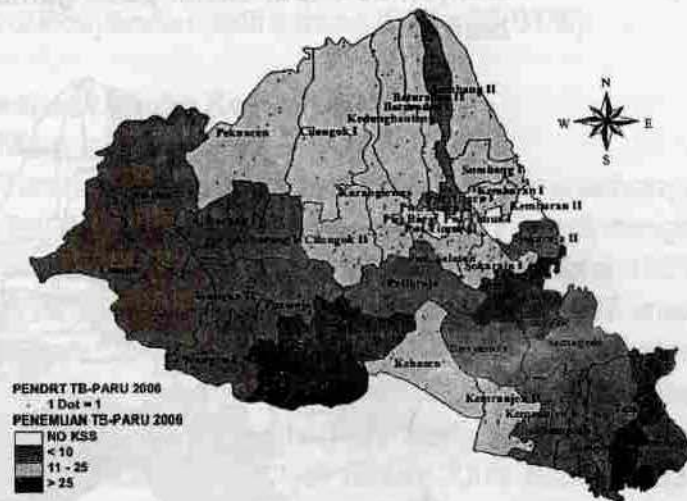
Gambar 2.3. Peta Penyebaran API per Puskesmas, 2008



**b. TB Paru**

Jumlah populasi kasus TB Paru positif tahun 2008 sebanyak 1.704 kasus dengan BTA positif sebanyak 613 kasus atau CDR (Case Detection Rate) BTA positif sebesar 36 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2 kasus. Jika dibandingkan dengan target Kabupaten Banyumas 2008 sebesar 39 per 100.000 penduduk, maka angka kesakitan TB paru Kab. Banyumas 2008 masih di bawah target.

Target penemuan tahun 2008 sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan target IIS 2010 sebesar > 85% maka tingkat kesembuhan TB Paru di Kabupaten Banyumas sudah memenuhi target.



Gambar 2.4. Peta Penemuan Kasus TB Paru di Kab. Banyumas, 2008

**c. HIV**

Tahun 2007 secara kumulatif penderita HIV yang terdeteksi sebanyak 183 penderita, dengan rincian 123 terdeteksi melalui klinik VCT yang berada di Rumah Sakit Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto dan RSUD Banyumas sedangkan sebanyak 60 kasus ditemukan dari hasil Sero Survey. Penderita AIDS yang ditemukan di Kabupaten Banyumas sebanyak 50 orang dan yang telah meninggal sebanyak 27 orang.

Jumlah kasus HIV-AIDS sampai Desember 2008 secara kumulatif sebanyak 272 kasus dengan rincian dari serosurvey 64 kasus dan dari klinik VCT 208 kasus. Penderita AIDS sebanyak 70 penderita, jumlah penderita meninggal sebanyak 36 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, maka terjadi peningkatan kasus sejumlah 89 kasus pada tahun 2008.

Kasus HIV yang ditemukan merupakan fenomena gunung es artinya dari 272 kasus HIV positif yang telah terdeteksi masih dimungkinkan ada sekitar 2.720 kasus (proporsi penularan 1 penderita HIV dapat menularkan kepada 100 orang). Sedangkan 1 penderita AIDS dapat menularkan kepada 1.000 orang.

**d. Demam Berdarah Dengue**

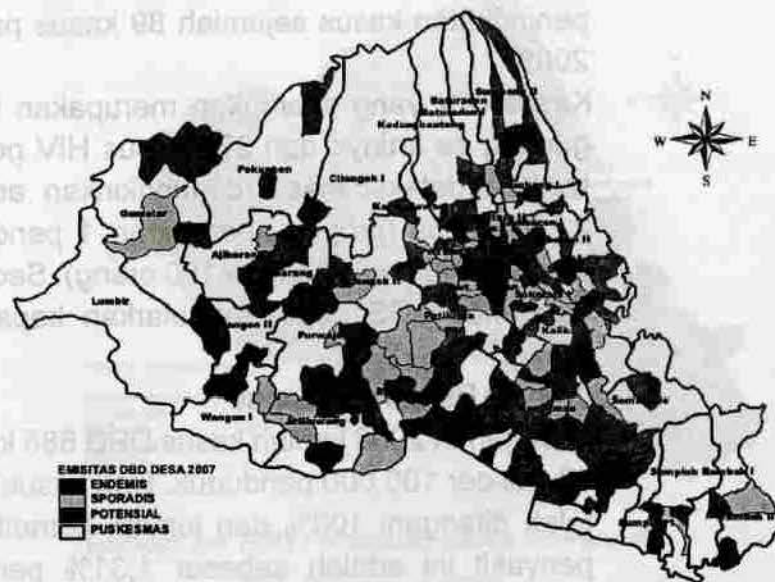
Pada tahun 2008 jumlah kasus DBD 685 kasus atau 42,8% per 100.000 penduduk. Dari kasus yang ada telah ditangani 100% dan jumlah kematian akibat penyakit ini adalah sebesar 1,31% per 100.000 penduduk.



Jumlah penderita DBD pada tahun 2007 sebanyak 241 jiwa (angka kesakitan DBD sebesar 15.52 per 100.000 penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa angka kesakitan DBD di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan 444 kasus. Bila dibandingkan dengan target IIS 2010 sebesar < 20 per 100.000 penduduk dan target Kabupaten Banyumas 2008 sebesar 11/100.000 penduduk, angka kesakitan DBD di Kabupaten Banyumas sangat tinggi.

Angka kematian DBD (Case Fatality Rate) mengalami peningkatan dari 0,83% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada tahun 2008. Dibandingkan dengan IIS 2010 dimana indikator angka kematian DBD sebesar < 1% berarti kondisi di Kabupaten Banyumas kurang baik.

Penyebaran endemisitas DBD Per Desa/Kelurahan di Kab. Banyumas tahun 2008 dapat dilihat pada gambar 2.5



Gambar 2.5. Peta Endemisitas DBD Desa/Kelurahan Kab. Banyumas Tahun 2008

#### e. ISPA/Pneumonia

Kasus pneumonia balita tahun 2007 sebanyak 3.053 dengan angka kesakitan 121 per 100.000 penduduk dan tahun 2008 sebanyak 3.694 anak balita dengan angka kesakitan 231 per 100.000 penduduk. Dengan demikian terjadi peningkatan kasus pada tahun 2008 sebesar 641 kasus ISPA/pneumonia.

#### f. Diare

Jumlah penderita Diare 20.959 jiwa pada tahun 2007 dan 24.979 jiwa pada tahun 2008. Dengan demikian terjadi peningkatan kasus sebesar 4.020 pada 2008.

#### g. Flu Burung (Avian Influenza)

Avian Influenza merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A (H5N1), yang ditularkan oleh unggas dan dapat menyerang manusia. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sudah melakukan kegiatan pemantauan penyakit ini sejak tahun 2006, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pada tahun 2006, sudah ditemukan kasus flu burung pada hewan namun pada manusia belum ada. Pemantauan dilakukan pada setiap kejadian kasus di peternakan. Jika pada pemeriksaan hewan unggas terbukti positif virus H5N1, kemudian dilakukan pemantauan selama 10 hari di sekitar wilayah peternakan tersebut dengan sasaran manusia dan hewan unggas. Jika ditemukan kasus suspect maka dilakukan pengobatan dan rujukan ke RS. Kasus suspect adalah seseorang dengan gejala demam / panas  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , disertai satu atau lebih gejala.



Sampai saat ini, secara epidemiologis belum terbukti adanya penularan efektif dari manusia ke manusia, namun dengan semakin banyaknya kasus cluster terjadi, maka kecenderungan penularan antar manusia harus diwaspadai.

Pada tahun 2007 ditemukan 17 kasus flu burung positif pada unggas, meliputi 16 kecamatan dan 25 desa, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.38.**

**Daftar Kecamatan / Desa dengan Unggas Positif A1 (Rapid Test Positif) Kabupaten Banyumas 2007**

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	Sokaraja	Sokaraja Wetan
2.	Purwokerto Utara	Grendeng
		Purwanegara
		Kober
3.	Purwokerto Timur	Mersi
4.	Purwokerto Selatan	Tanjung
5.	Kalibagor	Petir
		Kalipucar Lor
6.	Purwokerto Selatan	Berkoh
7.	Kebasen	Kalisalak
8.	Purwokerto Barat	Rejasari
9.	Karanglewass	Karangkemiri
10.	Sokaraja	Kedaung
11.	Banyumas	Kedunguter
		Binangun
12.	Baturaden	Purwosari
		Ketenger
13.	Sumbang	Sikapat
		Tambaksogra
		Kotayasa
14.	Jatilawang	Adisara
15.	Kemranjen	Petarangan
		Kecila
16.	Kembaran	Tambaksari Kidul

Sedangkan pada tahun 2008, ditemukan 17 kasus flu burung positif pada unggas, meliputi 13 kecamatan dan 17 desa seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.39.**

**Daftar Kecamatan / Desa dengan Unggas Positif A1 Kabupaten Banyumas Tahun 2008**

No.	Tanggal	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Hasil Rapid	Jumlah Kematian	Fucal Cully
1.	19-1-08	Wangon	Pengadegan	Positif	1000 ekor	2 ekor
2.	11-02-08	Kalibagor	Kalibagor	Positif	13 ekor	4 ekor
3.	22-2-08	Purwokerto Selatan	Karangklesem	Positif	21 ekor	1 ekor
4.	23-2-08	Sumpiuh	Selandaka	Positif	6 ekor	
5.	12-3-08	Banyumas	Kalisube	Positif	60 ekor	
6.	19-3-08	Banyumas	Kejawar	Positif	48 ekor	
7.	29-3-08	Sumpiuh	Karanggedang	Positif	29 ekor	
8.	2-4-08	Cilongok	Karanglo	Positif	13 ekor	36 ekor
9.	10-4-08	Sokaraja	Sokaraja Kulon	Positif	7 ekor	
10.	14-4-08	Kalibagor	Kaliori	Positif	26 ekor	
11.	21-4-08	Kedungbanteng	Karangsalam kidul	Positif	11 ekor	
12.	22-5-08	Tambak	Gumelar Lor	Positif	32 ekor	
13.	5-6-08	Banyumas	Kedunggede	Positif	50 ekor	
14.	20-6-08	Somagede	Tambak	Positif	26 ekor	
15.	14-7-08	Ajibarang	Kracak	Positif	21 ekor	13 ekor
16.	18-7-08	Banyumas	Kalisube	Positif	35 ekor	
17.	10-8-08	Kalibagor	Kaliori	Positif	50 ekor	2 ekor

Kegiatan pemantauan tetap berjalan walaupun belum ditemukan kasus AI positif pada manusia. Terdiri dari penyuluhan, pencarian penderita, pengobatan, rujukan dan pelaporan. Tahun 2009 kegiatan pemantauan AI mulai berjalan efektif, dimana jika ditemukan unggas positif AI langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan sehingga lebih cepat ditangani. Pada tahun ini jumlah kasus AI yang positif sampai dengan bulan September 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 dan 2008. Penyebaran virus flu burung di daerah terjangkau sesungguhnya dapat dicegah dengan menghindari kontak kontak dengan unggas kecuali dalam keadaan terpaksa, melakukan cuci tangan pakai sabun, penanganan yang



tepat terhadap unggas yang dicurigai flu burung, dekontaminasi kebun dan kandang ayam serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### h. Flu Babi

Flu babi merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A (H1N1), yang ditularkan oleh babi dan dapat menyerang manusia. Program pengendalian penyakit flu babi sama dengan pengendalian penyakit flu burung, meliputi: penyuluhan, pencarian penderita, pengobatan, rujukan dan pelaporan. Pemantauan diprioritaskan bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri yang merupakan negara endemis Flu Babi. Jika ada yang positif flu babi, maka dilakukan pemantauan 10 hari. Pada tahun 2009, jumlah tersangka flu babi 1 orang tapi sesudah diperiksa hasilnya negatif.

Dari hasil PE ternyata tersangka adalah seorang pelajar yang melakukan pertukaran pelajar ke Amerika, berasal dari Kelurahan Grendeng. Adapun sebelum tahun 2009, belum ditemukan kasus flu babi.

**Tabel 2.40.**  
**Data penyelidikan epidemiologi kasus Flu Babi (H1N1)**  
**Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2009**

No.	Tahun	Jumlah Suspect Flu Babi	Desa / Kelurahan	Hasil
1.	2008	0	-	-
2.	2009	1	Grendeng	Negatif Flu Babi

#### i. Chikungunya

Chikungunya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya yang tidak menyebabkan kematian dan diikuti dengan adanya imunitas didalam tubuh penderita dengan gejala utama yaitu demam mendadak, nyeri pada persendian dan ruam nyeri pada

persendian dan ruam makulopapuler (kumpulan bintik-bintik kemerahan) pada kulit yang kadang-kadang disertai dengan gatal.

Penularan demam chikungunya terjadi apabila penderita yang sakit (dalam keadaan viremia) digigit oleh nyamuk penular *Aedes aegypti*, kemudian menggigit orang lain. Biasanya penularan terjadi dalam satu rumah, tetangga dan dengan cepat menyebar ke satu wilayah (RT/RW/Dusun/Desa).

Untuk memutus mata rantai penularan kasus-nyamuk-orang perlu dilakukan tindakan sama dengan upaya pemberantasan KLB DBD yaitu pelacakan kasus, penyuluhan PHBS, gerakan PSN, pemberian larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, perlindungan diri menggunakan repellant, isolasi penderita agar tidak digigit nyamuk, fogging dan pengobatan.

Data kasus suspect chikungunya Kabupaten Banyumas sampai dengan bulan Nopember 2009 seperti dalam tabel 2.41 :

**Tabel 2.41.**  
**Data kasus suspect Chikungunya Kabupaten Banyumas**  
**Bulan Januari s.d. Nopember 2009**

Bulan	Jumlah	Desa	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
Januari	20	Bogangin	Sumpiuh	163	
	2	Banjarpanepen	Sumpiuh		Fogging
	65	Kr.salam	Kemranjen		
	76	Tangeran	Somagede		Fogging
Februari	52	Bogangin	Sumpiuh	98	Fogging
	46	Banjarpanepen	Sumpiuh		
Maret	1	Banjarsari kidul	Sokaraja	1	
April	39	Kejawar	Banyumas	213	
	164	Tambaksari	Kembaran		
Mei	4	Kebokuro	Sumpiuh	14	
	10	Watuagung			
Juni	146	Ketanda	Sumpiuh	146	
Juli	21	Mersi	Pwt Timur	21	



Bulan	Jumlah	Desa	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
Agustus	0				
September	0				
Oktober	19	Pageraji	Cilongok	19	
November	10	Cilongok	Cilongok	10	
	7	Tanjung	Pwt Selatan	7	
	30	Cilongok	Cilongok	47	
Desember					
Total : 692					

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penderita kasus chikungunya mengalami peningkatan kasus, dari 42 kasus pada tahun 2008 menjadi 692 kasus tahun 2009. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian karena dimungkinkan pada tahun-tahun mendatang chikungunya cenderung mengalami peningkatan kasus.

#### j. Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 terdiri dari : Diabetes Mellitus, Penyakit Syaraf, Penyakit Jantung dan Pembuluh darah, Neoplasma (Tumor), Gangguan Mental dan Perilaku, Glaukoma, Katarak, Gangguan fungsi Hati, Gangguan fungsi Ginjal, Gangguan Prostat. Kasus terbanyak yang dilaporkan dari Puskesmas maupun Rumah Sakit adalah Penyakit Jantung dan Pembuluh darah 19.469 kasus dan terbanyak dari golongan ini adalah Hipertensi sebanyak 16.694 atau 85,74 %. Banyaknya kasus penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan pola makan.

#### 4. Pengembangan Lingkungan Sehat

##### a. Sarana Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Sarana pengolahan air limbah (SPAL) rumah tangga merupakan bagian dari rumah sehat. Berdasarkan Kepmenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan disebutkan bahwa limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Sehubungan dengan hal tersebut SPAL merupakan bagian dalam pembangunan yang harus diperhatikan karena dapat mencemari lingkungan baik tanah maupun air yang dapat berdampak sebagai media penularan penyakit. Cakupan SPAL di Kabupaten Banyumas tahun 2007 adalah 35 % dan pada tahun 2008 menjadi 45%. Kenaikan cakupan SPAL rumah tangga dikarenakan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah, pemberian stimulant material SPAL, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga.

##### b. Jamban Keluarga

Jamban keluarga pada dasarnya kebutuhan dasar setiap rumah tangga. Sampai tahun 2008 jumlah sarana 955330 dan pada tahun 2007 sebanyak 188419 kenaikan 19%. Kenaikan jamban tersebut adanya intervensi kegiatan dari Program Pamsimas yaitu adanya sanitasi total berbasis masyarakat dan CLTS yaitu kegiatan penyadaran kepada masyarakat terhadap kebutuhan Jaga tanpa bantuan dari pemerintah dan dilakukan oleh



masyarakat sendiri dengan bimbingan tenaga fasilitator. Selain itu adanya program PNPM intervensinya terhadap sanitasi khususnya jamban keluarga. Dengan adanya intervensi dari berbagai pihak maka cakupan jamban akan meningkat dan Stop BABS bisa dilaksanakan.

c. Rumah sehat

Rumah sehat di Kab. Banyumas pada tahun 2007 sebanyak 276.109 rumah dari jumlah KK sebanyak 431.421 sehingga cakupan rumah sebanyak 64% dan pada tahun 2008 Jumlah KK 448.677 dan jumlah rumah sebanyak 314.073 atau 66%. Kegiatan rumah sehat dilaksanakan dengan penyuluhan tentang pentingnya rumah sehat dan pengaruhnya lingkungan pemukiman terhadap kesehatan yang berpengaruh terhadap penyakit kulit, ISPA, TBC dan lainnya. Kegiatan yang dapat mendorong upaya penyehatan rumah sehat adalah; adanya peningkatan peran masyarakat seperti PKK, dasa wisma dan lembaga yang ada di desa dan didukung dengan adanya Desa siaga dan program lain. PNPM mandiri mendominasi kegiatan pembangunan rumah sehat dengan adanya pugar rumah dan kegiatan lain dari Pemerintah.

d. Tempat-tempat Umum (TTU)

Tempat umum yang meliputi hotel, rumah makan, restoran, pasar dan tempat umum lainnya tahun 2007 sebanyak 3.354 dan pada Tahun 2008 sebanyak 3.384 jumlah yang diperiksa adalah 1.387 dan yang memenuhi syarat atau laik sehat sebanyak 962 sehingga yang sehat sekitar 69,36%. Sanitasi TTU adanya kegiatan klasifikasi hygiene sanitasi RM dan restoran.

Banyaknya TTU yang ada dengan jumlah tenaga dan anggaran kegiatan yang terbatas menjadikan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan ke TTU.

e. Institusi Yang Dibina

Institusi yang dibina di Kabupaten Banyumas sebanyak 7.200 institusi, yang dibina sebanyak 4.338 institusi atau sekitar 60%. Sarana institusi meliputi sarana kesehatan, sarana ibadah, perkantoran dan sarana lain.

Pembinaan terhadap sarana Institusi tersebut dilaksanakan oleh petugas sanitarian Kabupaten dan puskesmas, keterbatasan kegiatan yang ada menjadikan hambatan dalam pemantauan terhadap institusi.

f. Air Bersih

Jumlah sarana air bersih meliputi Ledeng PDAM, SPT, SGL, PAH dan lainnya adalah 91.457 buah. Sedangkan akses terhadap air bersih adalah 67,96%. Tahun 2013 diharapkan dapat mencapai 80% masyarakat dapat mengakses air bersih. Program penyediaan air bersih berasal dari pemberian stimulan material sarana air bersih, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan air bersih, didukung dengan adanya Desa siaga, PNPM mandiri, Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

**5. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)**

Program Pencegahan Penanggulangan dan Penyalahgunaan NAPZA, program penanggulangan Napza yang dilakukan Dinkes berupa kegiatan preventif yaitu penyuluhan.



Sasaran kegiatan penyuluhan, pencegahan, penanggulangan dan penyalahgunaan Napza tidak hanya sekolah dan madrasah saja melainkan juga masyarakat umum, karang taruna, tokoh masyarakat, LSM dan para pengambil keputusan. Penyuluhan Napza tahun 2007 sebanyak 457 kali (6,7%) dari jumlah seluruh kegiatan penyuluhan yang berjumlah 6.815 kali. Sedangkan penyuluhan Napza Tahun 2008 sebesar 524 kali (17,23%) dibandingkan jumlah seluruh kegiatan penyuluhan sebesar 3.041 kali. Bila dibandingkan tahun 2007, terjadi peningkatan jumlah penyuluhan sebesar 67 kali. Walaupun terjadi peningkatan, tetapi kegiatan penyuluhan Napza harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi karena bila dibandingkan target SPM Tahun 2008-2013 untuk upaya penyuluhan P3 Napza/P3 Narkoba oleh petugas kesehatan adalah 30%, berarti jumlah kegiatan penyuluhan P3 Napza di Kabupaten Banyumas sampai tahun 2008 masih jauh di bawah target SPM. Oleh karena itu untuk tahun 2009 sampai dengan 2013 jumlah kegiatan penyuluhan P3 Napza akan lebih ditingkatkan lagi. Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan jumlah penyuluhan P3 Napza adalah :

- 1) Kecenderungan peningkatan jumlah pengguna Napza
- 2) Semakin kompleksnya permasalahan sosial yang diawali dengan kebiasaan merokok dini
- 3) Kecenderungan meningkatnya pergaulan bebas  
Semakin gencarnya iklan dan kegiatan yang disponsori oleh perusahaan rokok, yang memicu kepada penyalahgunaan napza.

#### b. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari salah satu indikator keberhasilannya, yaitu kualitas pelayanan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu sarana kesehatan dan sumber daya aparatur kesehatan. Dua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu dalam rangka menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten selalu berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Pemerintah kabupaten juga senantiasa tanggap terhadap permasalahan yang ada sehingga mengutamakan pelayanan dan kedekatan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas memantapkan keberadaan puskesmas, revitalisasi posyandu serta pengembangan badan Layanan Umum Kesehatan.

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana kesehatan, seperti tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.42.**  
**Perkembangan sarana Kesehatan tahun 2004-2008**

No.	Jenis Fasilitas	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Rumah Sakit	10	10	15	15	15
2.	Rumah Sakit Bersalin	2	4	3	3	3
3.	Klinik Bersalin	5	12	14	14	17
4.	Puskesmas	39	39	39	39	39
5.	Puskesmas Pembantu	39	39	39	39	39
6.	Poli/BP	39	54	57	57	60
7.	Klinik/Praktek Dokter	221	133	345	345	347

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008



Kabupaten Banyumas dalam usahanya mendukung tercapainya Indonesia Sehat 2010 senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Adapun rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 menurut jenis profesinya sebagai berikut:

**Tabel 2.43.**

**Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008**

No.	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Target IIS per 100.000 penduduk
1.	Dokter Umum	156	9,93	40
2.	Dokter Spesialis	100	6,36	6
3.	Dokter Gigi	47	2,99	11
4.	Farmasi	83	5,28	10
5.	Bidan	546	34,74	100
6.	Perawat	788	50,14	117,5
7.	Ahli Gizi	35	2,23	22
8.	Sanitasi	69	4,39	40
9.	Kesehatan Masyarakat	44	2,8	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio tenaga kesehatan yang ada masih dibawah target IIS 2010, kecuali profesi Dokter Spesialis. Dengan demikian masih dibutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup banyak agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas dapat meningkat secara kuantitas maupun kualitasnya. Informasi berkaitan dengan kesehatan juga dapat diketahui dengan melihat ratio dokter per 100.000 penduduk seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.44.**  
**Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk**  
**Tahun 2004 – 2008**

No.	Tahun	Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk
1.	2004	11,25
2.	2005	17,36
3.	2006	10,29
4.	2007	10,24
5.	2008	9,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk selama enam tahun cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2005. Menurunnya rasio dokter ini sebaiknya mendapat perhatian dari pemerintah, agar kesehatan masyarakat tetap dapat terus ditingkatkan.

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada SK Menkes RI Nomor: 1457/Menkes/SK/IX/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

a) Pelayanan K-4

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 sebanyak 27.837 ibu hamil, adapun ibu hamil yang mendapat pelayanan K-4 adalah sebesar 25.844 atau 92,84% Ibu hamil. Dibandingkan tahun 2007 yang mendapatkan pelayanan K-4 sejumlah 27.756 ibu hamil atau sebesar 93,52%. Berarti pelayanan K-4 mengalami penurunan sebesar 0,68%.



Pada prinsipnya kegiatan-kegiatan dalam rangka pelayanan K-4 sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang tersebar di semua kecamatan, hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pada waktu hamil semakin baik.

Standar Pelayanan Minimal untuk cakupan kunjungan ibu hamil K-4 2008 sebesar 93,5%. Dengan demikian untuk Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi SPM yang diharapkan.

b) Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)

Jumlah ibu melahirkan tahun 2008 yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) sebesar 94,53%. Dibandingkan tahun 2007 jumlah persalinan yang ditolong Nakes sebesar 98,06 %, berarti pelayanan persalinan oleh Nakes menurun sebesar 3,53%.

Target Standar Pelayanan Minimal untuk pertolongan persalinan oleh nakes tahun 2008 sebesar 90%. Dengan demikian cakupan persalinan nakes Kabupaten Banyumas tahun 2008 sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

Namun demikian kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian SPM tersebut masih tetap dilaksanakan untuk lebih meningkatkan cakupan antara lain pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di daerah-daerah yang terisolir, pemerataan penempatan tenaga bidan di desa, penyuluhan persalinan/sosialisasi persalinan sehat dan aman dan peningkatan ketrampilan tenaga bidan tentang Asuhan Persalinan Normal (APN).

c) Bumil Risti dirujuk

Jumlah Ibu hamil resiko tinggi (risti) tahun 2008 sebanyak 9.189 orang atau sebesar 33,36%. Sedangkan jumlah ibu hamil risti yang dirujuk sebanyak 3.665 orang. Dibandingkan jumlah bumil risti tahun 2007 sebanyak 4.671 orang (30,87%) maka terjadi kenaikan sebesar 4.618 kasus bumil risti dan seluruh kasus bumil resti tahun 2008 dirujuk baik ke RS/Puskesmas/Tenaga Kesehatan.

d) Neonatus

Jumlah Neonatus tahun 2008 sebanyak 27.047 jiwa dengan kunjungan neonatus sebanyak 26.994 jiwa atau 98,90%. Target SPM tahun 2008 untuk kunjungan neonatus adalah 90%. Kunjungan neonatus di Kabupaten Banyumas sudah sesuai target SPM Kabupaten.

e) Bayi dan Bayi BBLR

Jumlah bayi lahir pada tahun 2008 sebanyak 27.540, yang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 608 bayi atau sebesar 2,20% dari bayi yang lahir. Bayi BBLR yang ditangani sebanyak 608 atau 100%.

Jumlah bayi tahun 2007 sebanyak 28.027 bayi. Jumlah bayi BBLR sebanyak 869 bayi atau sebesar 3,17% dari bayi yang lahir; atau turun sebesar 0,97%. Target SPM tahun 2008 untuk penanganan kasus BBLR adalah 100%. Penanganan kasus BBLR di Kabupaten Banyumas sudah sesuai target SPM Kabupaten.

2. Pelayanan Imunisasi

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas sebanyak 331 desa/kelurahan.



Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2008 sebanyak 308 desa / kelurahan atau 93,1%. Dibandingkan tahun 2007 Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebanyak 311 atau 93,96 %, berarti terjadi penurunan 0,86%. Target Standar Pelayanan Minimal untuk desa/kelurahan UCI tahun 2008 sebesar 95%. Dengan demikian Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 belum memenuhi target SPM tersebut.

### 3. Pelayanan Pengobatan/Perawatan

Jumlah kunjungan baru rawat jalan yang dihimpun dari data Kesehatan Puskesmas dan data Kesehatan Rumah Sakit tahun 2008 sebesar 226.993 atau 14,4% dari jumlah penduduk. Jumlah kunjungan pasien rawat inap sebanyak 48.297 pasien atau 0,3% dari jumlah penduduk. Target kunjungan rawat jalan berdasarkan Indonesia Sehat 2010 sebesar 15% dengan demikian penggunaan fasilitas kesehatan rawat jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 belum memenuhi target. Untuk pemanfaatan fasilitas kesehatan rawat inap di Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 sebesar 1,5% maka masyarakat Banyumas dalam pemanfaatan fasilitas rawat inap juga belum memenuhi target.

### 4. Pemantauan Pertumbuhan Balita

Berdasarkan laporan bulanan penimbangan balita (F/III/Gizi) selama Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Jumlah seluruh balita (S) = 123.489 anak
- Jumlah balita yang ditimbang (D) = 92.722 anak
- Jumlah balita yang naik berat badannya (N) = 64.197 anak

Berdasarkan data di atas, maka tingkat partisipasi masyarakat (D/S) = 75,01 %. Efek penyuluhan (N/D) = 69,23 %. Tingkat partisipasi masyarakat dan efek penyuluhan bila dibandingkan dengan SPM masih di bawah standar. Hal ini disebabkan anak setelah mencapai usia > 3 tahun enggan ditimbang dan usianya sudah masuk TK/play group.

Upaya yang ditempuh antara lain meningkatkan penyuluhan, meningkatkan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa untuk memotivasi masyarakat sehingga meningkatkan peran serta masyarakat.

Kasus gizi buruk yang dilaporkan oleh Puskesmas sebanyak 133 anak. Kasus gizi buruk telah mendapatkan penanganan dalam bentuk PMT Pemulihan sebanyak 133 anak atau 100 %. Sedangkan kasus-kasus gizi buruk yang sakit dan menderita komplikasi penyakit yang menahun serta mempunyai kelainan bawaan dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas.

### 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyumas, perlu dibedakan atas jenjang pendidikan yang tersedia yakni tingkat pendidikan dasar dan pendidikan



menengah.

- a. Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Salah satu prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas adalah Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sebagaimana target yang ditetapkan oleh Tim Wajar Dikdas Tingkat Kabupaten Banyumas, bahwa untuk tahun 2008 Kabupaten Banyumas Tuntas Wajar 7 - 15 Tahun.

Upaya yang telah dilakukan oleh Tim Wajar Dikdas Tingkat Kabupaten Banyumas dalam rangka percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun antara lain dengan melakukan peningkatan daya tampung dengan penambahan sarana dan prasarana pendidikan meliputi USB, RKB, Ruang Penunjang lainnya seperti Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium. Upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah ruang kelas agar anak usia sekolah dapat tertampung, diutamakan pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama pada daerah-daerah pinggiran yang masih kekurangan ruang kelas. Adapun kondisi ruang kelas dan sarana pendidikan lainnya sebagai berikut:

**Tabel 2.45.**  
**Jumlah Ruang, Jumlah Kebutuhan Ruang, Tingkat Kerusakan, Kekurangan Ruang Belajar dan Ruang lain**

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang	Tingkat Kerusakan Ruang			Kekurangan Ruang Belajar	Ruang Lain				
				-	Rusak Ringan	Rusak Berat		TU/ KS/ GR	WC	UKS	Per pus	Lab
1.	TKBA/RA	960	1.346	761	115	470	-	-	-	-	-	-
2.	SDSDLB	5.572	5.759	2.651	1.487	1.621	-	-	-	-	301	-
3.	MI	1.052	1.032	576	258	198	20	-	-	-	29	-
4.	SMP. N	1.135	1.174	1.070	81	23	-	189	533	63	59	104
5.	SMP. S	527	557	453	56	48	-	196	345	41	56	61
6.	MTs	338	348	258	57	33	-	113	150	22	24	28
7.	SMA N	286	287	285	2	-	-	42	116	16	13	58
8.	SMA S	148	180	161	16	3	-	54	109	16	20	40
9.	SMK N	151	101	89	-	12	50	19	50	5	5	12
10.	SMK S	619	637	583	38	16	-	155	315	36	41	69
11.	MA	109	109	99	6	4	-	33	54	6	9	24

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas yang ada di Kabupaten Banyumas mulai dari TK sampai pendidikan menengah yang dalam kondisi baik sebanyak 6.986 ruang atau 60,59%, kondisi rusak ringan sebanyak 2.116 ruang atau 18,35%, kondisi rusak berat sebanyak 2.428 ruang atau 21,06%.

Dari semua ruang kelas diketahui jumlah yang mengalami kerusakan banyak adalah pada tingkat SD/MI, karena jumlah SD/MI di Kabupaten Banyumas relatif cukup banyak dan sebagian besar bangunan yang rusak pada sekolah Inpres yang dibangun sekitar tahun 1978, bahkan ada yang sampai saat ini belum pernah direhab sehingga kondisi fisiknya sudah mulai rusak terutama pada bagian rangka atap dan tembok mulai lapuk.

Adapun kekurangan ruang belajar dijumpai pada MI sebanyak 20 ruang kelas dan SMKN sebanyak 33



ruang kelas, sedangkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah, belum seluruhnya terpenuhi, seperti untuk ruang TU/Guru/Kepala Sekolah kekurangan 801 ruang, ruang WC kurang Sebanyak 1.672, ruang UKS kurang sebanyak 205, ruang perpustakaan kurang sebanyak 557, dan ruang laborat sebanyak 396.

**Tabel. 2.46.**  
**Data Kondisi Ruang SD/MI, SMP/MTs**

No	Jenis Sekolah	Kondisi Fisik Bangunan (Ruang Kelas)			
		Rusak Ringan (Rk)	Rusak Berat (Rk)	Baik (Rk)	Total (Rk)
1.	SD	1.487	1.621	2.651	5.759
2.	MI	258	198	576	1.032
3.	SMP	137	71	1.523	1.731
4.	MTs	57	33	258	348
JUMLAH		1.939	1.923	5.008	8.870

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008

Dari data kondisi fisik bangunan (Ruang Kelas) SD/MI tersebut, diketahui bahwa dari total 5.759 ruang kelas SD terdapat 2.651 (46,03%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 1.487 (25,82%) ruang kelas dalam kondisi rusak ringan serta 1.621 (28,15%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat, sedangkan kondisi gedung MI dari sejumlah 1.032 ruang kelas MI terdapat 576 (55,81%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 258 (25,00%) ruang kelas dalam kondisi rusak ringan serta 198 (19,17%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat.

Dari data kondisi fisik bangunan (Ruang Kelas) SMP/MTs pada tabel 2.46 diatas dapat diketahui bahwa dari total 1.731 ruang kelas SMP terdapat 1.523 (87,98%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 137 (7,91%) ruang kelas

dalam kondisi rusak ringan serta 71 (4,10%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat, sedangkan kondisi gedung MTs dari sejumlah 348 ruang kelas MTs terdapat 258 (74,14%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 57 (16,38%) ruang kelas rusak ringan serta 33 (9,48%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat.

Untuk menunjang agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, maka rasio guru dan siswa haruslah seimbang. Adapun perbandingan jumlah guru dan murid di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut ini.

**Tabel 2.47.**  
**Status guru, rasio guru dengan siswa,  
Rasio Siswa dengan Kelas**

No	Jenis Sek	Jml Sek	Jml Siswa	Jml Rombel	Jumlah Guru					Rasio Siswa Guru	Rasio Siswa Kelas
					PNS	GB	YAS	PTT/ WB	JML		
1.	TK/BA/RA	680	24.380	960	166	85	828	620	1.699	14,35	25,40
2.	SD/SDLB	828	155.212	5.572	5.105	75	204	2.138	7.522	20,63	27,86
3.	MI	170	21.891	1.052	236	8	534	567	1.345	16,28	20,81
4.	SMP N	87	46.759	1.135	1.777	78	-	294	2.149	21,76	41,20
5.	SMP S	71	17.655	527	119	89	516	358	1.082	16,32	33,50
6.	MTs	43	11.859	338	129	6	257	368	760	15,60	35,09
7.	SMA N	14	11.269	286	606	20	-	55	681	16,55	39,40
8.	SMA S	18	4.546	148	30	55	116	224	425	10,70	30,72
9.	SMK N	8	5.378	151	384	12	-	42	438	12,28	35,62
10.	SMK S	50	23.332	619	61	85	299	818	1.263	18,47	37,69
11.	MA	13	3.478	109	101	8	27	181	317	10,97	31,91
JUMLAH		1.982	325.759	10.897	8.714	521	2.781	5.665	17.681	18,42	29,89

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008

Perbandingan jumlah guru dan murid sesuai standar nasional pendidikan adalah satu guru menangani maksimal 20 murid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh jenjang pendidikan sudah memenuhi rasio siswa terhadap guru sudah



memenuhi standar nasional pendidikan yaitu dari perbandingan total jumlah siswa pada tiap jenjang pendidikan terhadap total jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan berada dibawah angka 20, hanya pada jenjang pendidikan SMP Negeri angka rasio siswa dengan guru berada pada angka 21,76.

Mengenai perbandingan jumlah murid terhadap ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan adalah satu kelas untuk menampung maksimal 40 siswa. Berdasarkan tabel diatas ketersediaan ruang kelas sudah sesuai dengan standar nasional, hanya pada tingkat SMP yang masih sedikit diatas standar nasional yang telah ditentukan yaitu berada pada angka 41,20.

Rasio sekolah dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar ketersediaan setiap strata sekolah di setiap kecamatan. Jumlah sekolah menjadi salah satu tolok ukur evaluasi kesenjangan desa kota karena kebijakan pemberian izin pendirian sekolah sepenuhnya berada di Pemerintah Daerah.

Sebaran jumlah sekolah (tanpa memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah) menunjukkan bahwa rata-rata sekolah di wilayah kecamatan kota adalah 22 untuk TK, 36 untuk SD, 7 untuk SMP dan 10 untuk SMA. Sedangkan wilayah desa rata-ratanya adalah 26 untuk TK, 43 untuk SD, 6 untuk SMP dan 3 untuk SMA. Melihat rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan fasilitas sekolah hanya pada tingkat SMA atau yang sederajat.

Sedangkan keadaan dan lokasi sekolah yang tersebar di 27 kecamatan menunjukkan bahwa untuk SD dan MI berjumlah 998 cukup merata; SMP dan MTs berjumlah 201 cukup merata; SMA, SMK dan MTs berjumlah 201

201 cukup merata; SMA, SMK dan MA berjumlah 102 penyebarannya belum begitu merata khususnya SMK Negeri.

**Tabel 2.48.**  
**Sebaran Jumlah SMA, SMK, MA tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Lulusan SMP/MTs	Jumlah Sekolah				Keterangan
			SMA	SMK	MA	Jml	
1.	Lumbir	473	-	-	1	1	Kurang
2.	Wangon	1.190	1	2	-	3	
3.	Jatilawang	1.038	2	2	-	4	
4.	Rawalo	608	1	3	1	5	Kurang
5.	Kebasen	775	-	1	-	1	
6.	Kemranjen	1.069	1	3	2	6	
7.	Sumpiuh	814	2	5	1	8	Kurang
8.	Tambak	668	2	-	-	2	
9.	Somagede	371	-	1	-	1	
10.	Kalibagor	565	1	4	1	6	Kurang
11.	Banyumas	985	-	2	-	2	
12.	Patikraja	468	1	1	-	2	
13.	Purwojati	410	-	1	-	1	Kurang
14.	Ajibarang	1.238	2	3	-	5	
15.	Gumelar	603	1	-	-	1	
16.	Pekuncen	913	-	1	1	2	Kurang
17.	Cilongok	1.077	-	1	-	1	
18.	Karanglewas	451	1	1	-	2	
19.	Kedungbanteng	633	1	1	1	3	Kurang
20.	Baturaden	534	1	-	-	1	
21.	Sumbang	762	-	-	-	-	
22.	Kembaran	378	-	1	-	1	Kurang
23.	Sokaraja	961	5	1	-	6	
24.	Purwokerto Selatan	771	1	13	-	14	
25.	Purwokerto Barat	666	-	2	-	2	Kurang
26.	Purwokerto Timur	1.895	9	9	3	21	
27.	Purwokerto Utara	394	1	-	-	1	
Jumlah		20.710	33	58	11	102	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008

Perkembangan dan Target APK/APM/APMus SD sederajat dan SMP sederajat berdasarkan hasil pendataan tahun 2004 / 2005 sampai dengan 2008/2009, sebagai berikut:



**Tabel. 2.49.**  
**Capaian dan target APM, APK**

No.	Tahun	APK / APM SD dan sederajat				APMus		APK / APM SLTP dan sederajat				APMus
		-	Target APK	APM	Target APM	7-12 Th.		APK	Target APK	APM	Target APM	13-15 Th.
1.	2004/2005	104,09	111,95	95,00	99,65	9,24		85,43	90,70	74,45	84,94	89,62
2.	2005/2006	109,24	109,75	98,80	99,85	102,77		89,50	91,21	76,63	85,69	83,71
3.	2006/2007	110,34	110,34	93,70	99,95	99,69		90,44	93,88	74,92	87,69	95,18
4.	2007/2008	107,50	106,28	99,75	98,12	99,65		98,25	93,58	97,50	87,19	97,50
5.	2008/2009	104,38	105,51	89,27	100	98,60		95,05	96,5	70,54	100	77,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2009

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa baik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan sederajat mulai Tahun 2004/2005 sampai dengan Tahun 2006/2007 secara bertahap naik, namun pada Tahun 2007/2008 dan 2008/2009 mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun) sehingga mempengaruhi perhitungan APK, sedangkan APK SLTP dan sederajat mulai Tahun 2004/2005 sampai Tahun 2008/2009 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun (7-15 tahun).

Untuk APM SD dan sederajat mulai Tahun 2004/2005 sampai dengan 2007/2008 kecenderungan mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2008/2009 mengalami penurunan menjadi 89,27 hal ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sehingga berpengaruh terhadap perhitungan APM, sedangkan untuk APM SLTP dan sederajat, mulai Tahun 2004/2005 sampai dengan Tahun 2007/2008 kecenderungannya mengalami peningkatan, sedangkan

pada Tahun 2008/2009 mengalami penurunan menjadi 70,54 hal ini disebabkan jumlah penduduk usia kelompok usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi perhitungan APM.

**Tabel 2.50.**  
**Data Perkembangan IPM Kabupaten Banyumas 2003 - 2006**

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Pendidikan		Paritas Daya Beli (000)
			Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
1.	2003	69.2	92.0	7.0	594.2
2.	2004	69.2	92.8	6.9	619.6
3.	2005	69.4	93.3	6.9	621.5
4.	2006	69.5	93.3	7.0	621.8

Sumber data : BPS, 2007

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (tingkat daya beli masyarakat) dilihat dari Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 . Dari data di atas , bahwa indikator bidang pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) pada tahun 2003-2006 cukup baik dan relatif mengalami peningkatan pada indikator angka melek huruf.



**Tabel 2.51.**  
**IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya**  
**Tahun 1999-2006**

Kabupaten	1999	2002	2003	2004	2005	2006	Peringkat IPM Tahun 2006	
							Jateng	Kabupaten
Banyumas	66.0	66.7	68.2	70.3	70.7	70.8	14	1
Cilacap	63.1	65.3	64.8	68.8	69.5	69.7	22	3
Purbalingga	63.0	65.0	65.9	68.7	69.3	69.9	20	2
Banjarnegara	63.6	63.7	65.2	66.9	67.3	68.3	30	5
Kebumen	64.9	65.6	65.7	68.0	68.9	69.5	23	4
Jawa Tengah	64.6	66.3	66.2	68.7	69.6	70.1		

Sumber : BPS, 2007

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas tahun 2003-2006 selalu mengalami peningkatan, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama program pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan).

**Tabel 2.52.**  
**Capaian Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AK) dan**  
**Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2006-2008**

No.	Tingkat Pendidikan	APS			AK			AM		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1.	SD/MI	0,16 %	0,15 %	0,23 %	97,65 %	98,08 %	94,63 %	98,76 %	107,77 %	94 %
2.	SMP/MTs	0,88 %	0,77 %	0,37 %	95,60 %	95,72 %	97,42 %	93,45 %	93,76 %	102,79 %
3.	SMA/SMK/MA	1,47 %	1,47 %	0,35 %	92,85 %	93,76 %	96,12 %	74,59 %	75,60 %	81,51 %

Sumber : Dinas Pendidikan, 2008

Berdasarkan data di atas Tahun 2006-2007, Angka Putus Sekolah (APS) baik tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui dana BOS

(Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP dan sedangkan pada tingkat SMA beasiswa keluarga miskin (BKM). sedangkan pada tahun 2008/2009 mengalami penurunan menjadi 70,54 hal ini disebabkan jumlah penduduk usia kelompok usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi perhitungan APM.

**Tabel 2.50.**  
**Data Perkembangan IPM Kabupaten Banyumas 2003 - 2006**

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Pendidikan		Paritas Daya Beli (000)
			Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
1.	2003	69.2	92.0	7.0	594.2
2.	2004	69.2	92.8	6.9	619.6
3.	2005	69.4	93.3	6.9	621.5
4.	2006	69.5	93.3	7.0	621.8

Sumber data : BPS, 2007

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (tingkat daya beli masyarakat) dilihat dari Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah mulai tahun 2003 sampai dengan 2006 . Dari data di atas , bahwa indikator bidang pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) pada tahun 2003-2006 cukup baik dan relatif mengalami peningkatan pada indikator angka melek huruf.



**Tabel 2.51.**  
**IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya**  
**Tahun 1999-2006**

Kabupaten	1999	2002	2003	2004	2005	2006	Peringkat IPM Tahun 2006	
							Jateng	Kabupaten
Banyumas	66.0	66.7	68.2	70.3	70.7	70.8	14	1
Cilacap	63.1	65.3	64.8	68.8	69.5	69.7	22	3
Purbalingga	63.0	65.0	65.9	68.7	69.3	69.9	20	2
Banjarnegara	63.6	63.7	65.2	66.9	67.3	68.3	30	5
Kebumen	64.9	65.6	65.7	68.0	68.9	69.5	23	4
Jawa Tengah	64.6	66.3	66.2	68.7	69.6	70.1		

Sumber : BPS, 2007

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas tahun 2003-2006 selalu mengalami peningkatan, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah kabupaten Banyumas untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama program pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan).

**Tabel 2.52.**  
**Capaian Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AK) dan Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2006-2008**

No.	Tingkat Pendidikan	APS			AK			AM		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1.	SD/MI	0,16 %	0,15 %	0,23 %	97,65 %	98,08 %	94,63 %	98,76 %	107,77 %	94 %
2.	SMP/MTs	0,88 %	0,77 %	0,37 %	95,60 %	95,72 %	97,42 %	93,45 %	93,76 %	102,79 %
3.	SMA/SMK/MA	1,47 %	1,47 %	0,35 %	92,85 %	93,76 %	96,12 %	74,59 %	75,60 %	81,51 %

Sumber : Dinas Pendidikan, 2008

Berdasarkan data di atas tahun 2006-2007, Angka Putus Sekolah (APS) baik tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP dan sedangkan pada tingkat SMA beasiswa keluarga miskin (BKM).

Untuk Angka Kelulusan (AK) mulai tahun 2006-2008, baik pada tingkat SD/MI, SMP /MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, sedangkan untuk Angka melanjutkan (AM) SD tahun 2008 untuk tingkat SD mengalami penurunan, karena pada tahun 2008 banyak siswa TK/RA/BA belum memenuhi usia untuk melanjutkan ke tingkat sekolah dasar.

Salah satu strategi penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun dengan melaksanakan pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Banyumas tahun 2008 jumlah SD yang melaksanakan program inklusi sebanyak 4 SD yaitu SD Tanjung 1, SD Arcawinangun 5, SD Putra Harapan dan SD Al-Irsyad dan 1 SMP yaitu SMP Al-Irsyad.

#### **b. Program Pendidikan Menengah**

Dalam rangka pelaksanaan program-program pendidikan mengacu kepada Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi dan kebutuhan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Banyumas, telah dilaksanakan beberapa program, yaitu :

1. Program peningkatan, pemerataan, dan perluasan akses layanan pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas/gedung baik rusak berat maupun rusak ringan, pemberian beasiswa kurang mampu dari dana APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN;
2. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan daya saing pendidikan,



dengan berbagai program dan kegiatan, seperti ; lomba-lomba siswa (Lomba Olimpiade Sains, Lomba Mapel, Lomba Kompetensi Siswa, Debat Bahas Inggris, Wawasan Wiyata Mandala), adanya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyiapan pasar kerja bagi lulusan sekolah kejuruan, serta dalam rangka menyongsong kemajuan iptek di Kabupaten Banyumas telah dirintis Sekolah Standar Nasional, Sekolah Kategori Mandiri dan Sekolah Rintisan Berstandar Internasional.

3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui diklat guru mata pelajaran, workshop, bintek, Optimalisasi Kegiatan KKG, MKKS, KKP, MKPS, dan MGMP.

**c. Pendidikan Non Formal**

Layanan pendidikan selain melalui pendidikan formal juga dilaksanakan melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yaitu untuk melayani masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum terlayani melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan : Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Jumlah pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyumas tahun 2008 untuk Paket A terdiri dari 11 kelompok dengan 203 warga belajar dan 24 tutor,

Paket B terdiri dari 46 kelompok dengan jumlah 1.582 warga belajar dan 552 tutor dan Paket C terdiri dari 42 kelompok dengan 2.643 warga belajar dan 445 tutor. Jumlah keseluruhan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyumas adalah 99 kelompok, 4.428 warga belajar dan 1.021 tutor.

Disamping mengelola pendidikan kesetaraan, Dinas Pendidikan mealui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga menyelenggarakan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketrampilan warga belajar sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan usaha sendiri melalui pendidikan kecakapan hidup (lifeskill) seperti : Kelompok Belajar Usaha (KBU), kelompok Pemuda Produktif, Kelompok Belajar Olahraga (KBO), beasiswa magang. Disamping dilaksanakan oleh pemerintah, pendidikan non formal juga ada yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui lembaga kursus.

- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab II Pasal 2 ayat 1 huruf d diatur mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang disebutkan dalam Bab VI Bagian Kesatu Pasal 28 ayat (1) berbunyi : Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kualifikasi yang



dipersyaratkan bagi tenaga pendidik dari jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/MA kualifikasi minimalnya Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas guru adalah dalam bentuk diklat, bintek, workshop, optimalisasi KKG, MGMP, MGPS, KKKS, dan pemberian beasiswa studi lanjut.

**Tabel 2.53.**  
**Kondisi Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Jenjang Pendidikan Tingkat	Status		Lulus Sertifikasi (Tahun)				
	PNS	Non PNS	2006	2007	2008	2009	Jumlah
TK	271	1.457	-	35	23	53	111
SD	5.918	2.075	111	568	677	737	2.089
SMP	1.856	1.447	48	290	512	357	1.291
SMA	602	492	-	145	193	183	521
SMK	399	1.215	-	312	174	185	526
SLB	25	13	-	3	4	6	13
Pengawas						84	84
Jumlah	9.071	6.699	159	1.204	1.583	1.705	4.635

Sumber : Dinas Pendidikan, 2009

**Tabel 2.54.**  
**Kualifikasi Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009**

Tingkat Sekolah	TINGKAT PENDIDIKAN													
	SMA		D1		D2		D3		S1		S2		JUMLAH	
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
TK	158	745	17	26	64	436	3	36	58	123	-	-	300	1.366
SD	562	583	66	32	3.528	971	96	140	2.059	574	21	-	6.332	2.300
SMP	14	107	115	112	36	52	231	128	1.483	1.564	54	11	1.933	1.974
SMA	-	13	-	6	-	3	63	63	511	556	25	4	599	645
SMK	-	38	-	4	-	14	66	218	356	1.404	27	23	449	1.701
JUMLAH	734	1.486	198	180	3.628	1.476	459	585		4.221	127	38	9.613	7.986

Sumber : Dinas Pendidikan, 2009

e. Program Penuntasan Buta Aksara

Program Penuntasan Buta Aksara juga menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Tahapan Program Penuntasan Buta Aksara terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap Pemberantasan yaitu tahap keaksaraan dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang menulis, membaca dan berhitung tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. Standar kompetensinya adalah pengembangan kompetensinya adalah pengembangan ketrampilan dasar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ciri-cirinya adalah warga belajar dalam proses pembelajarannya adalah masih tergantung, perlu bantuan dari tutor dan warga belajar lain untuk melakukan semua kegiatan di kejar (kelompok belajar) dan mendapatkan sertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) I.
2. Tahap Pembinaan yaitu tahap lanjutan, dimana warga belajar yang telah dapat membaca, menulis dengan lancar serta memiliki pengalaman, tetapi perlu meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari. Standar kompetensinya adalah membantu warga belajar memanfaatkan kemampuan calistung (baca, tulis, hitung) dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri tahap ini adalah saling membantu mengembangkan kemampuan fungsional dengan menggunakan calistung



dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan sertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) II.

3. Tahap Pelestarian adalah tahap mandiri, warga belajar telah memiliki kemampuan dan pengalaman serta ketrampilan fungsional untuk dapat memecahkan masalah dan mencari informasi serta menjadi nara sumber sendiri. Standar kompetensinya adalah membantu warga belajar meningkatkan taraf hidup, dengan ciri-ciri warga belajar mandiri (mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan, menganalisis pengalaman dan bisa membantu orang lain dan mendapatkan sertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) III).

**Tabel 2.55.**

**Program Penuntasan Buta Aksara di Kab. Banyumas  
Tahun 2005 -2009**

No.	Tahun	Tahapan Program	Jumlah Garapan (orang)	Keterangan
	2005		94.428	Data Awal
1.	2005	Pemberantasan	1.160	
2.	2006	Pemberantasan	3.841	
3.	2007	Pemberantasan	21.254	
		Pembinaan	11.108	
		Pelestarian	4.972	
4.	2008	Pemberantasan	1.085	
		Pembinaan	18.238	
		Pelestarian	27.324	
5.	2009	Program JAGA (Jaring Garap)	9.419	
JUMLAH GARAPAN			98.401	Terdapat selisih garapan warga belajar sebanyak 3.973 dari data awal tahun 2005 sebanyak 94.428

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2009

Data awal Buta Aksara di Kabupaten Banyumas usia 15 tahun ke atas sebanyak 94.428 orang. Pada Tahun 2005, melalui tahap pemberantasan tergarap warga belajar sebanyak 1.160 orang, tahun 2006 tergarap warga belajar sebanyak 3.841 orang melalui tahap pemberantasan.

Pada Tahun 2007, tergarap warga belajar melalui tahap pemberantasan sebanyak 21.254 orang, tahap pembinaan sebanyak 11.108 orang dan tahap pelestarian sebanyak 4.972 orang. Tahun 2008, tergarap warga belajar melalui tahap pemberantasan sebanyak 1.085 orang, tahap pembinaan sebanyak 18.238 orang dan tahap pelestarian sebanyak 27.324 orang dan pada tahun 2008 Kabupaten Banyumas telah mendeklarasikan Tuntas Buta Aksara. Namun tahun 2009, melalui program JAGA (Jaring Garap) telah dilakukan penyisiran oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga lain (Aisyiah, NU, PKBM, LMDH dan Perguruan Tinggi)) telah ditemukan kembali warga belajar sebanyak 9.419 orang.

Dilihat dari data awal pada tahun 2005 sebanyak 94.428 orang dengan jumlah garapan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 98.401 orang terdapat selisih garapan sebanyak 3.973 orang, hal ini disebabkan pada tahun 2009 melalui program JAGA (Jaring Garap) telah ditemukan kembali warga belajar sebanyak 9.419 orang.

#### 4. Kesejahteraan Sosial

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga setiap setahun sekali yang dilakukan dengan



tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus.

Sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin.

Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga Tertinggal, karena yang disebut sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat disarana kesehatan modern. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang kondisi ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Tabel berikut memberikan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas menurut tahapan keluarga sejahtera :

**Tabel 2.56.**  
**Penduduk Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera**  
**Tahun 2004 - 2008**

Tahap Keluarga Sejahtera	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Pra Sejahtera	109.433	111.240	116.777	117.424	116.537
Sejahtera I	88.556	99.117	91.443	85.819	84.371
Sejahtera II	132.092	128.632	124.851	127.092	130.252
Sejahtera III	65.704	64.304	73.796	84.020	89.148
Sejahtera III +	24.363	23.819	27.023	30.050	28.926

Sumber : BPPKB Kab. Banyumas, 2008

Pada hakekatnya indikator pendataan Keluarga Sejahtera menggunakan perumusan konsep "Keluarga Sejahtera" yang lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran atau kebahagiaan. Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Kriteria yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) tentang garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan 2.100 kalori perhari perkapita. Mendasarkan pada kesepakatan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tentang data kemiskinan, disebutkan bahwa angka kemiskinan merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Terkait dengan hal tersebut diatas. maka BPS Kabupaten Banyumas mempublikasikan data keluarga miskin untuk tahun 2008 sejumlah 150.647 KK.



**Tabel 2.57.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2004-2008**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Perubahan (KK)	Persentase Perubahan (%)
2004	325.200	2.427	0.75
2005	173.514	-151.686	-87.42
2006	173.386	-128	-0.07
2007	172.581	-805	-0.47
2008	150.647	-21.904	-14.56

Sumber : BPPKB Kab. Banyumas, 2008

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Data tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sehingga, dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari 4 jiwa, maka pada tahun 2007 terdapat 690.324 jiwa penduduk miskin dan tahun 2008 sebanyak 602.588 jiwa penduduk miskin, atau dengan kata lain mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,47% pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 14,56%.

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan pada suatu daerah. Dengan adanya penduduk miskin pada suatu wilayah, akan berdampak pada adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.58.**  
**Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**di Kabupaten Banyumas Tahun 2004-2008**

No.	Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Lanjut usia terlanjar	2.952	3.220	3.256	3.678	4.450
2.	Anak terlanjar	1.860	2.121	3.220	2.485	2.467
3.	Keluarga miskin	75.366	164.146	173.398	172.581	150.647
4.	Penyandang cacat	5.430	7.768	7.775	8.573	12.015
5.	Tuna susila	241	269	271	323	282
6.	Gelandangan	97	70	57	107	244
7.	Pengemis	182	187	147	291	198
8.	Bekas narapidana	1.035	1.207	992	730	1.092
	<b>Jumlah</b>	<b>87.163</b>	<b>178.988</b>	<b>189.116</b>	<b>189.733</b>	<b>353.098</b>

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terbesar adalah keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin Kabupaten Banyumas terus mengalami kenaikan, dengan kenaikan yang paling tinggi adalah pada tahun 2005, yaitu sebesar 117,80 % (88.780 keluarga). Kenaikan jumlah Keluarga Miskin pada tahun 2005 dan 2006 merupakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali. Sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,56 % (150.647 keluarga).

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, selain harus sehat secara fisik, masyarakat juga harus ditingkatkan kesehatan spiritualnya. Hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain adalah pemantapan kehidupan beragama, pencegahan konflik antar dan inter agama, perlindungan rasa aman dalam keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga; merupakan hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh



Pemerintah Kabupaten Banyumas agar ketenangan masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam pengamalan agama dan kepercayaannya tetap terjamin serta memberikan rasa aman pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga melalui kebijakan Perlindungan Ibu dan Anak Dalam Rumah Tangga.

Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaannya tidak hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten saja, namun juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi non pemerintah. Organisasi yang menampung aktivitas kepemudaan antara lain Karang Taruna, KNPI, Pramuka dan lain-lain seperti organisasi olah raga dan kesenian. Perkembangan organisasi sosial di Kabupaten Banyumas menunjukkan jumlah yang terus meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 2.59. Jenis organisasi Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi sosial maupun Panti sosial/asuhan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan peningkatan jumlahnya. Namun, dalam pelaksanaannya, peningkatan jumlah tersebut belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan pokok kepemudaan dan olah raga adalah masih terbatasnya jumlah kelembagaan dan aktivitas kepemudaan serta terbatasnya sarana dan prasarana, pembinaan dan kegiatan.

**Tabel 2.59.**  
**Perkembangan Organisasi Sosial Tahun 2004 - 2008**

No.	Jenis Organisasi Sosial	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pekerja sosial masyarakat	1.521	1655	1.655	1.655	1.995
2.	Karang taruna	329	331	331	331	331
3.	Organisasi sosial	33	36	37	37	37
4.	Panti sosial/Asuhan	9	12	13	13	12

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Dilihat dari sisi keluarga berencana, data menunjukkan bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi (Tabel 2.60). Demikian juga persentase pengguna alat kontrasepsinya. Permasalahan pokok Keluarga Berencana adalah rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Rendahnya pemahaman dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan rendahnya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1).

**Tabel 2.60.**  
**Banyaknya Peserta KB Aktif dan Persentase terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2004 - 2008**

No	Keterangan	Tahun (jiwa)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah PUS	289.291	288.293	289.203	300.769	302.124
2.	Jumlah Peserta KB	223.398	213.406	215.229	218.370	215.401
3.	Persentase PUS (%)	77,22	74,02	74,42	72,60	71,29

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Salah satu aspek yang juga cukup berperan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan perempuan. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan, dari tahun 2004 sebanyak 770.297 orang menjadi 791.939 orang pada Tahun 2008. Partisipasi



perempuan di instansi pemerintah pada tahun 2003 sebanyak 6.086 orang atau 40.59% dari seluruh jumlah pegawai (14.995 orang); pada tahun 2008 sebanyak 7.281 orang atau 45.30% dari seluruh jumlah pegawai (16.088 orang). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di instansi pemerintah sebesar 4.71%.

Penekanan pemberdayaan bagi perempuan dinilai tepat karena sebagian besar masyarakat miskin memiliki kepala keluarga perempuan. Langkah ini sangat penting untuk menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas. Isu kemiskinan dan pengangguran ini merupakan isu Nasional yang sangat penting.

Masalah pokok pemberdayaan perempuan adalah adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa perempuan lebih inferior dari pada laki-laki, belum adanya kesetaraan gender dalam berbagai pembangunan, kurangnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender, kurangnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya pengarusutamaan gender. Dalam memberdayakan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan maka Pemerintah bekerjasama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). PKK dan GOW merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bahu-membahu dalam menyukseskan pembangunan di daerah ini, dalam menjalankan roda organisasi banyak hal yang menjadi perhatian seluruh pengurus, agar keberadaan dan tujuan yang diharapkan

dapat dicapai dengan baik. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Tim Penggerak PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak demi terlaksananya program PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang : Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, Sehat sejahtera, Maju mandiri, Kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

GOW diharapkan mampu menjadi tali pemersatu dan perekat seluruh organisasi perempuan yang ada di daerah, sehingga seluruh kegiatan organisasi wanita yang dapat benar-benar terarah dan fokus pada upaya untuk memberdayakan, memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan perempuan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Banyumas terutama ke wilayah pedesaan, seperti IDT, PDM-DKE, PPK, subsidi BBM, JPS, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi hutan dan lahan (hutan rakyat), penyaluran modal bagi usaha mikro, dana bergulir, P2KP, PNPM dan lain-lain. Keberhasilan program-program tersebut hampir semuanya bertumpu pada pola pemberdayaan masyarakat dengan sistim pengelolaan manajemen secara transparan. Hal itulah yang menjadi salah satu perhatian gerakan sosial di Kabupaten Banyumas. agar mengupayakan suatu



gerakan yang bersifat bottom up sekaligus berperspektif kerakyatan dan membuka jalan bagi alternatif lain. Gerakan tersebut bersebaran dalam berbagai macam sektor dan isu baik yang digarap satu lembaga maupun jaringan. Beberapa diantaranya adalah: program kehutanan masyarakat dan lingkungan hidup (LPPSLH, Kompleet, KTH Argowilis, Setan Balong), Pertanian Berkelanjutan/reforma agrarian/ kedaulatan pangan (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PPB, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri, jaringan reforma agraria), Pengembangan Usaha Kecil (LPPSLH, Gatra Mandiri), Perempuan (PKBH, BABAD, LPPSLH, PSW/Puslitwan, APPERMAS, Koalisi Perempuan), Anak-jalanan (Puslitwan, Biyung Emban), Miskin Kota (Forkomi, LSKAR), Pedagang Kaki Lima (LSKAR), tata ruang kota (LSKAR), pendidikan (Figurmas, ormas mahasiswa FMN, KAMMI, IMM, IRM, HMI MPO, HMI DIPO, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan organisasi mahasiswa lokal dan kelompok studi), Buruh (SBSI, SPSI), korupsi (FRMB), pembangunan partisipatif (Jaringan "Bengkel Kerja"), kemiskinan (LPPSLH, Gatra Mandiri), Keuangan Mikro (LPPSLH, Gatra Mandiri), pers/media dan counter culture (AJI, PWI, Jaringan Media Alternatif, Youth Power, INRESS, kelompok budaya), isu-isu global (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri dan ormas mahasiswa), pemerintahan lokal (KAMMI, IMM dan jaringan NGO), Fair Trade (P3R LPPSLH).

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah antara lain belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya jumlah keluarga miskin dan lemahnya

koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang fokus. Sedangkan permasalahan pemberdayaan masyarakat adalah masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, belum optimalnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan belum optimalnya pemberdayaan potensi lokal serta masih tingginya tingkat kemiskinan.

### 5. Ketenagakerjaan

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk dalam kelompok menganggur ini adalah mereka yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebastugaskan, tetapi sedang menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2007 yaitu sebanyak 2.348 orang (1.57%).

**Tabel 2.61.**  
**Jumlah Pengangguran di Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Pengangguran (orang)	Perubahan(%)
1.	2004	136.475	-
2.	2005	135.318	-0.84
3.	2006	136.178	0.63
4.	2007	149.935	10.10
5.	2008	152.283	1.57

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas tahun 2006 sebesar 8.36%, dengan jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (8.48% berbanding 8.14%). Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagai berikut :

**Tabel 2.62.**  
**Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Tahun 2002 - 2006 (%)**

	Indikator	Tahun				
		-	2003	2004	2005	2006
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	Laki-laki	71,57	73,31	72,46	72,18	71,52
	Perempuan	41,71	42,02	39,15	41,28	39,94
	Total	56,62	57,25	55,74	56,82	55,80
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	Laki-laki	5,86	4,90	5,62	5,26	8,48
	Perempuan	4,34	5,85	3,86	4,55	8,14
	Total	5,30	5,26	5,00	5,01	8,36

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008

Tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2002 hingga 2006 relatif tidak mengalami perubahan, berkisar antara 55% hingga 57% secara berfluktuasi. Angka ini menggambarkan rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah tenaga kerja, sehingga terlihat dengan jelas bahwa angkatan kerja laki-laki lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan

Pemerintah Kabupaten Banyumas menginginkan adanya penurunan angka pengangguran pada masa yang akan datang.

Namun pada sisi lain dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 sebanyak 2 (dua) kali. Kebijakan kenaikan BBM tersebut berdampak pada sektor industri dan sektor ekonomi lainnya yang selanjutnya juga mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada.

Permasalahan pokok ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dan masih banyaknya para pencari kerja yang belum tertampung di lapangan kerja yang tersedia, belum optimalnya informasi pasar kerja dan bursa kerja, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## 6. Transmigrasi

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi.

Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagaimana permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Permukiman Transmigrasi (WPT) atau Lahan Permukiman Transmigrasi (LPT).



Adapun jenis transmigrasi ada 3 (tiga) yaitu :

1. Transmigrasi Umum (TU) yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Badan Usaha.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yaitu transmigrasi yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok.

**Tabel 2.63.**

**Data Keluarga yang Bertransmigrasi**

No.	Tahun	Pendaftar(KK)	Kuota (KK)	Realisasi (KK)
1.	2005	122	15	15 (51 jiwa)
2.	2006	96	25	25 (90 jiwa)
3.	2007	90	25	25 (100 jiwa)
4.	2008	117	60	60 (238 jiwa)
5.	2009	101	45	45 (184 jiwa)

Sumber data : Dinsosnakertrans, 2009

Tahun 2004 terdapat 77 keluarga yang bertransmigrasi. Kondisi itu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 65 keluarga. Para transmigran tersebut berasal dari Kecamatan Somagede, Sumpiuh, Pekuncen, dan Cilongok. Pada tahun 2005, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas kewalahan memenuhi minat warga masyarakat bertransmigrasi, khusus ke Sumatera. Pendaftar mencapai 60 keluarga, padahal, lokasi tujuan hanya 15 keluarga. Karena pendaftar lebih banyak daripada kebutuhan, maka kemudian pendaftar diseleksi secara administratif serta umur dan fisik atau kesehatan. Banyak warga tertarik bertransmigrasi ke Sumatera karena sudah ada saudara

mereka yang transmigrasi lebih dahulu dan sekarang telah sukses, di mana sebagian mereka bekerja di perkebunan. Kondisi tersebut kemudian mendorong saudara mereka di Jawa untuk menyusul.

Masalah transmigrasi di Kabupaten Banyumas antara lain perubahan jumlah kuota , masih terbatasnya daerah tujuan transmigrasi serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur transmigrasi.

## 7. Agama

Dilihat dari penduduknya, Kabupaten Banyumas mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama, berkembangnya pondok pesantren dan meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banyumas.

Penduduk menurut pemeluk agama berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam sebanyak 1.573.082 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 7.671 tempat ibadah. Urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen sebesar 14.985 orang dengan tempat ibadah sebanyak 84 tempat ibadah. Selanjutnya berturut turut adalah :



**Tabel 2.64.**  
**Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah**  
**Kabupaten Banyumas Tahun 2008**

No.	Agama	Pemeluk (orang)	Tempat Ibadah
1.	Islam	1.573.082	7671
2.	Kristen	14.985	84
3.	Katolik	8.898	14
4.	Hindu	1.448	1
5.	Budha	2.683	20
6.	Konghucu	3.885	3

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas, 2008

Meskipun jumlah sarana peribadatan cukup banyak, namun masih terdapat permasalahan yang potensial muncul, yaitu kecenderungan perkembangan perbedaan pandangan hidup dan perbedaan keyakinan yang melemahkan kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

#### **8. Pemuda Dan Olahraga**

Aktivitas pembinaan olah raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kebanggaan daerah yang selama ini telah relatif diperhitungkan dalam kancah olah raga tingkat regional maupun nasional. Pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) XV tahun 2000 di Surabaya atlet Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Kontingen Jawa Tengah telah berhasil menyumbangkan medali. Demikian pula pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Surakarta pada tahun 2009, Kabupaten Banyumas berhasil mencapai juara III dengan mengumpulkan 61 medali emas, 39 medali perak dan 61 medali perunggu. Dalam rangka meningkatkan sportifitas jiwa dan kesehatan raga, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan

mengoptimalkan pemanfaatan sarana olahraga Stadion atau GOR Satria baik bagi anak didik maupun masyarakat luas. Sehingga diharapkan peningkatan kegemaran berolahraga dari berbagai cabang olah raga dapat diperlombakan di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Pemberdayaan generasi muda melalui Karang Taruna dalam rangka mewujudkan kualitas dan melembaganya Karang Taruna yang berperan aktif dalam membantu menangani kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) oleh pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Jumlah Karang Taruna di Kabupaten Banyumas adalah 331 unit pada tahun 2007 dan tetap berjumlah 331 unit pada tahun 2009. Kondisi Karang Taruna sesuai dengan kriteria klasifikasi strata Karang Taruna pada tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.65.**  
**Klasifikasi Karang Taruna Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2008**

No.	Klasifikasi	Tahun		
		2007	2008	2009
1.	Tumbuh	316	294	265
2.	Berkembang	11	31	58
3.	Maju	2	4	5
4.	Percontohan	2	2	3

Sumber : Dinsosnakertrans, 2009

Peran pemuda sebagai tenaga kerja produktif juga perlu diperhatikan dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan modal kerja sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Langkah ini sangat penting karena lebih lanjut dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas.



Permasalahan umum dalam bidang kepemudaan dan olah raga adalah belum optimalnya manajemen keolahragaan, kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga serta belum optimalnya kegiatan dan peran serta kepemudaan.

## 9. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan supra-struktur sekaligus infra-struktur yang meliputi optimalisasi kinerja kognitif, afektif, dan psikomotorik manusia. Sebab, kebudayaan adalah jaringan makna yang dirajut oleh manusia dalam hidupnya. Segala macam nilai yang dimaknai sebagai hal penting dalam kehidupan manusia, masuk ke dalam koridor kebudayaan; sistem ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem kepercayaan, sistem sosial dan lain-lain. Semua itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan setiap kelompok masyarakat dalam menyikapi diri dan lingkungan mereka dalam wacana proses kebudayaan.

Proses kebudayaan ini senantiasa berlangsung tanpa henti seiring dengan geliat kehidupan masyarakat pendukungnya. Berbagai ragam kebudayaan yang ada setiap saat berpeluang mengalami fluktuasi dan perubahan dalam perkembangannya. Pada suatu saat berkembang pesat sebagai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, sementara pada saat yang lain memungkinkan terjadi kemunduran dan atau pemudaran sebagai akibat dari kepentingan masyarakat yang bersangkutan serta masuknya arus kebudayaan lain yang menjadikan kebudayaan tersebut terpinggirkan.

Fluktuasi dan perubahan kebudayaan telah menjadi fakta yang tidak dapat disangkal, mengingat dalam prosesnya, berbagai ragam kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain melalui cultural encounter (pertemuan budaya) yang memungkinkan terjadinya asimilasi budaya, adaptasi budaya, hingga imposisi budaya.

Pelaksanaan Pembangunan sektor Kebudayaan Lokal Banyumas mengacu pada elemen-elemen kebudayaan yang saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kesejarahan, (2) nilai tradisional, (3) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) kesenian, (5) permuseuman, (6) kepurbakalaan, (7) kebahasaan, dan (8) kesastraan.

Di Kabupaten Banyumas sampai sekarang terdapat 42 (empat puluh dua) jenis kesenian dalam realisasi kegiatan yang melibatkan aspek-aspek jenis kesenian tersebut di atas dilaksanakan melalui empat cara, yaitu: (1) penggalian, (2) pelestarian, (3) pengembangan, dan (4) pemberdayaan.

Keberadaan situs tahun 2008 sebanyak 54 buah harus dilestarikan dan keberadaannya sampai dengan 2013 agar ditingkatkan menjadi 110 buah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya/situs yang ada di Kabupaten Banyumas dengan cara :

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelestarian benda cagar budaya/situs.



2. Pembuatan papan identitas Benda Cagar Budaya/situs serta pemasangan pagar keliling demi pelestarian dan pengamanan Benda Cagar Budaya/situs.
3. Memberikan insentif kepada juru pelihara Benda Cagar Budaya/situs sesuai kemampuan APBD Kabupaten Banyumas agar juru pelihara memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap tugasnya.
4. Mempromosikan keberadaan Benda Cagar Budaya/situs agar dapat menjadi tempat kunjungan wisata ritual/wisata sejarah/wisata minat khusus agar dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat disekitar Benda Cagar Budaya/situs.

Adapun jenis-jenis kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu :

#### 1. Kuda Kepang /Ebeg

Kuda Kepang/Ebeg adalah seni tari tradisional khas Banyumasan dengan menggunakan properti utama berupa kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu. Tarian ebeg menggambarkan prajurit Prabu Klana Sewandaya yang hendak berangkat perang melawan Panji Asmarabangun. Para pemainnya mengungkapkan kegagahan dan keperwiraan prajurit pilih tanding yang mampu mbabadi rerungkud, anggayuh ingkang tebih, angrangsang ingkang inggil. Di antara mereka terdapat pula tunggangan (kendaraan) berupa singo barong yang digambarkan melalui permainan barongan. Ada pula penthul, tokoh gecul yang selalu menampilkan suasana segar. Ada pula cepet, makhluk menyeramkan yang menggambarkan keangkeran kelompok prajurit

sakti mandraguna. Bagi masyarakat Banyumas, ebeg tidak saja hadir sebagai sarana hiburan. Ebeg juga mengungkapkan nilai-nilai kehidupan yang didasari oleh falsafah masyarakat setempat. Ragam gerak tarian gagah yang hadir pada setiap pertunjukannya, menyiratkan kekuatan kekuatan spirit Banyumas yang didasari oleh pola kehidupan yang terbuka (exposure) dan cablaka (transparan). Pertunjukan ebeg diawali oleh gendhing Eling-eling dan diakhiri gendhing Eling-eling pula. Semua ini memberikan makna mendalam, bahwa dalam kehidupan di dunia, setiap manusia harus senantiasa eling terhadap dari mana asalnya dan kemana akan menuju setelah selesai hidup di dunia. Fenomena mendem atau wuru dalam pertunjukan ebeg menggambarkan bersatunya jagad gedhe (macro cosmos) dan jagad cilik (micro cosmos) pada setiap diri masyarakat Banyumas.

Kesenian Kuda Kepang/Ebeg terdapat hampir di semua Desa wilayah Kabupaten Banyumas, dalam upaya pengembangannya pada tahun 2009 Dinbudpar Kabupaten Banyumas telah menyelenggarakan Festival Kuda Kepang/Ebeg tingkat Kabupaten di Kecamatan Jatilawang di harapkan even Festival ini bisa berlanjut setiap tahun.dalam rangka pengembangan kesenian Kuda Kepang/Ebeg.

#### 2. Cowongan

Cowongan adalah salah satu jenis seni ritual atau upacara minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Banyumas dan sekitarnya. Upacara ritual dilakukan dengan menggunakan media berupa bathok (Tempurung) yang dihias menyerupai wajah seorang



putri dan dilengkapi beberapa sesaji sebagai media untuk bisa melakukan pendekatan atau berkomunikasi dengan alam semesta. Menurut kepercayaan masyarakat Banyumas (petani) permulaan datangnya hujan melalui cowongan bisa mendatangkan Bidadari atau Dewi yang dianggap sebagai lambang kemakmuran, kesuburan dan kesejahteraan.

Di saat Ritual dilaksanakan tidak semua manusia dapat melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu. Manusia hanya dapat melihat ujud wadag uborampe sesaji, boneka cowongan, dan para pelaku cowongan. Dalam garapan pertunjukan cowongan ini, lantunan tembang, syair dan gerak anak manusia menarik perhatian pada alam khayangan. Diantaranya : Alam Bidadari, Dewa-Dewi, Dhanyang-Dhanyang, Jin, Gendruwo, dan Iblis yang ikut hadir dalam ritual upacara cowongan. Karena penghuni alam khayangan menganggap mendapat undangan untuk mengikuti sebuah pesta besar anak manusia di muka bumi. Hadirnya sosok Badadari, Dewa-Dewi, Dhanyang-Dhanyang, Jin dan Gendruwo serta Iblis adalah sebagai hasil daya laku, imajinasi dari penyusun karya cowongan ini. Kesenian Cowongan terdapat di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas, dalam upaya pengembangannya pada tahun 2009 Dinbudpar Kabupaten Banyumas telah mempercayakan kesenian ini sebagai wakil Kabupaten Banyumas untuk mengikuti pawai Budaya tingkat Jawa Tengah di Semarang.

### 3. Gandalia

Gandalia adalah bentuk kesenian yang menggambarkan situasi penggarapan lahan pertanian, dengan diawasi oleh bapak dan ibu tani pemilik lahan dari mulai proses penggarapan tanah yang diawali dengan membajak sawah sampai menanam padi. Setelah tanaman padi tumbuh dan berkembang munculah dewi Sri (dewi yang di percaya sebagai lambang kesuburan penjelmaan padi). Dalam pertumbuhannya tanaman padi mengalami beberapa gangguan hama diantaranya hama yang mudah terlihat seperti "burung", tikus, wereng dan serangga lainnya. Upaya pak tani untuk mengusir hama dilakukan dengan membuat/memasang patung yang menyerupai orang, tetapi masih ada hama lain yang muncul yaitu digambarkan dengan Rajamala (sebagai rajanya hama). Dalam kondisi tanaman padi yang sedang terserang maha didatangkan "tukang sanggah"/pawang padi yang dipercaya bisa mengusir hama. Para petani dalam kondisi lelah setelah bekerja keras di ladang terus menghibur diri dengan menari dan menyanyikan lagu "GANDALIA". Memasuki masa panen tukang sanggah yang diikuti pembawa sesaji "mimitan" (sesaji mengawali panen) dan melantunkan kidung-kidung tolak "bala". Sebagai tanda syukur setelah panen raya para petani mengadakan pesta panen dengan mengundang kelompok kesenian kuda lumping dan lengger yang di akhiri dengan mengarak padi hasil panen.

Kesenian Gandalia satu-satunya kesenian yang terdapat di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo dalam upaya pengembangannya pada tahun 2009 Dinbudpar Kabupaten Banyumas telah mempercayakan kesenian



ini sebagai duta seni Kabupaten Banyumas pentas di TMII Jakarta.

#### 4. Jemblung

Jemblung adalah seni tutur tradisional yang dalam setiap pementasannya tanpa menggunakan properti apapun dan bermain seperti halnya sandiwara Kethoprak. Menurut masyarakat setempat, kata Jemblung merupakan penggabungan dua kata menjadi kata bentukan baru (Jw. :jarwo dhosok) yang berbunyi : Jenjem-jenjeme wong gemblung (rasa tentram yang dirasakan oleh orang gila). Pengertian ini muncul dari tradisi pementasan Jemblung yang menempatkan para pemain layaknya orang gila. Jalinan musik yang ditampilkan adalah transformasi bunyi gamelan Jawa yang disajikan dengan menggunakan mulut (oral). Suara-suara atau bunyi alat gamelan ditransformasikan ke dalam suara manusia / pemain jemblung. Dalam pertunjukannya pemain jemblung duduk di kursi menghadap sebuah meja yang di atasnya telah tersaji nasi tumpeng dan jajan pasar yang menjadi properti pementasan. Cerita yang diambil biasanya dari kisah-kisah babad, legenda, atau cerita rakyat yang adegannya diplot seperti halnya plotting cerita pada pertunjukan kethoprak. Jemblung masih tumbuh dan berkembang di Kecamatan Tambak dan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Teater tutur adalah bentuk ungkapan berkesenian dengan cara bercerita, menyampaikan cerita atau menuturkan cerita dengan disertai nyanyian (Jw. : tembang, ditembangna). Pada awalnya dilakukan oleh 1 (satu) orang kemudian dalam perkembangannya dinyanyikan oleh beberapa orang secara bergantian dan tanpa iringan musik.

Tapi kemudian diiringi oleh musik tradisi. Untuk daerah Jawa iringannya berupa suling, kecapi, siter, atau terbang. Jemblung merupakan salah satu jenis teater tutur yang unik dan khas Banyumas. Keunikan tersebut dapat dilihat bahwa pada pementasannya jemblung tidak menggunakan musik pengiring tetapi pemainnya mengandalkan suara (vokal) sebagai musik pengiring. Para pemain Jemblung bukan saja bermain sebagai tokoh, namun juga merangkap sebagai bunyi alat musik yang mereka inginkan. Di Kabupaten Banyumas terdapat suatu tradisi apabila seseorang melahirkan bayi maka akan diadakan acara yang disebut *Nguyen / Muyen* (Jw. : *Nemu Bayen*) yaitu suatu bentuk tirakatan pada malam hari bersama sanak keluarga dan tetangga dekat semalam suntuk sampai menjelang subuh. Di dalam *nguyen / muyen* tersebut sering diadakan acara macapatan dari salah seorang peserta *nguyen/muyen*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah rasa kantuk dan mengusir makhluk halus yang akan mengganggu bayi yang baru lahir atau ibunya yang baru melahirkan. Macapatan adalah kegiatan menyampaikan sastra lisan dalam bentuk tembang atau nyanyian. Macapatan berkembang menjadi *Maca Kandha*, kemudian berkembang menjadi Jemblung. Cerita-cerita yang ditampilkan biasanya mengambil cerita Menak atau Golek Menak atau yang sering disebut Babad Menak - Serat Menak. Cerita yang sangat populer adalah cerita Wong Agung Menak. Kesenian jemblung sampai saat ini masih sangat digemari oleh masyarakat terutama di daerah Kecamatan Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Karena pertunjukan jemblung mudah diselenggarakan,



biaya murah, dan tidak membutuhkan banyak tempat, dengan kata lain lebih praktis dan ekonomis. Orang Banyumas mengatakan "Jemblung kuwe salah sawijineng kesenian sing murah, praktis (nglemprak tur atis), dhasare wonge ora akeh dadi ora kakehan panggonan dadi gampang open-openane tur ora kakehan bregudenge. Gampangane ora kakehan wragad".

#### 5. Calung dan Lengger

Calung dan Lengger adalah salah satu bentuk kesenian rakyat yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam penyajiannya, lengger selalu diiringi oleh seperangkat instrumen bambu yang lazim disebut sebagai calung. Dalam perkembangannya, Lengger ini berfungsi sebagai tari penyambut tamu baik tamu kenegaraan maupun tamu-tamu yang lain.

Kesenian ini berkembang di tengah kehidupan masyarakat pedesaan yang berbasis kehidupan tradisional agraris. Sebagai bentuk seni rakyat, lengger dipengaruhi oleh budaya kerakyatan yang berciri sederhana, semangat kebersamaan dan egaliter. Bagi masyarakat Banyumas, istilah Lengger merupakan "jarwo dhosok" yang berarti : "diarani leng jebulane jengger" (dikira lubang ternyata jengger/mahkota ayam jantan). "Leng" (lubang) adalah simbolisasi dari gender wanita, sedangkan "Jengger" adalah simbolisasi dari gender pria.

Kesenian Lengger hampir terdapat di semua Kecamatan dalam upaya pengembangannya pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan

PT. FATMABA Ajibarang akan menyelenggarakan Festival Calung dan Lengger pada tanggal 9 - 10 Januari 2010 di Fatmaba Ajibarang.

#### 6. Begalan

Begalan adalah salah satu ciri khas yang ada pada upacara adat Penganten Banyumas yang di dalamnya termuat nasehat kepada kedua mempelai yang disampaikan secara simbolis dan divisualisasikan dalam bentuk fragmen drama tari oleh dua orang pemain. Satu orang memerankan diri sebagai utusan pihak penganten pria yang membawa "brenong kepang" (alat-alat rumah tangga bekal kedua mempelai), sedangkan pemain lain bertugas sebagai utusan pihak keluarga penganten wanita yang bertugas "mbegal bajang sawane kaki penganten - nini penganten". Kesenian Begalan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas sebaran kesenian ini terutama di wilayah Eks Kawedanan Sokaraja Purwokerto dan Banyumas.

#### 7. Hadroh

Kesenian Hadroh adalah salah satu kesenian Islami yang merupakan bentuk seni pertunjukan ritual keagamaan (agama Islam) dan sering dipentaskan menjelang acara pengajian baik itu pengajian hari-hari besar agama Islam maupun acara seremonial yang sifatnya keagamaan. Kesenian ini terdapat di semua Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 - 20 Nopember 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah mengadakan Festival Hadroh dalam acara Banyumas EXPO di GOR Satria Purwokerto. Untuk pengembangan ke depan kalau bisa minimal setiap dua tahun diadakan Festival.



#### 8. Macapat

Kesenian Macapatan adalah bentuk seni suara/tembang yang isinya menyampaikan sastra lisan/babad dalam bentuk tembang atau nyanyian berisi tentang penjabaran ajaran kebaikan manusia dalam kehidupan yang isinya antara lain piwulang (Ajaran), pepeling (mengingat), pangajak (mengajak), pamuji (memuja). Kesenian ini terdapat di semua Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 - 20 Nopember 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah mengadakan Festival Macapat dalam acara Banyumas EXPO di GOR Satria Purwokerto. Untuk pengembangan ke depan kalau bisa minimal setiap dua tahun diadakan Festival.

#### 9. Rinding

Kesenian Rinding adalah bentuk seni musik tradisional pentatonis Jawa yang dihasilkan dari suara bambu yang di tiup seperti harmonika (alat musik pentatonis) yang isinya tentang tembang Jawa semacam Macapat yang ada pada cerita babad/sastra lisan yang berkembang di masyarakat. Kesenian ini hanya terdapat di Desa Telaga di Kecamatan Gumelar.

#### 10. Sintren

Kesenian Sintren adalah bentuk seni pertunjukan yang diawali dengan ritual seorang penari putri yang masih suci membawa alat berupa pakaian dan rias dalam kondisi mata tertutup dan tangan diikat dimasukkan dalam kurungan ayam yang sempit dan tertutup. Sambil menunggu keluarnya putri setelah selesai berbusana dan rias para pengiring (niaga)

menyanyikan tembang-tembang pujian yang dipercaya isinya terkandung unsur magic. Setelah selesai berdandan sintren mulai membawakan tarian yang diiringi oleh sekelompok penyanyi (mlandang) dengan lagu-lagu khusus iringan sintren, kesenian ini hanya terdapat di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir.

Permasalahan dalam kebudayaan umumnya adalah kondisi penanganan kebudayaan yang selama ini masih belum optimal, Melemahnya ketahanan budaya lokal dan terjadinya pergeseran nilai budaya akibat masuknya budaya asing. Tuntutan masyarakat seni budaya Kabupaten Banyumas agar budaya asli menjadi primadona harus diwujudkan dalam lima tahun kedepan, sehingga sektor budaya mampu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pelestari budaya.

#### D. Prasarana Dan Sarana Daerah

Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakannya secara maksimal. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, air bersih dan listrik. Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain meningkatnya permintaan perumahan, menurunnya pelayanan transportasi dan peningkatan permintaan tenaga listrik dan air bersih.



1. Prasarana dan Sarana Transportasi, Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi  
Prasarana dan Sarana Transportasi Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada penambahan dan pelebaran jalan serta pembangunan jalan-jalan penghubung antara satu daerah kecamatan dengan daerah kecamatan lainnya dilingkungan Kabupaten Banyumas. Hal ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan sehingga mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas.  
Berdasarkan status jalan, panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Banyumas mencapai 4.459,47 Km yang terbagi atas jalan nasional 181,24 Km, jalan provinsi 32,10 Km, jalan kabupaten 804,78 Km dan jalan desa/kelurahan 3.441,15 km.

**Tabel 2.66.**

**Data Kondisi Jalan menurut Kewenangan Jalan Tahun 2004-2008**

NO	Kewenangan dan Kondisi	TAHUN (Km)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	<b>JALAN NEGARA</b>					
	Mantap	70,90	70,90	139,49	141,26	9,538
	Sedang	59,35	59,35	59,35	57,58	-
	Tidak Mantap	-	-	-	-	171,698
2.	<b>JALAN PROPINSI</b>					
	Mantap	-	27,6	-	-	-
	Sedang	-	53,18	32,10	32,10	26,914
	Tidak Mantap	-	2,20	-	-	5,188
3.	<b>JALAN KABUPATEN</b>					
	Mantap	222,5	273,48	362,15	401,86	358,67
	Sedang	218,55	213,98	188,64	271,56	238,29
	Tidak Mantap	363,72	317,32	253,99	131,36	207,82

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2006 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang pada tahun 2005 sebesar 60,57% menunjukkan kenaikan menjadi sebesar 68,44% pada tahun 2006. Sedangkan untuk ruas jalan kabupaten kondisi rusak dan rusak berat mengalami penurunan dari 39,43% pada tahun 2005 menjadi 31,56% di tahun 2006. Pada tahun 2007 ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang menjadi sebesar 83,67% atau 673,42 Km dan kondisi rusak dan rusak berat menjadi 16,32% atau 131,36 Km. Pada tahun 2008 ruas jalan kabupaten kondisi baik dan sedang menjadi sebesar 74,18% atau 596,96 Km dan kondisi rusak dan rusak berat menjadi 25,82% atau 207,82 Km.

Selain jalan kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten terdapat juga jalan lingkungan. Jalan lingkungan tersebut menjadi kewenangan pemerintah desa. Data panjang jalan berdasarkan jenis lapis permukaan (konstruksi jalan) dapat dilihat pada tabel 2.67. Data jalan tersebut merupakan akumulasi dari jalan kewenangan nasional, provinsi, kabupaten dan jalan lingkungan kewenangan desa. Kondisi jalan beraspal dan hotmix di Kabupaten Banyumas pada akhir tahun adalah sepanjang 2.644,09 km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan dengan kondisi kerikil sepanjang 430,02 km dan dalam kondisi masih tanah sepanjang 790,84 km.



Kondisi ini masih perlu penanganan atau pemeliharaan sehingga jalan menjadi lebih mantap. Disamping itu perlu peningkatan akses jalan menuju pusat-pusat perekonomian, industri, wisata dan pusat pengembangan wilayah. Untuk kondisi jembatan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, maka pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas jembatan yang ada.

**Tabel 2.67.**  
**Data Panjang Jalan, Kelas Jalan dan Jembatan**  
**Tahun 2003 - 2007**

No.	Kondisi	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
Kelas Jalan						
1.	Aspal	2.115,51	2.115,51	2.180,29	2.211,49	2.284,27
2.	Hotmix	324,09	324,09	344,87	344,87	359,82
3.	Berbatu	649,34	649,34	649,34	637,28	594,53
4.	Kerikil	449,30	449,30	449,30	442,73	430,02
5.	Tanah	184,70	184,70	916,20	910,94	790,84
	Jumlah	3.722,94	3.722,94	4.540,00	4.547,31	4.459,48
Jembatan						
1.	Panjang	2.632	2.707	2.707	2.857	2.857
2.	Jumlah	347	348	348	351	351

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2005 mengalami penurunan sebanyak 8.894 unit dan pada tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan sebanyak 30.122 unit, baik kendaraan roda dua, roda lima atau lebih. Dengan jumlah panjang jalan di Kabupaten Banyumas 4.459,47 Km. Rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2006 adalah 0,031.

**Tabel 2.68.**  
**Jumlah Kendaraan di Kabupaten Banyumas Tahun 2004-2008**

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Perubahan
1.	2004	141.229	16.683
2.	2005	132.335	(8.894)
3.	2006	178.107	45.772
4.	2007	147.985	(30.122)
5.	2008	220.678	72.693

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan perhubungan antara lain adalah belum optimalnya pengelolaan prasarana jalan dan jembatan, masih rendahnya jumlah jalan dan jembatan yang mantap, masih rendahnya kapasitas jalan serta masih kurangnya pemenuhan kebutuhan trayek angkutan umum di Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2008, berdasarkan survei dan pendataan, kebutuhan trayek angkutan umum di Kabupaten Banyumas sebanyak 638 jaringan trayek dan baru dipenuhi sekitar 85%, sehingga pemenuhan kebutuhan akan trayek angkutan ini masih perlu dioptimalkan kembali.

Permasalahan yang lain di sektor perhubungan adalah masih adanya 14 titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas yang terdapat di Pekuncen, Lumbir, Wangon, Ajibarang, Cilongok, Kemranjen, Tambak, Buntu, Krumpit (Banyumas), Jalan Suparjo Rustam, Jl Gerilya, Sangkalputung (Sokaraja), Rempoah (Baturaden) dan Sidabowa, hal ini diakibatkan oleh kondisi geometrik jalan yang ada.

Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah lewat media



massa dapat diwujudkan dengan membangkitkan komunikasi sebagai wahana saling memberikan informasi. Untuk itu perlu adanya kemudahan akses informasi yang valid bagi masyarakat, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutuhkan informasi dan media yang memberitakan. Hal tersebut lebih jauh juga dapat meningkatkan kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik.

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Perkembangan teknologi informatika yang bergerak dinamis mempunyai peran yang sangat strategis karena dapat menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi.

Sarana Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi menjadi bagian dari perkembangan teknologi informatika dimaksud. Pembangunan dan perkembangannya di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Banyumas menunjukkan gejala peningkatan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang harus diakui telah sampai ke pelosok perdesaan, pada sisi lain menurunkan minat pengguna wartel sebagai salah satu sarana komunikasi yang pada saat itu sangat diminati. Dampaknya adalah banyak wartel yang tidak lagi dioperasikan, namun pertumbuhan warnet cenderung meningkat.

Untuk jasa pos khususnya pengiriman paket/barang masih cukup diminati sehingga di beberapa wilayah kecamatan ditemukan beberapa Jasa Titipan/Paket.

Khusus untuk pembangunan tower seluler kiranya perlu penyikapan secara tepat, mengingat pada prinsipnya semestinya pembangunannya yang harus mengutamakan jaminan keamanan maupun keselamatan juga tata ruang yang ada. Di banyak daerah, pembangunan tower menuai banyak masalah karena seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang semestinya ditepati namun menjadi terabaikan karena pertimbangan kepentingan bisnis.

Kemudahan dalam komunikasi dan informatika juga diperlukan oleh pemerintah secara menyeluruh. Untuk itu perlu adanya layanan informasi cepat dan akurat berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah serta kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah digunakan adalah jaringan intranet maupun internet sebagai bagian dari pengembangan e-government (E-Gov) yang menghubungkan semua unit pemerintah. Blue print E-Gov Kabupaten Banyumas yang telah disusun mengarahkan pembangunan E-Gov dalam 5 tahapan pembangunan selama 5 tahun yaitu diawali pada tahun 2005. Tahapan pembangunan dikelompokkan dalam tiga aspek pembangunan : Aspek Infrastruktur; Aspek Pembangunan SDM dan Aspek Pembangunan Sistem Informasi.



dan komunikasi pada satuan kerja (terutama yang jauh lokasinya dari pusat kota), masih terbatasnya akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah, terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah serta terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.

## 2. Prasarana dan Sarana Pengairan

Prasarana pengairan atau irigasi merupakan prasarana yang penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Banyumas. Kewenangan pengelolaan daerah irigasi (DI) di Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2008 dikelompokkan dalam kategori:

- DI dengan luas areal > 3.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terdapat 2 DI yaitu DI Serayu dan DI Tajum dengan luas areal potensial seluas 6.276,96 Ha dan luas areal fungsional seluas 5.564,38 Ha.
- DI dengan luas areal antara 1.000 Ha s/d 3.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (DI lintas kabupaten) terdapat 5 DI yaitu DI Banjaran, DI Andongbang, DI Kedunglimus Arca, DI Kebasen, dan DI Kalisapi dengan luas areal potensial seluas 4.378,34 Ha dan dengan luas areal fungsional seluas 4.260,99 Ha.
- DI dengan luas areal dibawah 1.000 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibagi menjadi 2 yaitu DI pemerintah meliputi 91 DI dengan dengan luas areal potensial

seluas 8.519,09 dan luas areal fungsional seluas 8.353,57 Ha.

- DI Perdesaan meliputi 370 DI dengan luas areal potensial seluas 9.837,66 Ha dan luas areal fungsional seluas 8.814,67 Ha.

Atas dasar hal tersebut di atas, jumlah DI di Kabupaten Banyumas sebanyak 466 DI dengan luas areal potensial seluas 28.320,47 dan luas areal fungsionalnya mencapai 26.334,98 Ha. Lahan pertanian yang masih cukup luas di Kabupaten Banyumas, perlu dukungan pengairan yang baik. Fungsi irigasi sangat diperlukan mengingat daya dukungnya untuk menunjang penyediaan bahan pangan. Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.

Untuk lahan sawah di Kabupaten Banyumas, dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam hal luas arealnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas yang setiap tahunnya membutuhkan ruang untuk pelayanan hidupnya. Pada tahun 2004 luas sawah di Kabupaten Banyumas sebesar 32.784 Ha, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 32.219 Ha.



**Tabel 2.69.**  
**Data Luas Sawah**  
**di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Teknis (Ha)	Non-teknis (Ha)	Sederhana (Ha)
1.	2004	32.784	10.509	12.131	10.144
2.	2005	32.770	10.505	12.138	10.12
3.	2006	32.668	10.313	12.352	9.975
4.	2007	32.226	10.608	11.156	10.462
5.	2008	32.219	10.650	10.760	10.809

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

Untuk persentase kondisi bangunan irigasi dalam keadaan baik, dari tahun 2004 sampai dengan 2008 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.70 sebagai berikut.

**Tabel 2.70.**  
**Data Jumlah Bangunan Irigasi**  
**di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008**

	Tahun	Jumlah Bangunan Irigasi	Bangunan Irigasi Dalam Keadaan Baik	Rasio Bangunan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)
1.	2004	617.132	205.528	33,30
2.	2005	617.132	216.810	35,13
3.	2006	617.132	220.123	35,66
4.	2007	617.132	222.408	36,03
5.	2008	617.132	224.815	36,42

Sumber : Dinas SDABM Kabupaten Banyumas, 2008.

### 3. Perumahan

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyediakan sarana perumahan yang layak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan, misalnya mengembangkan pola kemitraan dengan pihak pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan

perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke atas sudah dilakukan oleh pengembang swasta. Dilihat dari jenis dindingnya, sebagian besar rumah di Kabupaten Banyumas telah menggunakan dinding tembok atau berupa gedung dan sebagian gedung, yaitu sebanyak 205.684 unit (57%). Sedangkan yang masih menggunakan dinding kayu dan bambu adalah sebanyak 152.423 (43%), dimana rumah yang tidak layak huni berjumlah 37.659 rumah.

Permasalahan pokok perumahan dan permukiman adalah semakin terbatasnya lahan yang tersedia karena pertumbuhan rumah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan hunian yang layak. Pada tahun 2008 rasio rumah layak huni sebesar 70,58 %, ini meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTH) dari Kapermas dan PKP dari Menpera.

**Tabel 2.71.**  
**Data Jumlah Rumah Tempat Tinggal menurut dindingnya**  
**di Kabupaten Banyumas Tahun 2005**

No.	Jenis Dinding	Jumlah	Persentase
1.	Gedung	160.045	44
2.	Sebagian Gedung	45.639	13
3.	Kayu	86.041	24
4.	Bambu	66.382	19

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008



Permasalahan lain dalam hal perumahan dan permukiman adalah masih rendahnya persentase jumlah bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada tahun 2008 saja jumlah bangunan yang telah memiliki IMB hanya 38.582 buah, atau hanya 9 % dari jumlah keseluruhan bangunan yang ada di Kabupaten Banyumas yang mencapai 428.689. Untuk meningkatkan jumlah bangunan yang memiliki IMB perlu adanya sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang intensif dari Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait.

Ruang terbuka hijau dan penerangan jalan merupakan salah satu aspek yang erat kaitannya dengan perumahan. Beberapa ruang terbuka hijau di Kabupaten Banyumas dikelola oleh berbagai lembaga atau unit pengelola, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan lain-lain. Ruang terbuka hijau tersebut berupa taman kota, alun-alun, hutan kota, taman rekreasi, lapangan dan GOR. Beberapa taman kota yang ada di kota Purwokerto, antara lain adalah Taman Satria I di Kelurahan Berkoh dengan luas 8.900m<sup>2</sup>, Taman Satria II di Jl. A Yani dengan luas lebih kurang 212,5 m<sup>2</sup>, Taman Satria III yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman dengan luas lebih kurang 170 m<sup>2</sup>, dan beberapa taman lain yang tersebar di seputar wilayah kota Purwokerto.

Penerangan jalan umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, dengan jumlah yang relatif terus bertambah. Jumlah LPJU berijin, terus mengalami peningkatan, demikian juga jumlah LPJU tidak berijin, kecuali pada tahun 2006, terjadi penurunan jumlah LPJU tidak berijin sebanyak 1.286 titik.

**Tabel 2.72.**  
**Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Berijin	Tidak Berijin	Jumlah
1.	2004	4.087	8.160	12.247
2.	2005	4.202	8.160	12.362
3.	2006	4.467	6.874	11.341
4.	2007	4.643	6.874	11.517
5.	2008	4.697	6.874	11.571

Sumber : Dinas ESDM Kab. Banyumas, 2008

Permasalahan pertamanan dan penerangan jalan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perawatan taman, terbatasnya titik penerangan jalan umum dan pemeliharaan oleh masyarakat serta keterbatasan jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang terbuka adalah seluruh luasan yang tidak tertutup oleh bangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang luas minimal RTH adalah 30% luas kawasan perkotaan. Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Banyumas, akan sangat berpengaruh pada kondisi luasan lahan ruang terbuka terutama pada wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan lahan untuk bangunan baik untuk hunian, kantor, sekolah, pabrik dan lain - lain meningkat pula.

Keluarnya Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut daerah untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang yang ada baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan - Kawasan Perkotaan



disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007, sehingga seluruh produk Tata Ruang yang ada perlu dilakukan Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang.

#### 4. Pasar

Pasar merupakan tempat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ketersediaan pasar beserta sarana dan prasarana yang cukup memadai akan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Saat ini di Kabupaten Banyumas terdapat berbagai berbentuk pasar, baik yang lokal, tradisional maupun pasar modern. Hingga tahun 2007, jumlah pasar modern yang terdiri dari pasar swalayan dan plaza adalah sebanyak 22 unit, Sedangkan pasar lokal sebanyak 122 unit dan pasar tradisional 21 unit yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Pasar tradisional tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Dewasa ini keberadaan pasar tradisional mendapat persaingan dengan hadirnya pasar-pasar modern. Dilihat dari manfaatnya, keberadaan pasar tradisional sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di desa-desa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pedagang kecil yang meramaikan pasar tradisional dan memasarkan hasil-hasil potensi daerah.

Saat ini hampir di seluruh daerah mengalami hal yang sama, dalam penanganan keberadaan pasar tradisional yang mulai terdesak oleh pasar modern (supermarket, hipermarket). Mengingat pentingnya peran pasar tradisional dalam mendukung perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah

perlu mempertahankan dan mendukung keberadaan pasar tradisional dengan melaksanakan pembinaan dan penataan yang baik terhadap pasar-pasar tradisional yang ada. Selain itu, seyogyanya di Kabupaten Banyumas dibuat suatu regulasi yang mengatur keberadaan pasar modern. Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan lebih banyak muncul pasar-pasar modern baru. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas adalah karena kondisinya yang masih terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik.

**Tabel 2.73.**  
**Data Pasar Di Kabupaten Banyumas**

No.	Keterangan	Unit	Jumlah Pedagang
1.	Kios	1.434	1.354
2.	Ruko	114	114
3.	Lo s	470	5.513
4.	Lesehan	-	959

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008

#### 5. Jaringan Air Bersih

Cakupan pelayanan air minum Kabupaten Banyumas di wilayah perdesaan maupun perkotaan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Saat ini pelayanan air bersih telah dilakukan terhadap beberapa jenis pelanggan, mulai dari rumah tangga, bisnis, tempat peribadatan, instansi pemerintah, dan lain-lain. Mengingat kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas, maka



peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan. Kebutuhan air bersih pada masa mendatang menjadi tanggung jawab dan perhatian pemerintah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum sebagai kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat dan bersih.

Sedangkan cakupan air bersih di daerah pedesaan tahun 2007 sebesar 62,16 % terdiri dari sumur gali, perpipaan, sumur dalam, perlindungan mata air, hidran umum dan kran umum.

Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan air bersih adalah masih banyak penduduk atau rumah tangga yang belum mendapatkan air bersih dan masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih, terutama pada musim kemarau yang berdampak terhadap penghentian penyaluran air secara bergilir di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas.

**Tabel 2.74.**

**Cakupan Air Bersih Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008**

No.	Tahun	Perkotaan (KK)	Perdesaan (KK)
1.	2004	35.419	236.921
2.	2005	37.006	236.445
3.	2006	37.902	236.660
4.	2007	39.486	236.864
5.	2008	41.691	238.361

Sumber : AMPL Kab. Banyumas, 2009

## 6. Persampahan, Sanitasi dan Drainase

Persampahan di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah perkotaan dikelola oleh pemerintah, sedangkan di wilayah pedesaan umumnya lebih banyak dikelola oleh masyarakat sendiri. Volume sampah perkotaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktifitas masyarakat. Untuk itu pemerintah telah menambah berbagai sarana kebersihan, baik berupa gerobak sampah, kontainer, truck kontainer, drum truck, dan sebagainya. Jumlah sampah terangkut pada tahun 2006 turun drastis, karena data tahun tersebut hanya menunjukkan data sampah terangkut di wilayah perkotaan saja. Permasalahan persampahan yang utamanya terjadi di wilayah perkotaan antara lain adalah berkaitan dengan masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan, bertambahnya volume sampah dan belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan.

**Tabel 2.75.**

**Perkembangan Persampahan Tahun 2004 - 2008**

No.	Kondisi	Tahun				
			2005	2006	2007	2008
1.	Volum sampah/hari (m <sup>3</sup> )	600	650	556	562	579
2.	Sampah terangkut (m <sup>3</sup> )	535	590	282	282	300
3.	Daerah Pelayanan (Ha)	3.858	3.858	4.722	4.722	4.722
4.	TPA (buah)	4	4	4	4	4

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2007/2008



Kondisi sanitasi di wilayah Kabupaten Banyumas menunjukkan sudah tersedia sarana sanitasi yang mendukung kegiatan penduduk, terutama sudah adanya jamban keluarga yang disediakan sendiri namun penyediaan sarana jamban keluarga masih kurang melayani seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas dan baru melayani 50% penduduk Kabupaten Banyumas. Berdasarkan kondisi eksisting, tingkat sanitasi penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dikategorikan rendah. Hal tersebut diperkuat dengan minimnya sarana sanitasi dan masih belum tersedianya prasarana air limbah yang memadai dengan tidak dalam satu saluran dengan prasarana drainase.

Kondisi sarana dan prasarana drainase secara umum belum terlayani secara optimal di Kabupaten Banyumas, baik berupa fisik maupun kondisi jaringan. Permasalahan drainase di Kabupaten Banyumas merupakan permasalahan yang cukup serius, terutama bagi Kota Purwokerto sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Kabupaten Banyumas dari 140.000 m panjang drainase baru 60.000 m panjang drainase yang kondisinya baik.

Kota Purwokerto berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang di dalamnya terdapat beberapa anak sungai Serayu antara lain: Kali Jengok, Kali Bogor, Kali Banjaran yang terletak di sebelah barat kota, sedangkan Kali Kranji, Kali Pelus dan Kali Bakal di sebelah timur kota.

Sistem drainase Kota Purwokerto yang berfungsi sebagai saluran drainase makro terutama adalah sungai-sungai tersebut.

Aliran sungai membelah kota dari arah Utara ke Selatan dan selanjutnya bermuara di sungai Serayu.

#### 7. Jaringan Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Banyumas, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Empat tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Banyumas meningkat tajam dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.76.**

**Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Tahun 2005 - 2008**

No.	Tahun	Jumlah RT	Jumlah Pelanggan	Ratio Elektrifikasi (%)
1.	2005	379.374	238605	62,89
2.	2006	388.004	252.910	65,18
3.	2007	396269	269.820	68,09
4.	2008	400.280	276.682	69,87

Sumber: Dinas ESDM Kab. Banyumas, 2008

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2005, jumlah pelanggan sebesar 238.605 unit meningkat menjadi 276.682 unit pada tahun 2008. Sedangkan rasio elektrifikasi juga menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari 62,8% pada tahun 2005 menjadi 69,87% pada tahun 2008. Permasalahan umum yang muncul adalah masih terdapatnya wilayah yang belum terjangkau listrik dan masih terbatasnya sumber-sumber energi alternatif.

#### E. Pemerintahan Umum

Sejak dicanangkannya Kabupaten Banyumas sebagai percontohan otonomi daerah pada tahun 1995, telah memberikan perubahan dalam bidang penyelenggaraan



pemerintahan, pembangunan maupun bidang kemasyarakatan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (public service), pemberdayaan masyarakat, kemandirian daerah dan memajukan perekonomian daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai aparat pemerintah dalam melayani masyarakat diharapkan lebih dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan prima secara nyata, walaupun hal tersebut belum terpenuhi.

#### 1. Aparatur Pemerintahan

Otonomi menuntut aparat Pemerintah Daerah untuk lebih profesional dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Untuk itu, aparat pemerintah selaku pelayan rakyat harus memiliki kapabilitas yang memadai dalam menjalankan roda pemerintahan. Jumlah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas sampai tahun 2008 sebanyak 16.088 orang dengan berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan. Sebagian besar PNS memiliki tingkat pendidikan SLTA, Diploma 2, Diploma 3 dan Strata 1. Untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai pemerintahan tersebut, maka dalam perekrutan pegawai di masa depan sebaiknya diusahakan berasal dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pegawai juga harus diseleksi berdasarkan kapabilitasnya dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Jadi, tidak hanya berdasar kecerdasan spiritual, namun juga kecerdasan emosional, bahkan juga perlu memiliki kecerdasan spiritual.

**Tabel 2.77.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2003 - 2008**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
			2005	2006	2007	2008
1.	SD	782	649	553	474	637
2.	SLTP	722	679	644	644	835
3.	SLTA	4.252	3.656	3.108	2910	3.337
4.	D1	208	341	357	362	424
5.	D2	3.812	4.042	4.060	3.945	3.267
6.	D3	1.185	1.046	1.049	1.051	995
7.	S1	3.750	4.190	4.483	4.720	6.242
8.	S2	158	235	271	306	351
<b>JUMLAH</b>		<b>14.94</b>	<b>14.881</b>	<b>14.560</b>	<b>14.412</b>	<b>16.088</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banyumas, 2008

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme PNS maka penempatan PNS akan mempertimbangkan keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Pada tahun 2008 terdapat kebutuhan formasi jabatan (terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu) sebanyak 4.885 orang dan baru terpenuhi sebanyak 2.732 orang. Target kebutuhan formasi jabatan tahun 2013 sebanyak 7.285 orang. Pada tahun 2009 jumlah PNS mengalami penambahan, hal ini dikarenakan adanya formasi kebutuhan PNS yang belum terpenuhi dan adanya penambahan kuota alokasi PNS dari Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jumlah PNS di Kabupaten Banyumas sampai dengan bulan Nopember 2009 sebanyak 16.880 orang,



yang terdiri dari PNS Guru sebanyak 9.845 dan Non guru sebanyak 7.037 orang, sedangkan yang menjadi permasalahan umum berkaitan dengan aparatur pemerintahan adalah sistem recruitment aparatur pemerintahan yang kurang memadai, kualitas SDM aparatur belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional, belum optimalnya kualitas penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional serta kurangnya dukungan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kepegawaian.

**Tabel 2.78.**  
**Jenis dan Jumlah Diklat Aparatur**

No.	Jenis Diklat	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
1.	STRUKTURAL						
	Diklatpim Tingkat II	6	2	1	-	10	19
	Diklatpim Tingkat III	26	3	7	24	40	100
	Diklatpim Tingkat IV	14	6	47	6	80	153
2.	FUNGSIONAL	15	29	19	12	23	98
3.	TEKNIS	193	90	62	54	158	557
	<b>JUMLAH</b>	<b>254</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>96</b>	<b>311</b>	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banyumas, 2008

## 2. Keamanan dan Ketertiban Umum

Di era reformasi dan globalisasi dewasa ini, kehidupan masyarakat berubah dengan sangat cepat merambat masuk dalam kehidupan masyarakat kita yang didukung oleh pesatnya sarana prasarana informasi dan transportasi. Kesemuanya ini perlu diantisipasi karena akan berpengaruh pada kondisi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Perkembangan situasi politik dan kebijakan Pemerintah di tingkat pemerintah pusat sering kali berimbas pada eskalasi kerawanan di bidang sosial serta di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban

umum di daerah. Euforia reformasi itu sendiri jika tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan dan perilaku anarki.

Dalam era otonomi daerah, kepada Pemerintah Daerah diberi kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berupaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mencegah terjadinya konflik sosial baik horisontal maupun vertikal, meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat serta penegakan peraturan daerah sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang tenteram, tertib dan aman.

Beberapa contoh hal yang berpengaruh terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban umum antara lain seperti munculnya usaha kaki lima ilegal dengan menggunakan trotoar dan badan jalan, timbulnya bangunan tidak memiliki izin, tempat usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan, reklame liar, kebersihan, tawuran pelajar, peredaran obat-obat terlarang dan minuman keras, perjudian serta masalah orang-orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan dan pekerja seks komersial, masalah unjuk rasa yang mengarah pada pemaksaan kehendak yang di luar koridor hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini perlu dicari solusi pemecahannya yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.



**Tabel 2.79.**  
**Data Pelanggaran Perda Kabupaten Banyumas**  
**Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pelanggaran
1.	2004	54
2.	2005	68
3.	2006	59
4.	2007	78
5.	2008	86

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  
Kab. Banyumas, 2008

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang berkaitan dengan bencana alam maupun kebakaran. Dalam tahun 2006 terjadi beberapa bencana alam, seperti tanah longsor sebanyak 21 kejadian, angin ribut sebanyak 2 kejadian dan banjir 2 kali kejadian. Kemudian pada tahun 2007 tercatat 25 kali bencana tanah longsor dan 5 kali bencana banjir. Pada tahun 2006 terjadi 38 kali bencana kebakaran dan 18 kali pada tahun 2007. Bencana alam seperti tanah longsor terjadi antara lain disebabkan karena perubahan musim yang tidak menentu dan juga turunnya kualitas kawasan hutan lindung akibat kerusakan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban secara umum adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan semakin rendahnya tingkat kepatuhan pada norma dan aturan, kecenderungan terjadinya kerawanan atau konflik sosial, kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan masih rendah, rendahnya kemampuan pencegahan dan penanganan

bencana alam serta semakin besarnya tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Produk Hukum  
Program legislasi daerah yaitu peraturan daerah yang diterbitkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya. Produk hukum di Kabupaten Banyumas terdiri dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati mulai ada sejak tahun 2004 sebagai produk hukum yang bersifat pengaturan (regeling) dan sebelumnya diatur dengan Keputusan Bupati. Tabel berikut ini adalah produk Perda dan Perbup yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

**Tabel 2.80.**  
**Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2004-2008**

No.	Tahun	Perda	Perbup	SK Bupati
1.	2004	35	60	1.810
2.	2005	19	229	680
3.	2006	22	54	1035
4.	2007	6	53	1.782
5.	2008	16	135	787

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab Banyumas, 2008

Produk hukum tahun 2009 yang berupa Peraturan Daerah dapat terealisasi sebanyak 22 buah (baik yang evaluasi, revisi maupun Perda baru) dan Pada tahun 2013 pembuatan Perda ditargetkan 60 buah.

4. Pelayanan Publik  
Pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan mengembangkan dan memperkuat



pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut pelayanan publik yang dilakukan harus dalam berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan publik ini harus disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pada hakikatnya negara didirikan oleh rakyat, sehingga tujuan penyelenggaraan negara tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah diukur secara individual, melainkan kebutuhan yang bersifat kolektif, misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Secara empiris pelayanan publik yang terjadi masih memiliki kecenderungan berbelit-belit, mahal, lambat dan melelahkan. Kondisi ini dipengaruhi karena paradigma pelayanan masih diartikan secara terbalik oleh pihak pemerintah (birokrat), yaitu rakyat (publik) diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Perilaku feodalistik ini karena faktor historis masih kuat mempengaruhi sebagian besar birokrat yang tidak lepas dari latar belakang sejarah berdirinya bangsa ini.

Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta apabila birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Muncul dugaan yang menguat di kalangan pengamat bahwa pemahaman yang lemah akan filosofi pelayanan publik menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol pelayanan publik oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat pelayanan yang lebih profesional, maka setiap SKPD diwajibkan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Banyumas, standar pelayanan masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan telah diterapkan di 99 SKPD, baik Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam konteks penanganan perizinan, kelembagaan penanganan perizinan telah dilakukan oleh BPM (Badan Penanaman Modal), namun kompleksitas dalam berbagai hal tentang perizinan masih memerlukan terobosan-terobosan baru agar pelayanan perizinan bisa lebih efektif dan efisien.

Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, pertambangan, pertanian dan perhubungan) yang telah dicermati lebih mendalam menunjukkan dari sisi dasar hukum perlu dilakukan revisi, dari sisi sistem dan prosedur perlu dikaji kembali tentang bagaimana agar bisa sederhana, dari sisi durasi perlu dibuat standar pelayanan, demikian juga perlu peningkatan penguatan kewenangan kelembagaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Publik Implementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten



pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut pelayanan publik yang dilakukan harus dalam berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan publik ini harus disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pada hakikatnya negara didirikan oleh rakyat, sehingga tujuan penyelenggaraan negara tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah diukur secara individual, melainkan kebutuhan yang bersifat kolektif, misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Secara empiris pelayanan publik yang terjadi masih memiliki kecenderungan berbelit-belit, mahal, lambat dan melelahkan. Kondisi ini dipengaruhi karena paradigma pelayanan masih diartikan secara terbalik oleh pihak pemerintah (birokrat), yaitu rakyat (publik) diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Perilaku feodalistik ini karena faktor historis masih kuat mempengaruhi sebagian besar birokrat yang tidak lepas dari latar belakang sejarah berdirinya bangsa ini.

Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta apabila birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Muncul dugaan yang menguat di kalangan pengamat bahwa pemahaman yang lemah akan filosofi pelayanan publik menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol pelayanan publik oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat pelayanan yang lebih profesional, maka setiap SKPD diwajibkan melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Banyumas, standar pelayanan masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan telah diterapkan di 99 SKPD, baik Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam konteks penanganan perizinan, kelembagaan penanganan perizinan telah dilakukan oleh BPM (Badan Penanaman Modal), namun kompleksitas dalam berbagai hal tentang perizinan masih memerlukan terobosan-terobosan baru agar pelayanan perizinan bisa lebih efektif dan efisien.

Delapan jenis perizinan dari 4 bidang (pariwisata, pertambangan, pertanian dan perhubungan) yang telah dicermati lebih mendalam menunjukkan dari sisi dasar hukum perlu dilakukan revisi, dari sisi sistem dan prosedur perlu dikaji kembali tentang bagaimana agar bisa sederhana, dari sisi durasi perlu dibuat standar pelayanan, demikian juga perlu peningkatan penguatan kewenangan kelembagaan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Publik Implementasi One Stop Service (OSS) di Kabupaten



Banyumas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada KPPI Kabupaten Banyumas tanggal 21 Juni 2006.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan sebanyak 24 jenis izin yang diselenggarakan yaitu :

1. Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha;
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Izin Usaha Perdagangan;
4. Izin Usaha Industri;
5. Tanda Daftar Perusahaan;
6. Tanda Daftar Industri;
7. Tanda Daftar Gudang;
8. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
9. Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima;
10. Izin Penggunaan Tanah Pemda;
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
12. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
13. Izin Bahan Galian Golongan C;
14. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
15. Izin Usaha Rumah Makan;
16. Izin Usaha Salon;
17. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
18. Izin Usaha Angkutan;
19. Izin Reklame;
20. Izin Lokasi;
21. Izin Usaha Pasar Modern;
22. Persetujuan Prinsip dan Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bensin Umum;
23. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel;
24. Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Realisasi Surat keputusan (SK) Perizinan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas (BPM) terhadap 24 Jenis perizinan pada tahun 2007 yang telah diterbitkan SK Perizinan sebanyak 3.766 buah, dan pada tahun 2008 telah diterbitkan SK Perizinan sebanyak 3.850 buah.

Pelaksanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila dokumen persyaratan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka izin dapat diproses dalam waktu 6 hari.

Penurunan jumlah hari kerja pelayanan persetujuan prinsip izin usaha rekreasi dan hiburan menjadi 6 hari untuk izin tetap dan 3 hari untuk izin insidental, penurunan jumlah hari kerja pelayanan izin usaha rumah makan menjadi 6 hari dan implemmentasi One Stop Service (OSS). Pelaksanaan pelayanan persetujuan prinsip izin usaha rekreasi hiburan apabila dokumen persyaratan telah memenuhi maka izin dapat diproses dalam waktu 6 hari. Untuk izin insidental yang bersifat regional seperti konser pemrosesannya melebihi 3 hari dikarenakan memerlukan ijin lintas sektor dari Polda dan Polwil. Sedangkan izin insidental yang sifatnya event ringan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Pelaksanaan pelayanan izin usaha rumah makan apabila dokumen persyaratan telah memenuhi maka izin dapat diproses dalam waktu 6 hari. Permasalahan yang umumnya muncul adalah rendahnya pelaksanaan implementasi pelayanan One Stop Service yang dilakukan di Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan perizinan bagi masyarakat dan masih terjadinya ketimpangan dalam pemberian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.



## 5. Pengawasan

Perubahan paradigma otonomi daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya good governance, yang membawa konsekuensi adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu mekanisme penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan eksternal (masyarakat) yang profesional.

Oleh karena itu kelembagaan pengawasan internal juga perlu diberdayakan selaku aparat fungsional yang setiap saat bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Unit pengawasan ini secara operasional dapat membantu tugas-tugas pemerintah daerah secara simultan dan kontinyu dengan memperhatikan nilai-nilai dan budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 2.81.**  
**Jumlah Obyek Pemeriksaan, Temuan dan**  
**Uang negara yang diselamatkan**  
**Tahun 2003 - 2008**

No.	Keterangan	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1.	Obyek Pemeriksaan	112	93	148	233
2.	Temuan	425	251	361	768
3.	Jumlah Uang negara yang berhasil diselamatkan (rupiah)	74.540.169,45	271.406.652,68	354.089.261,24	556.391.243,02

Sumber : Inspektorat Kab. Banyumas, 2008

Banyaknya obyek pemeriksaan, temuan dan uang negara yang berhasil diselamatkan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi tiap tahunnya. Jumlah obyek pemeriksaan dan temuan pada tahun 2007 merupakan yang paling banyak, yaitu 233 obyek pemeriksaan dengan hasil 768

temuan dengan jumlah uang negara yang diselamatkan sebesar Rp. 556.391.243,02. Jumlah obyek pemeriksaan dan temuan pada tahun 2008 yaitu 125 obyek pemeriksaan dengan hasil temuan 583 kasus dengan jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 975.426.626,87. Beberapa temuan yang ada pada beberapa obyek pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Permasalahan bidang pengawasan adalah jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat fungsional auditor.

## 6. Kelembagaan

Setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Banyumas periode 2008-2013. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas menggodok rumusan kebijakan baru mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah, yang tentu saja berimplikasi terhadap format pelayanan publik di Banyumas. Usulan kelembagaan perangkat daerah di Banyumas menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dirancang oleh tim eksekutif.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Banyumas yang baru didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2008. Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pemuda Dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
10. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga;
11. Dinas Cipta Karya, Kebersihan Dan Tata Ruang;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi;
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
14. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan;
15. Dinas Peternakan Dan Perikanan;
16. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
20. Badan Lingkungan Hidup;
21. Badan Penanaman Modal;
22. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
23. Badan Kepegawaian Daerah;
24. Inspektorat;
25. Kantor Penelitian Dan Pengembangan;
26. Kantor Ketahanan Pangan;
27. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
28. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
29. Kantor Pendidikan Dan Pelatihan;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

30. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
31. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
32. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan;
33. Kecamatan (27 Kecamatan);
34. Kelurahan (30 Kelurahan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, penataan kelembagaan dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan selama 1 tahun, penataan kelembagaan dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme, efisiensi (anggaran dan/atau pelaksanaan tupoksi) dan efektivitas sehingga diharapkan kinerja pemerintah dapat tercapai. Rencana penataan Organisasi dan Tata Kerja dilaksanakan pada tahun 2009, Dinas daerah yang semula 15 unit akan menjadi 13 unit, Lembaga Teknis Daerah semula 14 unit menjadi 12 unit.

#### 7. Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang mewadahi keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan pada landasan kemitraan untuk secara bersama-sama menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan



pemberdayaan masyarakat di daerah; Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tersebut diatas, perlu dibuka akses masyarakat terhadap informasi publik, oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Setiap anggota masyarakat berhak untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat tersebut meliputi : mendengar, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, menolak, dan menerima proses perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Permasalahan dalam perencanaan pembangunan adalah belum tertampungnya sebagian kegiatan APBD kedalam RKPD sehingga optimalisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel, terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih belum sinergis dan terintegrasinya perencanaan, baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral dan masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif.

#### 8. Politik

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan Pemilihan Umum pada tahun 2004. Jumlah Partai Politik peserta Pemilu sebanyak 23 Partai Politik. Jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.095.136 orang dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak 918.899 orang atau dengan tingkat

partisipasi sebesar 84%. Sedangkan pada Pemilu tahun 2008 jumlah Partai Politik peserta Pemilu sebanyak 39 Partai Politik, namun tingkat partisipasinya menurun menjadi 80%, penurunan tersebut karena banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Kabupaten Banyumas juga telah melakukan proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2008. Dalam pemilihan Kepala Daerah tersebut, tingkat partisipasi masyarakat cukup bagus. Suasana kondusif menjelang dan pasca pesta demokrasi berlangsung baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik horisontal yang terjadi di wilayah pemilihan. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Februari 2008 adalah sebesar 72,9%, Pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar dan kondusif. Namun demikian capaian partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Penurunan partisipasi masyarakat dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di tingkat masyarakat.

Tahun 2007 jumlah Kepala Desa yang telah memasuki Akhir Masa Jabatan sebanyak 278 orang dan telah melaksanakan Pilkades sebanyak 278 orang (100%) dan telah dilaksanakan pelantikan dan pada tahun 2008 telah dilaksanakan Pilkades di 7 Desa.

Permasalahan politik lokal adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik lokal serta masih kurangnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di lingkungan masyarakat.



Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran partai politik dalam pembangunan masyarakat, indikator tersebut dapat diukur dari jumlah partai politik peserta Pemilu tahun 2008 sebanyak 39 partai politik, dari jumlah tersebut hanya 9 partai politik yang memperoleh suara/kursi di DPRD Kabupaten Banyumas.

Jumlah komposisi perolehan parpol di kursi legislatif tahun 2009 :

**Tabel 2.82.**

**Jumlah Perolehan Kursi Parpol DPRD Kab. Banyumas  
Tahun 2009 - 2014**

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan	13
2.	Partai Golkar	7
3.	Partai Demokrat	6
4.	PAN	5
5.	PKB	5
6.	PKS	5
7.	Partai Gerindra	4
8.	PPP	3
9.	Partai Hanura	1

**9. Perpustakaan**

Perpustakaan Kabupaten Banyumas memiliki koleksi buku yang beragam. Beberapa jenis koleksinya antara lain adalah jenis karya umum, filsafat psikologi, agama, ilmu-ilmu sosial, Kesenian, hiburan, olahraga, kesusasteraan dan lain-lain. Fasilitas layanan yang diberikan perpustakaan Kabupaten Banyumas cukup lengkap, karena selain layanan peminjaman buku kepada anggotanya, Perpustakaan Kabupaten Banyumas juga memiliki layanan perpustakaan

keliling, motor pintar, story telling atau bercerita kepada anak, dan lain-lain. Sasaran layanan tersebut diberikan kepada masyarakat umum, sekolah, masyarakat pedesaan, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan dan taman bacaan masyarakat.

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koleksi buku-buku yang dipinjam, jumlah pengunjung dan peminjam yang terus mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 10,74%, dan jumlah peminjam buku perpustakaan meningkat rata-rata sebesar 36,24%. Rata-rata peningkatan jumlah koleksi buku dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 1,98%. Kondisi seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase peningkatan jumlah pengunjung tidak sebanding dengan penambahan jumlah koleksi buku.

Meskipun Perpustakaan Kabupaten Banyumas telah memiliki berbagai fasilitas layanan, namun masih terdapat permasalahan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu rendahnya minat baca masyarakat dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan perpustakaan.



Tabel 2.83.

Jumlah Pengunjung, Peminjam, Koleksi Buku dan Buku Yang di pinjam pada Perpustakaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008

No.	Keterangan	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Jumlah Pengunjung (orang)	24.124	36.125	55.122	16.283	18.085
2.	Jumlah Peminjam (orang)	9.122	24.271	33.141	10.882	11.917
3.	Jumlah Koleksi buku	22.901	22.841	28.163	22.268	23.565
4.	Jumlah buku yang dipinjam	25.420	55.324	65.023	18.876	21.369

Sumber : Kantor Perpusarda Kab. Banyumas, 2008

Dalam setiap organisasi baik organisasi Pemerintah maupun swasta, kearsipan menjadi sesuatu yang harus ada dan terlaksana dengan baik. Secara harfiah pengertian arsip adalah suatu dokumen yang dibuat oleh suatu organisasi baik yang berupa tulisan maupun gambar yang dapat dipergunakan untuk menunjang jalannya suatu proses organisasi. Arsip terbagi menjadi 2 (dua) yaitu arsip statis dan dinamis.

Kegiatan kearsipan dapat menjadi tolok ukur suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Di Kabupaten Banyumas tahun 2009 telah menerapkan kearsipan pada 198 SKPD dan Desa, dan target 2013 sebanyak 260 SKPD dan Desa.

### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Tujuan pembangunan daerah tidak akan terwujud apabila tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai. Proses perencanaan pembangunan harus memiliki keterkaitan yang erat dengan proses perencanaan penganggaran. Prakiraan kemampuan keuangan daerah yang diformulasikan dalam pagu indikatif anggaran menjadi bagian yang sangat vital dalam perencanaan pembangunan. Kondisi demikian akan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan arah kebijakan keuangan daerah diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah lebih dititikberatkan kepada kewenangan pengeluaran (expenditure assignment) dibandingkan kewenangan penerimaan (revenue assignment) sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber-sumber keuangannya secara lebih terarah, hemat, dan tepat sasaran sebagaimana mandat otonomi daerah.



Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar daerah yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian daerah.

#### A. Pendapatan Daerah

##### 1. Kondisi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daerah Kabupaten Banyumas cenderung meningkat, dimana pendapatan daerah pada tahun 2003 sebesar Rp. 477.970.051.350,- dan terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar Rp. 869.387.057.131,- pada tahun 2007. Kondisi selengkapanya pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 2003-2007**

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.045.836.800	51.224.307.534	63.787.247.698	85.499.779.470	96.386.444.659
1.	Pajak Daerah	12.861.036.988	14.706.239.634	17.295.119.280	16.832.562.181	18.990.997.657
2.	Retribusi Daerah	24.987.978.690	27.324.455.305	32.781.833.512	48.807.891.600	57.734.035.290
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	726.207.000	1.284.181.000	4.250.396.230	3.504.757.059	4.152.405.385
4.	Lain-lain PAD yang Sah	6.450.613.922	7.909.431.595	9.439.898.676	16.354.568.630	15.509.006.327
B.	DANA PERIMBANGAN	413.641.921.820	419.566.816.418	453.022.840.710	676.406.556.626	715.730.127.218
1.	Dana Bagi Hasil	25.899.988.820	36.079.824.418	36.048.840.710	42.269.556.626	51.078.834.051
2.	Dana Alokasi Umum	381.941.933.000	374.866.992.000	404.114.000.000	603.887.000.000	654.154.000.000
3.	Dana Alokasi Khusus	5.800.000.000	8.620.000.000	12.860.000.000	30.250.000.000	10.497.293.167
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.282.292.730	53.521.569.260	49.374.816.198	41.178.498.529	57.270.485.254
1.	Hibah	-	-	-	-	9.580.000.000
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	19.282.292.730	24.472.825.260	28.053.816.198	39.946.669.035	47.690.485.254
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	29.048.744.000	21.321.000.000	1.231.829.494	-
	JUMLAH	477.970.051.350	524.312.693.212	586.164.904.606	803.084.834.625	869.387.057.131

Sumber : APBD Kabupaten Banyumas, 2003-2007

Dari tabel tersebut diatas maka, pertumbuhan keuangan (pendapatan) Daerah Kabupaten Banyumas adalah seperti berikut;

- Tahun 2004 terjadi pertumbuhan sebesar 9,70%
- Tahun 2005 terjadi pertumbuhan sebesar 7,98%
- Tahun 2006 terjadi pertumbuhan sebesar 41,85%
- Tahun 2007 terjadi pertumbuhan sebesar 8,26%

Dengan rata-rata pertumbuhan keuangan daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebesar 16,95%, pertumbuhan pendapatan Kabupaten Banyumas tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 41,85% dikarenakan adanya kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 404.114.000.000,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 603.887.000.000,- pada tahun



2006, sehingga terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 119.773.000.000,-.

Kontribusi dan proporsi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 masih didominasi oleh dana perimbangan, yaitu rata-rata sebesar 82,63%; diikuti oleh pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata sebesar 10,44%, terakhir dari lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 6,94%.

## 2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir maka pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 2008-2013**

No.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95,370,045,696	101,413,857,713	108,249,151,723	117,720,952,499	127,197,488,175	136,673,702,118
1.	Pajak Daerah	18,745,262,472.00	18,795,000,000.00	20,019,087,000	21,770,757,113	23,523,303,060	25,275,788,136
2.	Retribusi Daerah	58,847,175,985.00	66,122,256,890.00	70,578,896,791	78,754,550,280	82,930,291,556	89,111,821,777
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,351,858,903.00	5,625,043,940.00	6,004,171,902	6,529,538,943	7,055,164,867	7,580,774,435
4.	Lain-lain PAD yang Sah	12,425,938,336.00	10,911,557,082.95	11,646,996,029	12,966,108,182	13,685,729,881	14,705,316,767
B.	DANA PERIMBANGAN	760,076,541,000	822,443,224,593	918,716,953,196	996,221,619,053	1,073,726,284,910	1,151,230,950,767
1.	Dana Bagi Hasil	47,778,190,000	49,652,344,592.77	56,927,338,720	60,844,617,000	64,781,896,279	68,679,173,558
2.	Dana Alokasi Umum	702,152,351,000	735,160,880,000.0	831,506,387,857	901,858,800,679	971,811,213,500	1,041,963,626,321
3.	Dana Alokasi Khusus	10,146,000,000	37,630,000,000.00	30,283,226,619	33,718,201,375	37,153,176,131	40,588,150,887
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72,567,269,592	70,388,809,600	81,646,610,857	88,838,141,405	96,026,571,952	103,215,202,500
1.	Hibah	-	-	-	-	-	-
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	58,994,018,992	56,815,559,000	68,078,360,257	75,264,880,806	82,463,421,352	89,541,951,900
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,573,250,600	13,573,250,600	13,573,250,600	13,573,250,600	13,573,250,600	13,573,250,600
JUMLAH		928,013,856,288	994,245,891,905	1,109,615,715,775	1,202,780,712,955	1,296,950,446,035	1,391,119,855,384

Sumber: DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan daerah lainnya. Optimalisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan dari sektor pajak daerah saat ini akan menerapkan sistem self assesment. Langkah-langkah tahapan telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan dengan para wajib pajak bekerja sama dengan asosiasi perhimpunan yang mewadahnya, misal PHRI, ASPABAMAS.
2. Sedangkan penerimaan sektor retribusi, yaitu akan melakukan upaya penyesuaian dengan perubahan regulasi peraturan daerah yang mengatur retribusi dan pajak daerah.



Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,3% dengan pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 10%, dana perimbangan sebesar 5%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,7%.

Proyeksi pendapatan daerah ini (termasuk PAD) bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan yang antara lain adalah:

- a. Bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD, tampaknya akan semakin penting. Oleh karena itu perlu terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat, melakukan intensifikasi melalui perbaikan kedalaman dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan antara prediksi dengan jumlah realisasi karena tergantung pada Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan kepada Pemerintah Pusat, dan Bagi Hasil Pajak dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah, dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan

berkorelasi dengan naiknya pendapatan berasal dari bagi hasil.

- c. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, menekan ketimpangan pendapatan masyarakat (menekan angka kemiskinan), dan tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Kebijakan pengembangan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2008-2013) diarahkan pada:

- a. Pajak daerah. Kebijakan yang diformulasikan adalah: perluasan basis sasaran pajak daerah (ekstensifikasi) dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); perbaikan manajemen yang berbasis pada profesionalisme SDM pemungut pajak, perbaikan/penyederhanaan sistem dan prosedur tatalaksana pemungutan; peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif; optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik; dan didukung oleh updating data potensi PAD.
- b. Retribusi daerah. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan penarikan retribusi daerah dan penegakan aturan secara berkelanjutan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.



- c. Perusahaan daerah. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah berbasis profesionalitas sesuai prinsip tata pengelolaan bisnis yang baik.
- d. Dana perimbangan. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan DAU, DAK, dana Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak.
- e. Aspek regulasi. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan implementasi peraturan perundangan di bidang pendapatan daerah secara lebih optimal.
- f. Aspek makro. Kebijakan yang diformulasikan adalah: penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi investasi; pemulihan ekonomi; kestabilan fiskal daerah serta jalannya pemerintahan; dan peningkatan pendayagunaan potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

## **B. Belanja Daerah**

### **1. Kondisi Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Selama 5 (lima) tahun terakhir belanja daerah Kabupaten Banyumas cenderung meningkat, dimana belanja daerah pada tahun 2003 sebesar Rp.471.777.489.245,- dan terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar Rp.865.065.993.381,- pada tahun 2007. Kondisi selengkapnyanya belanja daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Banyumas 2003-2007**

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	354.910.945.789	389.513.510.297	401.189.993.818	449.148.316.402	577.067.730.131
1.	Belanja Pegawai	314.400.815.777	341.481.134.787	343.199.415.668	386.651.389.046	453.012.319.160
2.	Belanja Bunga	14.976.971.163	19.314.857.967	24.888.617.794	127.908.040	129.363.602
3.	Belanja Hibah	-	-	-	-	16.770.329.000
4.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	58.918.745.839	62.769.885.163
5.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	23.715.099.079	23.732.643.690	30.340.829.982	27.240.000	40.743.512.114
6.	Belanja Tak Terduga	1.818.059.770	4.984.873.853	2.761.130.374	3.423.033.477	3.642.321.092
B.	BELANJA LANGSUNG	116.866.543.456	99.021.105.240	131.678.537.567	270.836.895.592	287.998.263.249
1.	Belanja Pegawai	16.974.096.062	17.965.387.372	18.509.249.655	36.737.576.844	43.042.842.617
2.	Belanja Barang dan Jasa	49.911.661.267	45.881.563.452	53.538.526.748	111.179.855.091	103.521.018.393
3.	Belanja Modal	49.980.784.127	35.184.154.415	59.630.861.153	122.919.463.656	141.434.402.239
	JUMLAH	471.777.489.245	488.534.615.537	532.868.531.375	719.985.211.994	865.065.993.381

Sumber : APBD Kabupaten Banyumas, 2003-2007

Belanja daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 masih didominasi oleh belanja tidak langsung rata-rata sebesar 70,6% kemudian diikuti oleh belanja langsung rata-rata sebesar 29,4%.

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Formulasi kebijakan belanja daerah diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, dimana pada level kebijakan anggaran belanja daerah dicerminkan pada proyeksi belanja daerah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Berdasarkan pada realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir maka belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 3.4.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas 2008-2013**

No.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	693.005.691.414	718.120.031.085	738.204.954.239	758.756.876.537	779.930.562.023	801.748.962.716
1.	Belanja Pegawai	563.499.887.630	633.496.622.000	649.333.012.560	665.566.337.864	682.205.496.310	699.260.633.718
2.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	126.214.125.572	82.258.992.085	86.371.941.689	90.690.538.774	95.225.065.712	99.986.318.998
3.	Belanja Tak Terduga	3.291.678.212	2.366.417.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
B.	BELANJA LANGSUNG	371.105.115.377	394.196.860.821	363.080.761.636	436.694.036.317	509.690.100.111	582.044.134.765
	JUMLAH	1.064.110.806.791	1.112.315.891.906	1.101.285.715.775	1.195.450.912.954	1.289.620.662.134	1.383.791.067.481

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008.

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh belanja tidak langsung. Belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,64% dengan pertumbuhan rata-rata komponen Belanja Tidak Langsung sebesar 2,96% sedangkan untuk Belanja Langsung yaitu 10,28%. Proyeksi belanja daerah ini bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan belanja daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (2008-2013) diarahkan pada:

- Efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan yang diformulasikan adalah optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Prioritas. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah; dan



peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah sesuai urusan yang ditangani.

- c. Tolok ukur dan target kinerja. Kebijakan yang diformulasikan adalah: penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Optimalisasi belanja langsung. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan upaya pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan efektif; peningkatan relevansi alokasi belanja langsung sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan tujuan pembangunan; peningkatan alokasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- e. Transparan dan akuntabel. Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan akses informasi tentang belanja daerah oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- f. Plafon anggaran. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja daerah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.

## C. Pembiayaan Daerah

1. Kondisi Pembiayaan Daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  
Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD. Struktur pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan daerah yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran daerah yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.  
Selama 5 (lima) tahun terakhir pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas cenderung bersifat fluktuatif, terutama untuk kondisi tahun 2005 karena adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp. 38.459.069.756,-. Apabila dilihat dari pembiayaan netto, pada tahun 2003 sebesar Rp. 25.395.138.778,- dan meningkat menjadi Rp. 130.257.602.659,- Kondisi selengkapnya pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun



2003 - 2007 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas 2003-2007**

No.	URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.449.172.268	32.386.939.065	67.553.967.246	63.438.736.929	152.466.362.546
1.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	35.449.172.268	32.386.939.065	67.553.967.246	63.438.736.929	135.678.362.546
2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	10.000.000.000
3.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	3.653.000.000
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	3.135.000.000
6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.054.033.490	710.096.445	42.424.269.490	13.515.855.934	22.208.759.887
1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
2.	Penyerahan modal (Investasi) daerah	9.943.937.000	600.000.000	3.965.200.000	3.405.759.445	5.405.759.887
3.	Pembayaran pokok utang	110.096.490	110.096.445	38.459.069.490	110.096.489	3.653.000.000
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	3.150.000.000
C.	PEMBIAYAAN NETTO	25.395.138.778	31.676.842.620	25.129.697.756	49.922.880.995	130.257.602.659
D.	SILPA TAHUN BERKENAAN	31.587.700.883	67.454.920.295	58.426.070.987	133.022.703.624	133.688.395.471

Sumber : APBD Kabupaten Banyumas, 2003-2007.

Pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2003-2007 masih didominasi oleh penerimaan pembiayaan rata-rata sebesar 79,8%, kemudian diikuti oleh pengeluaran pembiayaan rata-rata sebesar 20,2%.

## 2. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga

defisit anggaran diupayakan dapat digunakan untuk meminimalkannya. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran bisa digali dari pinjaman daerah namun jumlah defisit tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, pinjaman daerah tidak melebihi dari kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang tercermin dari besaran Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal sebesar 2,5. Sehubungan dengan hal tersebut maka diberikan kesempatan pada daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, maka perlu dipelajari dan disiapkan baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya sebagai salah satu alternatif mendapatkan pembiayaan daerah.

Melihat perkembangan pembiayaan netto daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007), maka diperkirakan pembiayaan daerah tersebut akan meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 60.960.758.160,- tampak seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6.**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas 2008-2013**

No.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143.150.690.616	125.400.000.000	0	0	0	0
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.053.740.113	7.330.000.000	7.330.000.000	7.330.000.000	7.330.000.000	7.330.000.000
C.	PEMBIAYAAN NETTO	136.096.950.503	118.070.000.000	(7.330.000.000)	(7.330.000.000)	(7.330.000.000)	(7.330.000.000)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2008.



Pembiayaan netto daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11% dengan pertumbuhan rata-rata komponen pengeluaran pembiayaan sebesar 11%. Proyeksi pembiayaan daerah ini bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah atas dasar kemampuan APBD dan pinjaman daerah dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan. Kebijakan yang diformulasikan adalah : optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan. Kebijakan yang diformulasikan adalah: peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang

telah jatuh tempo, setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dapat meningkat.



## BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

### A. Analisis Lingkungan Strategis Daerah

Analisis lingkungan strategis daerah disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis daerah (environmental scanning). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu: faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal dari lingkungan strategis Kabupaten Banyumas dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### a. Kekuatan (Strength)

- 1) Letak Kabupaten Banyumas yang strategis di Jawa Tengah bagian tengah, yang mudah diakses dari berbagai arah,
- 2) Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif, pariwisata, dan permukiman.
- 3) Semakin meningkatnya laju pertumbuhan produksi perekonomian pada sektor bangunan, perdagangan, keuangan, dan jasa.
- 4) Sektor-sektor basis yang semakin berkembang meliputi sektor pertanian, listrik dan air bersih, angkutan, keuangan, dan jasa.
- 5) Semakin berkembangnya penyelenggaraan badan usaha milik daerah.

- 6) Semakin besarnya jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal.
  - 7) Iklim investasi yang semakin kondusif dalam rangka mendukung berkembangnya investasi diberbagai sektor ekonomi.
  - 8) Semakin meningkat dan berkembangnya koperasi dan pengusaha kecil menengah (PKM), industri kecil, dan perusahaan perdagangan yang cukup besar dan tersebar.
  - 9) Tingginya prestasi daerah dibidang kepemudaan dan olah raga pada event-event regional, nasional, dan internasional.
  - 10) Tingginya kasanah seni dan budaya daerah yang dimiliki masyarakat.
  - 11) Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah.
  - 12) Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah,
  - 13) Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan prospektif dikembangkan.
- ##### b. Kelemahan (Weakness)
- 1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) daerah, baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang.
  - 2) Masih rendahnya peran masyarakat dalam usahanya, untuk memiliki dan menerapkan dokumen lingkungan.
  - 3) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dibanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah dan tingkat pertumbuhan



ekonomi nasional.

- 4) Masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil-hasil produksi sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, dan industri kecil/menengah).
- 5) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat.
- 6) Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 7) Masih rendahnya kualitas pelayanan dasar pendidikan.
- 8) Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
- 9) Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 10) Rendahnya kemandirian dan kualitas peserta KB.
- 11) Masih tingginya angka pengangguran.
- 12) Masih rendahnya jangkauan pelayanan infrastruktur publik.
- 13) Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 14) Belum optimalnya pengembangan sistem data dan informasi daerah berbasis e-Gov.
- 15) Lemahnya kemampuan keuangan daerah,

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kabupaten Banyumas dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### a. Peluang (Opportunity)

- 1) Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada Daerah.

- 2) Berkembangnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam berbagai sektor khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan dasar di berbagai bidang dan program-program penanganan kemiskinan.
- 3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan.
- 4) Semakin membaiknya perekonomian global yang berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat.
- 5) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 6) Potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi dan PKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD.
- 7) Tuntutan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang pengembangan investasi daerah.
- 8) Peningkatan kebutuhan masyarakat di tingkat regional dan nasional akan barang-barang industri dan jasa perdagangan.

### b. Tantangan (Threat)

- 1) Masih banyaknya peraturan-peraturan tentang otonomi daerah bersifat operasional dan saling bertentangan dengan kepentingan daerah, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum di daerah.
- 2) Terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.



- 3) Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha.
- 4) Tuntutan penyediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja lokal, regional dan nasional.
- 5) Semakin menurunnya dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah.

## **B. Isu-Isu Strategis Daerah**

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis daerah, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Banyumas dalam lima tahun yang akan datang.

1. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Peluang
  - a. Pendayagunaan kawasan yang strategis dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif, pariwisata, permukiman, melalui optimalisasi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
  - b. Pengembangan perekonomian daerah dalam berbagai sektor perekonomian untuk memanfaatkan secara maksimal peluang pangsa pasar, kebutuhan akan kesempatan tenaga kerja, dan kebutuhan akan barang-barang industri dan jasa perdagangan.
  - c. Pendayagunaan badan usaha milik daerah dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin tinggi.
  - d. Iklim investasi yang semakin kondusif dalam rangka mendukung berkembangnya investasi diberbagai sektor ekonomi dan semakin meningkat dan

berkembangnya koperasi dan pengusaha kecil menengah (PKM), industri kecil, dan perusahaan perdagangan yang cukup besar dan tersebar.

- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengembangan daerah untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi daerah,
2. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kekuatan-Tantangan
  - a. Pengembangan aneka usaha sektor unggulan daerah dengan berpedoman pada perencanaan teknis yang akurat,
  - b. Peningkatan kontinuitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) untuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.
  - c. Pengembangan kebijakan untuk antisipasi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana.
3. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Peluang
  - a. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan berbasis pada pengembangan profesionalitas aparatur pemerintah, pemerintahan yang bersih dan kualitas manajemen pemerintahan, melalui peningkatan efektivitas penataan kelembagaan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan melalui e-governance.



- b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan urusan daerah terutama dalam bidang sarana prasarana pendidikan, sumberdaya manusia penyelenggara pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal non formal, dan pengembangan sistem pendidikan yang menjamin terwujudnya masyarakat berpendidikan.
  - c. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai program pembangunan yang meliputi pelayanan dasar berbagai bidang yaitu pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, pelayanan dasar infrastruktur publik, dan penurunan angka pengangguran.
  - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dalam kerangka pemenuhan kebutuhan fasilitas publik, pertumbuhan investasi daerah, dan pengembangan perekonomian daerah yang menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. Isu-isu Strategis Daerah Kelompok Kelemahan-Tantangan
- a. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam berbagai sektor khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan dasar di berbagai bidang dan program-program penanganan kemiskinan,
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana e-governance untuk meningkatkan kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

- c. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan antisipasi berbasis data dan partisipasi masyarakat.
5. Isu Strategis Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013
- Berdasarkan pada keempat kelompok isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis utama pembangunan daerah kabupaten Banyumas yang masih akan dihadapi selama lima tahun yang akan datang (2008-2013), yaitu:
- a. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin
  - b. Masih rendahnya kualitas/derajat kesehatan masyarakat.
  - c. Masih tingginya pengangguran.
  - d. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.
  - e. Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas.
  - f. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah termasuk sarana dan prasarannya.
  - g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memelihara lingkungan (dokumen lingkungan belum dimiliki).
  - h. Kualitas penegakan hukum masih rendah.
  - i. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih rendah.



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Visi**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Daerah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyumas secara langsung untuk pertama kalinya yang akan menjabat pada periode masa jabatan tahun 2008-2013. RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 akan mengakomodasikan penekananan pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013 (Visi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2008-2013) adalah :

**Menyejajarkan Kabupaten Banyumas  
Dengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan  
Melebihi**

Berdasarkan pada visi Kepala Daerah terpilih tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, potensi, dan modal dasar Daerah, serta memperhitungkan berbagai regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Banyumas masa jabatan tahun 2008-2013 relevan digunakan sebagai visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008-2013.

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 tersebut dirancang untuk mampu menampung semua dinamika pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka membuat visi tersebut agar mudah diingat dan mampu memotivasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, maka rumusan visi tersebut dapat disingkat dan dioperasionalisasikan dengan menggunakan akronim "Bungah", yang berasal dari rangkaian kata sebagai berikut: Banyumas Maju, Amanah, Bangkit, dan Sejahtera. Rumusan akronim "Bungah" berasal dari kata kunci "Menyejajarkan" dan "bahkan melebihi" yang diakomodasi dengan kata kunci "Maju" dan "Bangkit", kemudian diperluas dengan menggunakan kata kunci "Amanah" dan "Sejahtera". Rumusan visi "Bungah" diharapkan mampu untuk menampung segenap dinamika yang hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas selama tahun 2008-2013.

Perwujudan akronim "Bungah" tersebut mengandung filosofis bahwa Banyumas sebagai suatu daerah otonom dalam



kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu memajukan daerahnya setara dengan daerah maju lainnya, bahkan melebihi. Dengan berbekal dukungan kondisi Daerah yang mantap dan kondusif, maka Banyumas akan dapat lebih maju dengan berbasis pada potensi unggulan Daerah yang dimilikinya.

Secara khusus, dijabarkan makna dari akronim "Bungah" yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

#### 1. Maju

Maju diartikan sebagai menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam rangka menuju peradaban yang lebih tinggi. Banyumas yang maju menunjukkan progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin kuatnya dukungan infrastruktur atau prasarana dan sarana pembangunan daerah baik yang terkait dengan bidang ekonomi maupun non ekonomi, semakin baiknya dukungan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

#### 2. Amanah

Amanah diartikan sebagai kepercayaan yang diemban, terutama pada pihak pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah pada umumnya didukung oleh profesionalitas aparatur yang berdedikasi, bersih, dan berwibawa; juga

kepercayaan yang diberikan kepada segenap pemangku kepentingan untuk mampu bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membangun komitmen untuk selalu berpartisipasi aktif dalam semua tahapan proses pembangunan, termasuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang demokratis, dinamis, kondusif, aman, dan nyaman bagi pelaksanaan pembangunan.

#### 3. Bangkit

Bangkit diartikan sebagai suatu proses revitalisasi, reposisi, reformasi, bahkan transformasi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Banyumas dalam segala aspek kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat sehingga akan semakin menunjukkan eksistensi dan perannya sebagai salah satu daerah yang sangat penting dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dan kawasan di Provinsi Jawa Tengah pada khususnya. Kebangkitan perekonomian dalam arti luas akan menyentuh hingga semua pelaku ekonomi, dengan memberikan kesempatan, peluang, dan kemudahan bagi masuk dan berkembangnya investasi dalam pemanfaatan segenap potensi keunggulan daerah yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan, pemerataan, kestabilan, dan kesinambungan pembangunan beserta hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh segenap anggota masyarakat.

#### 4. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan yang aman, sentosa, adil, dan makmur, baik lahir maupun batin. Masyarakat Banyumas yang sejahtera identik dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan



tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Secara lebih tegas, masyarakat sejahtera ditekankan sebagai masyarakat yang mampu terpenuhi segenap kebutuhannya, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan lainnya, serta terjaminnya semua hal yang terkait dengan upaya perlindungan sosial dalam rangka mencapai basis kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Akhirnya, kesejahteraan harus mampu menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan masyarakat menjadi kuat dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.

#### **B. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (disamakan dengan daerah), sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan (pembangunan daerah) dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Misi harus memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses implementasinya dan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan visi.

Rumusan misi pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2008-2013 mengacu pada misi yang berasal dari Kepala Daerah Kabupaten Banyumas terpilih periode masa jabatan tahun 2008-2013, yaitu:

#### **"Menyejahterakan rakyat Banyumas"**

Misi pembangunan daerah untuk "Menyejahterakan Masyarakat Banyumas" mempunyai implikasi yang sangat luas pada berbagai sendi kehidupan masyarakat dan daerah melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terakumulasi pada berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama tahun 2008-2013 di Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi tersebut digunakan sebagai "payung kebijakan" yang akan dijabarkan secara operasional sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**

Penjabaran pertama dari misi, dirumuskan dan dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten Banyumas yang maju dengan memfokuskan pada upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas untuk membangun infrastruktur pembangunan daerah yang layak dan memadai, dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.



2. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum**  
Penjabaran kedua dari misi, dirumuskan dan dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten Banyumas yang amanah dengan memfokuskan pada upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean government and good governance) berbasis pada penyelenggaraan sistem dan manajemen Pemerintah Daerah yang demokratis, aspiratif dan partisipatif, dan akuntabel didukung dengan aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta formulasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memihak kepada kepentingan rakyat.

3. **Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan Daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

Penjabaran ketiga dari misi, dirumuskan dan dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten Banyumas yang bangkit dengan memfokuskan pada upaya-upaya Pemerintah Daerah bersama segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas dalam menyejahterakan rakyat Banyumas melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan menekankan pada pengembangan penanaman modal (investasi) berbasis pada potensi unggulan Daerah agar mampu memberikan dampak sangat luas bagi kebangkitan Kabupaten Banyumas sebagai

salah satu pusat dan kawasan pertumbuhan ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan investasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan**

Penjabaran keempat dari misi, dirumuskan dan dilaksanakan guna mewujudkan kondisi Kabupaten Banyumas yang sejahtera dengan memfokuskan pada upaya-upaya Pemerintah Daerah beserta segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan pariwisata dan budaya, pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang semakin baik, dan penguatan jatidiri dan karakter masyarakat berbasis pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kearifan lokal.

### C. Tujuan

1. Meningkatnya pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.



2. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

#### **D. Sasaran**

1. Penjabaran pertama dari misi yaitu Meningkatnya pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
  - a. Terwujudnya pembangunan kawasan yang berorientasi tata ruang;
  - b. Tersedianya dan meratanya prasarana dan sarana pelayanan dasar publik yang memadai di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Terwujudnya kualitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal pembangunan daerah;
  - d. Terwujudnya kualitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal pembangunan daerah;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjamin kualitas hidup generasi masa kini dan masa depan.
2. Penjabaran kedua dari misi yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum, dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan benar;
  - b. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah;
  - c. Berkembangnya sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, aspiratif dan akuntabel dalam proses pembangunan;
  - d. Meningkatnya kinerja dan kualitas di semua aspek pelayanan publik sesuai dengan standar kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Penjabaran ketiga dari misi yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;
  - b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah;



- c. Berkembangnya peluang dan daya tarik investasi pada sektor unggulan daerah;
  - d. Makin optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penjabaran keempat dari misi yaitu Terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan;
  - b. Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan;
  - c. Makin kuatnya karakter masyarakat kabupaten Banyumas yang beriman, bertakwa dan berbudaya.

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN

#### A. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah atau cara yang akan dijadikan dasar yang menjadi pedoman, dan kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi melalui pelaksanaan misi pembangunan daerah. Strategi dirumuskan sebagai suatu pilihan instrumen kebijakan yang diharapkan akan mampu digunakan sebagai fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas akan dijadikan pedoman dalam penentuan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan berbagai kebijakan dan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau dari Pemerintah Pusat. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan selama Tahun 2008 - 2013 dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, yaitu :

1. **Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian penjabaran pertama dari misi pembangunan daerah Tahun 2008 - 2013 adalah:



- a. Meningkatkan penataan kawasan secara disiplin sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas sesuai dengan perkembangan wilayah.
- b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan
- d. Mewujudkan pemenuhan perumahan rakyat.
- e. Membangun sarana dan prasarana dasar publik (bidang pekerjaan umum : transportasi dan irigasi) yang memadai.

**2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum**  
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian penjabaran kedua dari misi pembangunan daerah tahun 2008-2013 adalah:

- a. Melakukan proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di semua aspek layanan publik.
- c. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

**3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian penjabaran ketiga dari misi pembangunan daerah Tahun 2008-2013 adalah:

- a. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.
- b. Memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan hutan.
- c. Mengembangkan kawasan budidaya dan agribisnis perikanan.
- d. Mengembangkan keanekaragaman bahan pangan.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
- f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.
- h. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

**4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan**

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian penjabaran keempat dari misi pembangunan daerah Tahun 2008-2013 adalah:

- a. Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan dan sarana prasarana olah raga.
- c. Mengoptimalkan peran perpustakaan serta meningkatkan minat (budaya) baca masyarakat.



- d. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan.
- e. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera
- f. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB.
- g. Mengembangkan pembinaan kebudayaan daerah.
- h. Meningkatkan administrasi kependudukan pencatatan sipil.
- i. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial.
- k. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja.
- l. Meningkatkan kualitas dan pengembangan program/pola ketransmigrasian.
- m. Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban.

#### **B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Tujuan utama pembangunan Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas, oleh karena itu guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu untuk dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2008 - 2013.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 ini dirumuskan dengan memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025;

kemudian dikoneksitaskan dengan penjabaran misi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013.

#### **1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.**

- a. Pembangunan berbasis kawasan diarahkan pada pembangunan dan pengembangan akses transportasi dan irigasi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektifitas kegiatan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- b. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, sinkronisasi penggunaan lahan sesuai dengan dokumen tata ruang dan penertiban bangunan.
- c. Pembangunan pertanahan diarahkan pada pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
- d. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada kesadaran pelaku usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada penyediaan rumah yang layak huni, penyediaan air bersih, jaringan sanitasi dan drainase lingkungan serta peningkatan partisipasi pengelolaan persampahan sejak dari sumber sampai dengan TPA.



**2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance), didukung aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan hukum.**

- a. Pembangunan pemerintahan diarahkan pada peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan yang efektif dan optimal dengan dasar pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, peningkatan peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien.
- b. Pembangunan politik diarahkan pada pengembangan sistem politik yang kondusif dengan peningkatan peran serta masyarakat sebagai fungsi kontrol pembangunan.
- c. Pembangunan hukum diarahkan pada pembentukan peraturan daerah yang efektif, pemberantasan permasalahan KKN serta peningkatan peran lembaga bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

**3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.**

- a. Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan peran industri kecil dan menengah agar setara dengan industri besar, sehingga menjadi pondasi perekonomian yang kokoh dan pengembangan kawasan industri dan penyediaan sarana prasarana penunjang industri.

- b. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pengembangan jaringan distribusi bagi produk lokal secara terpadu dan berkesinambungan serta penyediaan barang-barang kebutuhan pokok secara merata ke seluruh wilayah kabupaten Banyumas.

- c. Pembangunan koperasi dan UKM diarahkan pada pengembangan UKM untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan daya saing, pengembangan jiwa kewirausahaan, pengetahuan dan ketrampilan pengusaha kecil dan menengah. Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan memperkuat kelembagaan koperasi dan UKM.

- d. Pembangunan penanaman modal diarahkan untuk peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

- e. Pembangunan pertanian diarahkan pada pembangunan agropolitan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produk dan produktivitas pertanian unggulan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

- f. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, pemanfaatan kawasan hutan industri, pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, perencanaan dan pengembangan hutan.



- g. Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- h. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan (pertanian/peternakan).
- i. Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga desa serta kelompok masyarakat dalam pembangunan desa, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, membuka akses dan meningkatkan peluang kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.
- j. Pembangunan energi dan sumber daya mineral diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan, dan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan serta pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
- k. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
- l. Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

rangka pengembangan kepariwisataan, pengembangan manajemen pembangunan sektor pariwisata daerah dan pengembangan publikasi dan promosi kepariwisataan secara terpadu, dan berkesinambungan.

**4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertakwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.**

- a. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi pada masa depan disesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pembangunan fisik dan psikis masyarakat.
- b. Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan untuk pengembangan kebijakan manajemen olah raga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan peran serta kepemudaan.
- c. Pembangunan perpustakaan diarahkan untuk pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- d. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan gizi masyarakat, peningkatan manajemen kesehatan dan peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dengan penekanan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.



- e. Pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan keluarga berencana guna peningkatan keluarga yang sejahtera.
- f. Pembangunan pariwisata dan budaya daerah diarahkan untuk menumbuhkembangkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya khas Banyumas dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Pembangunan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, peningkatan serta kesetaraan gender dalam pembangunan, peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.
- i. Pembangunan sosial diarahkan untuk pembinaan anak terlantar, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- j. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja,

kerja, serta;

- k. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan transmigrasi lokal dan transmigrasi regional.
- l. Pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan serta pengembangan wawasan kebangsaan.

### C. **Pentahapan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013.**

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Banyumas 2008 - 2013 yaitu " Menyejajarkan Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan Melebihi ", yang telah ditetapkan dengan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah. Untuk itu telah disusun pentahapan pembangunan sebagai tahapan antara dalam pencapaian visi. Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2008- 2013 dibagi dalam 3 tahapan pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. **Tahap Konsolidasi (2008-2009)**

Tahap konsolidasi adalah tahapan untuk melanjutkan dan menajamkan capaian Rencana Strategis (RPJM Transisi) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 - 2008 sebagai pondasi/dasar pembangunan 5 tahun kedepan (2008 - 2013), dengan mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 dan Visi Misi Bupati Banyumas periode Tahun 2008 -2013.



Pada tahap konsolidasi ini memanfaatkan secara optimal potensi yang telah terbangun pada tahap sebelumnya dan meletakkan landasan yang lebih kokoh untuk berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis desa yang sinergis dengan pengembangan ekonomi perkotaan.

Tahapan konsolidasi ini terutama difokuskan pada aspek-aspek utama:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan pada pelayanan serta peningkatan kemampuan aparat.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama regional antar wilayah guna mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi.

## **2. Tahap Pemantapan Pengembangan Investasi Daerah (2010-2011)**

Pada tahap ini, adanya upaya pemantapan pengembangan infrastruktur investasi daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Banyumas. Dalam rangka mencapai hal ini akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mempertimbangkan batas kemampuan lingkungan dan tetap dapat menjaga kelestariannya. Akselerasi terhadap pertumbuhan perekonomian perdesaan pada bidang pertanian, UKM dan investasi. Pada tahap ini harus

terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menuju pada pelayanan prima sebagai perwujudan terwujudnya clean dan good governance. Transparansi dan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pelayanan sehingga electronic government (e-gov) menjadi pilihan Kabupaten Banyumas dalam pelayanan publik.

Tahapan ini terutama difokuskan pada aspek-aspek utama:

- a. Terjaganya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur publik, serta pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- b. Pendayagunaan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, guna mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
- c. Pemantapan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication Technology (ICT) melalui electronic government di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.



### 3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian Masyarakat (2012-2013).

Pada tahap ini adalah tahap terakhir yang merupakan perwujudan visi dan misi Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan yaitu " Menyejahterakan Rakyat Banyumas " dan ditandai dengan kondisi aman, tata pemerintahan yang bersih dan baik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk itu segala kekuatan dan potensi yang ada diarahkan untuk terwujudnya tercapainya tujuan tersebut. Peningkatan kesejahteraan rakyat Banyumas dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator agregat pembangunan daerah yang telah ditetapkan yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), semakin meratanya pembangunan di wilayah baik perkotaan maupun perdesaan, semakin tingginya nilai tukar petani, meningkatnya kesetaraan gender dengan adanya peningkatan keberdayaan perempuan, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya angka inflasi, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Tahapan ini diutamakan difokuskan pada aspek-aspek utama :

- a. Menjaga dan mengembangkan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar di bidang kesehatan,

pendidikan, infrastruktur publik, serta pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang telah terbentuk pada tahapan sebelumnya.

- b. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri.
- c. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan dan berdaya saing yang mengarah kepada kemandirian melalui peran aktif pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu namun tidak berarti tujuan tersebut diupayakan dan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan melainkan masing-masing tahapan tidak terpisahkan (saling terkait) untuk mendukung tujuan pembangunan di Kabupaten Banyumas selama periode 2008-2013.



## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka menciptakan langkah-langkah konkret pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, maka dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah yang berisi tentang rangkaian upaya strategis pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan pada prinsip relevansi dan konsistensi antara permasalahan daerah, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2008-2013.

Perumusan kebijakan umum pembangunan daerah dilakukan dengan memperhitungkan sinergitas keempat hal di atas (masalah, sasaran, kebijakan, dan program) dengan konsep misi, fungsi dan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar membantu memudahkan dalam operasionalisasi dokumen (RPJM Daerah) ini ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan penganggaran yang berdimensi tahunan. Berikut ini adalah 4 rumusan kebijakan umum pembangunan daerah berdasarkan penjabaran misi

- A. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**
- Kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur atau prasarana dan sarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah.

Ketersediaan infrastuktur yang memadai dan berkualitas pada suatu daerah dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk mendorong masuknya investasi. Mengingat pembiayaan infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, maka sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur dalam segala bidang. Pengelolaan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah lingkungan hidup dan tata ruang, pertanahan dan tata guna lahan, jalan, sistem irigasi, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kegiatan pembangunan daerah, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal perlu untuk dilakukan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Perencanaan yang terpadu untuk membangun, menata, memanfaatkan, menjaga, dan memelihara lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya perlu dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan penjabaran pertama misi pembangunan daerah sangat terkait dengan 2 (dua) fungsi dan 5 (lima) urusan pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Lingkungan Hidup, khususnya a) urusan Penataan Ruang, b) urusan Lingkungan Hidup, dan c) urusan Pertanahan; kemudian 2) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, khususnya a) urusan Perumahan, dan b) urusan Pekerjaan Umum.

1. Fungsi Lingkungan Hidup
  - a. Urusan Penataan Ruang
    - 1) Masalah
      - a) Berkembangnya Kabupaten Banyumas menuntut tata ruang yang sesuai dengan



perkembangan wilayah.

- b) Ketidakkonsistenan penggunaan lahan sesuai fungsi yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.
- c) Lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang daerah.

2) Sasaran

- a) Terwujudnya pembangunan kawasan yang seimbang dalam upaya memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar lapisan/kelompok masyarakat.
- b) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang.

3) Kebijakan

- a) Mewujudkan pemerataan dan pemanfaatan ruang yang terpadu dalam mengantisipasi perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah.
- b) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang daerah.
- c) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4) Program

- a) Program Perencanaan Tata Ruang.
- b) Program Pemanfaatan Ruang.
- c) Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Non-Pertanian.
- d) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Urusan Lingkungan Hidup

1) Masalah

- a) Lemahnya pengawasan dan koordinasi antar sektor dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- b) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan serta pengelolaan lingkungan.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

2) Sasaran

- a) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- b) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

3) Kebijakan

- a) Pelestarian sumberdaya alam melalui upaya rehabilitasi sumber daya alam.
- b) Peningkatan pengawasan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- c) Peningkatan upaya pengawasan yang terpadu dan terkoordinasi dengan



baik serta konsisten dalam pengelolaan lingkungan sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

4) Program

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam.
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- e) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- f) Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
- g) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan.

c. Urusan Pertanahan

1) Masalah

- a) Banyaknya petak tanah yang belum mempunyai sertifikat.
- b) Banyaknya bangunan yang menempati tanah negara.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya pengelolaan administrasi pertanahan.

- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

3) Kebijakan

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pertanahan.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum terhadap pemilikan tanah.

4) Program

- a) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah.
- b) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
- d) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

2. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

a. Urusan Perumahan

1) Masalah

- a) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat.
- b) Terbatasnya kemampuan masyarakat menengah ke bawah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang layak.
- c) Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya.



- 2) Sasaran  
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyumas akan hunian dan lingkungannya yang layak dan sehat.
- 3) Kebijakan
  - a) Mengembangkan pola kemitraan dengan pihak pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.
  - b) Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat.
  - c) Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan sehat perumahan.
  - d) Peningkatan pengelolaan kebersihan/sampah.
- 4) Program
  - a) Program Pengembangan Perumahan.
  - b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
  - c) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
  - d) Program Pembangunan Kinerja Persampahan.
  - e) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
  - f) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
  - g) Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

- h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- b. Urusan Pekerjaan Umum
  - 1) Masalah
    - a) Belum optimalnya pengelolaan prasarana jalan dan jembatan.
    - b) Masih rendahnya jumlah jalan dan jembatan yang mantap.
    - c) Masih rendahnya jumlah kapasitas jalan.
    - d) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat
  - 2) Sasaran
    - a) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
    - b) Meningkatnya pengelolaan prasarana jalan dan jembatan.
    - c) Penanganan seluruh ruas jalan dan jembatan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
    - d) Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.
  - 3) Kebijakan
    - a) Membangun sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta



meningkatkan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan.

- b) Menyediakan air baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-sumber air serta mengoptimalkan pengelolaan dan pemakaian sumberdaya air.
- c) Meningkatkan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan peningkatan kinerja operasional dan pemeliharaan.

4) Program

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- c) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.
- d) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- e) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- f) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- g) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
- h) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
- i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

- j) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

- k) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong.

**B. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum**

Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pembangunan daerah Tahun 2008-2013, terutama ditekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berbasis pada upaya penciptaan jajaran birokrasi dengan aparatur yang profesional, bersih, dan berwibawa, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah pada kurun waktu lima tahun kedepan tidak akan terlepas dari pentingnya upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang demokratis dan kondusif, yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warganya dalam melakukan aktivitas dan kontribusi pada pembangunan daerah, didukung oleh adanya supremasi hukum yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan penegakan hukum. Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah sangat terkait dengan 2 (dua) fungsi dan 6 (enam) urusan pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Pelayanan Umum, khususnya a) urusan Perencanaan Pembangunan, b) urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan



Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, c) urusan Kearsipan, d) urusan Statistik, dan e) urusan Komunikasi dan Informatika; kemudian 2) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, khususnya a) urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

#### 1. Fungsi Pelayanan Umum

##### a. Urusan Perencanaan Pembangunan

###### 1) Masalah

- a) Belum optimalnya proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
- b) Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- c) Masih belum sinergis dan terintegrasi nya perencanaan, baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral.
- d) Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif.

###### 2) Sasaran

- a) Proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
- b) Terpenuhinya sumber daya manusia perencana yang handal.
- c) Perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral berjalan sinergis.

- d) Terciptanya dokumen perencanaan yang implementatif.

#### 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.
- b) Melibatkan perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- c) Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial perencana.
- d) Meningkatkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

#### 4) Program

- a) Program Pengembangan.
- b) Program Kerjasama Pembangunan.
- c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- f) Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- g) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- h) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i) Program Peningkatan Pendampingan Program-program.



- j) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
- k) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- l) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
- m) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
- b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
  - 1) Masalah
    - a) Masih terjadinya ketimpangan dalam pemberian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
    - b) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat atas produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
    - c) Belum optimalnya pemakaian aset daerah.
    - d) Terbatasnya pemenuhan sarana prasarana inventaris untuk memberikan pelayanan masyarakat.
    - e) Belum optimalnya kinerja pendampingan program.
    - f) Peningkatan jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat fungsional auditor.
    - g) Semakin kompleksnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

- h) Kurang tertibnya pengelolaan administrasi pengendalian pada SKPD.
- i) Belum optimalnya penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- j) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum.
- k) Belum optimalnya tupoksi perangkat daerah.
- l) Belum optimalnya pelayanan perijinan penanaman modal
- m) Kualitas sumber daya manusia Aparatur belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional.
- n) Belum optimalnya kualitas penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.
- o) Kurangnya dukungan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kepegawaian.
- 2) Sasaran
  - a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pada dimensi keadilan dan persamaan dalam pelayanan publik.
  - b) Tersosialisasikan berbagai produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - c) Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang daerah, termasuk peningkatan administrasi pengelolaan aset/barang daerah pada SKPD.



- d) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana inventaris kantor secara bertahap sesuai kebutuhan.
- e) Meningkatnya setoran dana revolving/ pemberdayaan ke Kas Daerah.
- f) Meningkatnya efektivitas penanganan pemeriksaan didukung dengan pengawas yang handal dan memadai.
- g) Tersusunnya standar analisis belanja.
- h) Tersusunnya standar satuan harga, kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, KUAAPBD, PPAS pertahun.
- i) Tersusunnya anggaran kas dan surat penyediaan dana untuk SKPD.
- j) Tersusunnya peraturan daerah atau peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pertahun.
- k) Terselenggaranya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
- l) Terselenggaranya pembinaan keuangan daerah.
- m) Tercapainya peningkatan pengelolaan investasi daerah, termasuk dari aspek perijinannya.
- n) Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah.
- o) Terselenggaranya evaluasi rancangan peraturan desa, antara lain tentang APB Desa dan pendapatan desa.

- p) Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa setiap tahun.
- q) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan (bimbingan teknis) pengelolaan keuangan daerah.
- r) Meningkatnya pengelolaan administrasi pengendalian pembangunan.
- s) Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.
- t) Tercapainya peningkatan pelayanan melalui kegiatan seremonial dan protokoler kedinasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- u) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional.
- v) Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.
- w) Terlaksananya aplikasi program SIMPEG.

### 3) Kebijakan

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.
- b) Peningkatan pemahaman masyarakat atas produk hukum.
- c) Peningkatan institusi pemerintahan.
- d) Peningkatan administrasi pemerintahan.



- e) Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- f) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
- g) Peningkatan sumber daya manusia aparatur PNS.
- h) Meningkatkan pengiriman peserta diklat.
- i) Peningkatan penyelenggaraan diklat, baik teknis maupun fungsional.
- 4) Program
  - a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - c) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
  - e) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
  - f) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - g) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- h) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- i) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- j) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- k) Program Legislasi Daerah.
- l) Program Pendidikan Kedinasan.
- m) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- n) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- o) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- p) Program Penelitian Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kota.
- q) Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- r) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
- s) Program Fasilitas Pengembangan Ekonomi Wilayah.
- c. Urusan Kearsipan
  - 1) Masalah
    - Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah.
  - 2) Sasaran
    - Terkelolanya kearsipan secara teratur, terarah dan terpadu.
  - 3) Kebijakan
    - a) Peningkatan SDM petugas arsip.



- b) Peningkatan sarana/prasarana kearsipan.
- c) Pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin.
- d) Pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan.
- e) Peningkatan fungsi dan pemanfaatan depo arsip.
- 4) Program
  - a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
  - b) Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
  - c) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
  - d) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- d. Urusan Statistik
  - 1) Masalah
    - a) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi daerah.
    - b) Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi bagi penentuan kebijakan.
  - 2) Sasaran
    - a) Tersedianya data dan informasi pembangunan Kabupaten Banyumas.
    - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi daerah.
  - 3) Kebijakan
    - a) Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah.

- b) Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi bagi penentuan kebijakan.
- 4) Program
  - Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah.
- e. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - 1) Masalah
    - a) Masih terbatasnya akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah.
    - b) Terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah.
    - c) Masih terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.
  - 2) Sasaran
    - a) Tersedianya layanan informasi cepat dan akurat berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah.
    - b) Meningkatnya arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutuhkan informasi dan media yang memberitakan.
    - c) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah lewat media massa.
    - d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangkitkan komunikasi



sebagai wahana saling memberikan informasi bagi pemerintah daerah.

- e) Meningkatnya akses informasi yang valid bagi masyarakat.
- f) Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik.
- g) Meningkatnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.

3) Kebijakan

- a) Peningkatan sarana prasarana jaringan dan sumber informasi daerah.
- b) Penyediaan media untuk promosi dan komunikasi.
- c) Peningkatan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan.
- d) Peningkatan serta pemberdayaan yang membidangi komunikasi dan informasi.

4) Program

- a) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- c) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- d) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

- e) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
- f) Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.

2. Fungsi Keamanan dan Ketertiban

a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Masalah

- a) Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang bidang politik.
- c) Masih perlu ditingkatkannya kemampuan pencegahan dan penanganan bencana alam.
- d) Semakin merebaknya gangguan sosial yang diakibatkan oleh derasnya pengaruh globalisasi.
- e) Kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan masih rendah.
- f) Menurunnya nilai-nilai kebangsaan.
- g) Menurunnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik lokal.

2) Sasaran

- a) Mencegah terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal.
- b) Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.
- c) Meningkatnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di lingkungan masyarakat.



- d) Terpantaunya dan tertanganinya korban bencana alam.
  - e) Menurunnya tingkat pelanggaran hukum oleh masyarakat.
  - f) Ketentraman dan ketertiban umum terjaga.
  - g) Meningkatnya wawasan kebangsaan.
  - h) Meningkatnya kehidupan demokrasi di masyarakat.
- 3) Kebijakan
- a) Penyebarluasan undang-undang bidang politik.
  - b) Menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  - c) Meningkatkan kinerja penanganan bencana.
  - d) Mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah.
  - e) Menumbuhkembangkan budaya demokratis di masyarakat.
  - f) Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan secara intensif dan komprehensif.
- 4) Program
- a) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
  - b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - c) Program Penanganan Bencana Alam.
- C. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

Revitalisasi, reposisi, reformasi, bahkan bila perlu transformasi adalah pilihan yang harus dilakukan untuk membuat Kabupaten Banyumas mampu mencapai suatu kebangkitan baru pada bidang ekonomi. Pertumbuhan, pemerataan, kestabilan, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi harus diciptakan dengan menggunakan instrumen kebijakan yang tepat, dimana salah satunya adalah menggunakan cara pengembangan investasi (penanaman modal) berbasis pada sektor unggulan daerah.

Pada sisi lain, kebangkitan ekonomi Kabupaten Banyumas harus juga mengajak dan berdampak pada semua pelaku ekonomi yang ada, terutama adalah para pelaku perekonomian rakyat sebagai basis perekonomian daerah. Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi akan semakin ditingkatkan peranan dan kontribusinya bagi pengembangan perekonomian daerah.

Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan misi ketiga pembangunan daerah sangat terkait dengan 2 (dua) fungsi dan 12 (dua belas) urusan pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Ekonomi, khususnya a) urusan Industri, b) urusan Perdagangan, c) urusan Koperasi dan UKM, d) urusan Penanaman Modal, e) urusan Pertanian, f) urusan Kehutanan, g) urusan Perikanan dan Kelautan, h) urusan Ketahanan Pangan, i) urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, j) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan k) urusan Perhubungan; kemudian 2) Fungsi Pariwisata dan Budaya, khususnya a) urusan Pariwisata.

- 1. Fungsi Ekonomi
  - a. Urusan Industri
    - 1) Masalah



- a) Keterbatasan Industri Kecil dan Menengah terhadap akses pasar dan permodalan.
  - b) Masih lemahnya daya saing produk Industri Kecil dan Menengah di pasar.
  - c) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.
  - d) Kurangnya kerjasama antara pengusaha kecil menengah dengan pengusaha besar.
  - e) Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri.
  - f) Pendapatan sektor industri relatif rendah
- 2) Sasaran
- a) Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri.
  - b) Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah.
  - c) Meningkatnya ketrampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global.
  - d) Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar.
  - e) Mendukung penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mengembangkan dunia usaha industri.

- 3) Kebijakan
- a) Mengembangkan peran Industri Kecil dan Menengah agar setara dengan industri besar, sehingga menjadi pondasi perekonomian yang kokoh.
  - b) Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah yang mandiri serta mendukung industri besar dalam suatu kerangka kerjasama yang saling menguntungkan.
  - c) Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui layanan teknologi industri dan pengembangan teknologi baru.
  - d) Mengembangkan kawasan industri dan penyediaan sarana prasarana penunjang industri.
- 4) Program
- a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
  - b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri.
  - c) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
  - d) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
  - e) Program Penataan Struktur industri.
- b. Urusan Perdagangan
- 1) Masalah
- a) Kurangnya kesadaran pelaku dunia usaha terhadap perlindungan konsumen dan standarisasi barang dan jasa.



- b) Terbatasnya jaringan informasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
  - c) Belum optimalnya peran institusi pendukung dalam mekanisme distribusi barang dan jasa.
  - d) Pendapatan sektor perdagangan dan jasa memungkinkan untuk dikembangkan.
  - e) Harga yang tidak stabil.
  - f) Kualitas barang dagangan yang tidak memenuhi syarat.
  - g) Hubungan yang kurang serasi antara pedagang formal dan pedagang informal.
- 2) Sasaran
- a) Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa.
  - b) Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha.
  - c) Meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global.
  - d) Pengelolaan pedagang kaki lima.
- 3) Kebijakan
- a) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa.
  - b) Pemberdayaan institusi pendukung mekanisme barang dan jasa.

- c) Meningkatkan penyebaran informasi kerjasama perdagangan, serta penataan kelembagaan dan sistem fasilitas perdagangan baik di tingkat regional, nasional dan internasional.
  - d) Mengembangkan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- 4) Program
- a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
  - b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
  - c) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
  - d) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
  - e) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- c. Urusan Koperasi dan UKM
- 1) Masalah
- a) Kurangnya akses Koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan.
  - b) Lemahnya daya saing produk UKM dan terbatasnya akses pemasaran produk UKM.
  - c) Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antar Koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya.
  - d) Kurangnya kualitas SDM Koperasi dan UKM dalam pengelolaan koperasi.



- e) Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Koperasi dan UKM.
- 2) Sasaran
  - a) Meningkatnya produktivitas serta keunggulan kompetitif UKM.
  - b) Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UKM.
  - c) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.
- 3) Kebijakan
  - a) Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan daya saing.
  - b) Mengembangkan jiwa kewirausahaan, pengetahuan dan ketrampilan pengusaha kecil dan menengah.
  - c) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi.
  - d) Memperkuat kelembagaan Koperasi dan UKM.
- 4) Program
  - a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
  - b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
  - c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- d. Urusan Penanaman Modal
  - 1) Masalah
    - a) Masih rendahnya realisasi investasi.

- b) Pemanfaatan dan pendayagunaan informasi potensi dan peluang investasi yang belum efektif.
- c) Pelayanan penanaman modal di daerah masih belum dapat dilaksanakan secara efisien, cepat dan murah.
- d) Sarana prasarana penunjang penanaman modal belum dapat disediakan secara maksimal.

- 2) Sasaran
  - a) Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap pada bidang-bidang potensi daerah, sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat.
  - b) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
  - c) Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan investasi.
- 3) Kebijakan
  - a) Membangun daya tarik investasi dan memberikan peluang-peluang investasi daerah pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.
  - b) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing.



4) Program

- a) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- c) Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

e. Urusan Pertanian

1) Masalah

- a) Produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang rendah.
- b) Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pemanfaatan teknologi dan hasil pertanian.
- c) Lahan pertanian yang terus menyempit akibat alih fungsi lahan.
- d) Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian serta terbatasnya kredit dan infrastruktur pertanian.
- e) Rendahnya produktivitas ternak.
- f) Lambatnya pertumbuhan populasi ternak.
- g) Cukup tingginya kejadian serangan penyakit ternak.
- h) Produktivitas dan kualitas perkebunan yang rendah.
- i) Nilai tambah hasil perkebunan tidak berkembang.
- j) Lemahnya permodalan dan penguasaan teknologi perkebunan.
- k) Harga komoditas pertanian relatif kurang stabil.

- l) Kemampuan tukar produk-produk pertanian masih terlalu rendah.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya produksi dan produktivitas serta berkembangnya usaha pertanian/perkebunan.
- b) Meningkatnya sistem agribisnis.
- c) Meningkatnya pengolahan pasca panen.
- d) Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi.
- e) Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian.
- f) Meningkatnya pertumbuhan populasi dan produktivitas ternak.
- g) Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

3) Kebijakan

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan.
- b) Mengoptimalkan tatalaksana penyuluhan dan meningkatkan profesionalisme SDM Pertanian.
- c) Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan pertanian.
- d) Meningkatkan keterpaduan sistem agribisnis.
- e) Meningkatkan sarana prasarana pertanian.
- f) Mengembangkan kawasan sentra agribisnis ternak.
- g) Meningkatkan derajat kesehatan ternak dan memberikan jaminan/perlindungan



memberikan jaminan/perlindungan kepada konsumen pengguna produk peternakan.

h) Meningkatkan nilai tambah komoditas peternakan.

i) Meningkatkan dukungan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya peternakan.

4) Program

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

e) Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Peternakan

f) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan.

g) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

h) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

i) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

j) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan.

k) Program Pengembangan Investasi Pertanian.

l) Program Peningkatan\* Penerapan Teknologi Peternakan.

f. Urusan Kehutanan

1) Masalah

a) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang tidak berwawasan lingkungan.

b) Masih banyaknya lahan kritis dan penurunan luas hutan rakyat

c) Lemahnya pengawasan dan pengendalian sumberdaya hutan, kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati.

d) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih pra sejahtera.

2) Sasaran

a) Memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara optimal berdasarkan sistem dan pemanfaatan hutan.

b) Menjamin berkembangnya kapasitas keberdayaan masyarakat serta keberlanjutan fungsi hutan, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukumnya.

3) Kebijakan

a) Melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan/perluasan tanaman kehutanan.

b) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri dan peredaran hasil hutan.



c) Melaksanakan perlindungan sumber mata air, konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.

d) Meningkatkan pembinaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya di daerah pinggiran hutan.

4) Program

a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

b) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

c) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

d) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri.

e) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

f) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

g. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Masalah

a) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan.

b) Masih adanya gangguan penyakit ikan.

c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati perairan umum.

d) Kurangnya benih bersertifikat.

e) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

f) Mahalnya harga sarana prasarana produksi.

g) Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat akan hasil ikan.

h) Belum termanfaatkannya aliran sungai dan perairan umum untuk budidaya perikanan.

2) Sasaran

a) Terjaganya kesinambungan produksi perikanan.

b) Meningkatnya kemampuan usaha ekonomi petani.

c) Meningkatnya konsumsi ikan.

3) Kebijakan

a) Optimalisasi Balai Benih Ikan.

b) Mengembangkan kawasan budidaya dan agribisnis perikanan dan pelestarian sumberdaya hayati.

c) Mengembangkan nilai tambah bagi komoditas perikanan.

d) Mengembangkan kewirausahaan, memperluas jaringan pemasaran dan menjalin kemitraan dalam pemasaran hasil perikanan.

4) Program

a) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

b) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

c) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.

h. Urusan Ketahanan Pangan

1) Masalah



- a) Masih belum optimalnya kelancaran distribusi pangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan petani.
- b) Tingginya ketergantungan konsumsi pada bahan pokok beras.
- 2) Sasaran
  - a) Terbangunnya suatu sistem ketahanan pangan yang handal bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan potensi keragaman sumberdaya yang dimiliki.
  - b) Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah dengan harga yang layak.
  - c) Terwujudnya diversifikasi pangan pada masyarakat.
- 3) Kebijakan
  - a) Meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan.
  - b) Mengembangkan keanekaragaman bahan pangan.
- 4) Program
  - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Peternakan).
- i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 1) Masalah
    - a) Masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
    - b) Belum optimalnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
    - c) Belum optimalnya pemberdayaan potensi lokal dan masih tingginya tingkat kemiskinan.

- 2) Sasaran
  - a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
  - b) Meningkatnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.
  - c) Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.
- 3) Kebijakan
  - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga desa serta kelompok masyarakat dalam pembangunan desa.
  - b) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan.
  - c) Membuka akses dan meningkatkan peluang kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencaharian nya.
- 4) Program
  - a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
  - b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
  - c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
  - d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
  - e) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.



j. **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

1) **Masalah**

- a) Banyaknya kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- b) Belum optimalnya pengelolaan kegiatan pertambangan masyarakat.
- c) Belum tersedianya peta potensi pertambangan.
- d) Masih terdapatnya wilayah yang belum terjangkau listrik.
- e) Masih terbatasnya sumber-sumber energi alternatif.

2) **Sasaran**

- a) Meningkatnya pengawasan kegiatan pertambangan masyarakat.
- b) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan.
- c) Tersedianya peta potensi pertambangan.
- d) Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan diversifikasi energi (bioetanol, biodiesel, biogas, batubara, dll) bagi masyarakat.

3) **Kebijakan**

- a) Menyusun draft raperda tentang perusahaan pertambangan umum.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat penambang terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

- c) Menciptakan tertib administrasi teknis pertambangan umum.
- d) Mewujudkan fungsi lingkungan pertambangan.
- e) Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi geologi guna pengembangan lebih lanjut.
- f) Menjamin ketersediaan penerangan jalan umum yang memadai, efektif dan efisien secara teknis dan administratif.
- g) Memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat pedesaan.

4) **Program**

- a) Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan.
- b) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.

k. **Urusan Perhubungan**

1) **Masalah**

- a) Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.
- b) Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang tidak berfungsi baik.

2) **Sasaran**

- a) Terwujudnya peningkatan jumlah dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan.
- b) Terwujudnya fungsi dan daya dukung sarana dan prasarana perhubungan



yang memadai.

- c) Peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

3) Kebijakan

- a) Meningkatkan jumlah dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan.
- b) Meningkatkan fungsi dan daya dukung sarana dan prasarana perhubungan untuk mengatasi pertumbuhan lalu lintas.
- c) Meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d) Meningkatkan pengamanan dan pengendalian lalu lintas.

4) Program

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- d) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- e) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
- f) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

2. Fungsi Pariwisata dan Budaya

a. Urusan Pariwisata

1) Masalah

- a) Perilaku pelaku kepariwisataan baik yang berasal dari sebagian masyarakat maupun aparatnya yang tidak proaktif.

- b) Kurangnya kerjasama antar kabupaten di wilayah Barlingmascakeb dalam bidang Kepariwisata.

- c) Kurangnya promosi/pemasaran kepariwisataan.

- d) Terbatasnya sarana prasarana kepariwisataan.

- e) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

2) Sasaran

- a) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

- b) Pengembangan pelestarian dan pengembangan budaya Banyumasan.

- c) Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan meningkatkan kerjasama kepariwisataan.

- d) Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan.

- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

- f) Mengembangkan kualitas SDM pariwisata.

3) Kebijakan

- a) Pengembangan pusat pertumbuhan kepariwisataan (Baturaden, Wangon, Banyumas).



- b) Pengembangan keunikan Budaya Banyumasan.
  - c) Meningkatkan jaringan kerjasama pariwisata.
  - d) Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata
  - e) Memberdayakan peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis.
  - f) Mengembangkan kualitas kinerja SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan prima.
- 4) Program
- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
  - b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - c) Program Pengembangan Kemitraan

**D. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dari faktor sumberdaya manusia akan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Peran pendidikan akan semakin meningkat dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Peran pendidikan akan semakin meningkat dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, beretika dan berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) agar dan mampu untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kualitas sumber daya manusia juga sangat ditentukan oleh kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga berdampak pada terbentuknya sumberdaya manusia yang sehat dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Pengembangan aspek sosial budaya yang lain terkait dengan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dan daerah, peningkatan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, serta upaya-upaya strategis dalam penanganan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Kebijakan umum pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah sangat terkait dengan 6 (enam) fungsi dan 12 (dua belas) urusan pemerintahan daerah, yaitu: 1) Fungsi Pendidikan, khususnya a) urusan Pendidikan, b) urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dan c) urusan Perpustakaan; 2) Fungsi Kesehatan, khususnya a) urusan Kesehatan dan b) urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 3) Fungsi Pariwisata dan Budaya, khususnya a) urusan Kebudayaan; 4) Fungsi Perlindungan Sosial, khususnya a) urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, b) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan c) urusan Sosial; dan 5) Fungsi Ekonomi, khususnya a) urusan Ketenagakerjaan dan b) urusan Ketransmigrasian; dan 6) Fungsi Ketertiban dan Ketentraman, khususnya a) urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.



## 1. Fungsi Pendidikan

### a. Urusan Pendidikan

#### 1) Masalah

- a) Kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- b) Rendahnya kualitas pembelajaran.
- c) Kurangnya relevansi pendidikan.
- d) Masih banyak sarana dan prasarana pendidikan mengalami rusak berat.
- e) Tidak meratanya penempatan dan kebutuhan tenaga pengajar serta masih kurangnya jumlah tenaga pengajar.

#### 2) Sasaran

Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas, relevansi dan daya saing serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan melalui berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan.

#### 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan akses pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas dengan biaya terjangkau.
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sosial.
- c) Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual.

- d) Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat.

#### 4) Program

- a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- b) Program Pendidikan Menengah.
- c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- d) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- e) Program Pendidikan Non Formal.
- f) Program Pendidikan Luar Biasa.
- g) Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

#### 1) Masalah

- a) Belum optimalnya manajemen keolah ragaan.
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga.
- c) Belum optimalnya kegiatan dan peran serta kepemudaan.

#### 2) Sasaran

- a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga.
- b) Optimalisasi pemanfaatan Gedung Olah Raga Satria.
- c) Meningkatnya motivasi dan aktivitas kepemudaan.



### 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan kualitas organisasi dan SDM di bidang olah raga.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga.
- c) Meningkatkan motivasi kegiatan-kegiatan kepemudaan.

### 4) Program

- a) Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga.
- b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- c) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- d) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- e) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- f) Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba.
- g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

### c. Urusan Perpustakaan

#### 1) Masalah

- a) Rendahnya minat baca masyarakat.
- b) Belum optimalnya pendayagunaan dan pengembangan perpustakaan.

#### 2) Sasaran

- a) Meningkatnya jumlah pengunjung dan jumlah anggota perpustakaan daerah.

- b) Optimalisasi peran perpustakaan sebagai sumber informasi.

### 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan budaya baca masyarakat.
- b) Mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai sumber informasi.
- c) Mengoptimalkan pengembangan perpustakaan.

### 4) Program

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

## 2. Fungsi Kesehatan

### a. Urusan Kesehatan

#### 1) Masalah

- a) Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat.
- b) Masih rendahnya persepsi, sikap, dan perilaku kesehatan masyarakat.
- c) Belum mendukungnya kualitas lingkungan sehat.
- d) Belum memadainya dukungan sumber daya kesehatan, seperti ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

#### 2) Sasaran

- a) Meningkatnya kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.



- b) Meningkatnya kemandirian masyarakat sebagai peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
  - c) Meningkatnya status gizi masyarakat.
  - d) Meningkatnya derajat kesehatan keluarga.
  - e) Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
  - f) Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi.
  - g) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar (per jenis layanan).
  - h) Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional.
  - i) Meningkatnya kinerja sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
  - j) Meningkatnya manajemen sistem pelayanan kesehatan.
  - k) Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan serta minuman.
- 3) Kebijakan
- a) Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat melalui pengetahuan, sikap positif, perilaku dan peran aktif individu, keluarga dan masyarakat di bidang kesehatan.
  - b) Meningkatkan kesehatan lingkungan/hygiene sanitasi.

- c) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.
  - d) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
  - e) Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.
  - f) Meningkatkan ketersediaan, mutu dan perbekalan kesehatan termasuk pengawasan peredaran obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
  - g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fisik sarana dan prasarana kesehatan.
  - h) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program serta perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan.
  - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kesehatan melalui pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan.
- 4) Program
- a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - b) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
  - c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - d) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.



- e) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- f) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- h) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- i) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- j) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- k) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
- l) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- m) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
- n) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
- o) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
- p) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.
- q) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.

- b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - 1) Masalah
    - a) Rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
    - b) Rendahnya pemahaman dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
    - c) Rendahnya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1).
  - 2) Sasaran
    - a) Meningkatnya peserta KB Aktif dan turunnya angka drop out (DO) bagi peserta KB.
    - b) Menurunnya perkawinan usia muda bagi perempuan di bawah umur 20 tahun.
    - c) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - 3) Kebijakan
    - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah peserta KB aktif.
    - b) Pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja.



- c) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
- 4) Program
  - a) Program Keluarga Berencana
  - b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - c) Program Pelayanan Kontrasepsi.
  - d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
  - e) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
  - f) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
  - g) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
  - h) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
  - i) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
  - j) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

- 3. Fungsi Pariwisata dan Budaya
  - a. Urusan Kebudayaan
    - 1) Masalah
      - a) Terjadinya pergeseran nilai budaya akibat masuknya budaya asing.
      - b) Melemahnya ketahanan budaya lokal.
    - 2) Sasaran
      - Meningkatkan pelestarian, pengembangan budaya lokal
    - 3) Kebijakan
      - a) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya lokal.
      - b) Memanfaatkan tingkat heterogenitas budaya yang ada dalam suatu interaksi positif antar budaya dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi.
    - 4) Program
      - a) Program Pengembangan Nilai Budaya.
      - b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
      - c) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
      - d) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- 4. Fungsi Perlindungan Sosial
  - a. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
    - 1) Masalah
      - a) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.



- b) Kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- c) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## 2) Sasaran

- a) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan guna mendukung penyediaan dokumen pendaftaran penduduk.
- b) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

## 3) Kebijakan

- a) Menciptakan administrasi kependudukan terpadu melalui komitmen berbagai pihak.
- b) Meningkatkan kualitas SDM tenaga pelayanan yang terampil dibidang layanan kependudukan.
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## 4) Program

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

## b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1) Masalah

- a) Kurangnya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender.
- b) Kurangnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya pengarusutamaan gender.
- c) Kurangnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya penyelesaian kasus dan masalah perlindungan anak.

## 2) Sasaran

- a) Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan.
- b) Meningkatnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
- c) Meningkatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

## 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk memper tinggi kualitas hidup perempuan dan anak.
- b) Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, deskriminasi pada perempuan dan anak.
- d) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.



#### 4) Program

- a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
- b) Program Peningkatan Serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- e) Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

#### c. Urusan Sosial

##### 1) Masalah

- a) Belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Belum optimalnya penanganan masalah kemiskinan dan terbatasnya akses keluarga miskin.
- c) Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang fokus.

##### 2) Sasaran

- a) Meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatkan penanganan keluarga miskin.
- c) Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup, pemukiman dan perumahannya.

#### 3) Kebijakan

Pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial.

#### 4) Program

- a) Program Pembinaan Anak Terlantar.
- b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- c) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- d) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- e) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- f) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- g) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

#### 5. Fungsi Ekonomi

##### a. Urusan Ketenagakerjaan

##### 1) Masalah

- a) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- b) Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dan masih banyaknya para pencari kerja yang belum tertampung di lapangan kerja yang tersedia.



- c) Belum optimalnya informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - d) Rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Sasaran
- a) Peningkatan kompetensi, daya saing, kemandirian, profesionalisme dan produktifitas tenaga kerja.
  - b) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
  - c) Penyebarluasan informasi di bidang ketenagakerjaan.
  - d) Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan.
- 3) Kebijakan
- a) Meningkatkan kompetensi, daya saing, kemandirian, profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja.
  - b) Meningkatkan relevansi pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
  - c) Mengoptimalkan penyebaran informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - d) Mengoptimalkan program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program Padat Karya Produktif, pengembangan UKM dan sektor informal produktif, koordinasi dengan PJTKI untuk penempatan tenaga kerja

- ke luar negeri, serta program-program pengentasan kemiskinan.
  - e) Meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja dan pengembangan hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- 4) Program
- a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
  - c) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- b. Urusan Ketrasmigrasian
- 1) Masalah
- a) Rendahnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
  - b) Masih terbatasnya daerah tujuan transmigrasi.
  - c) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur transmigrasi.
- 2) Sasaran
- a) Meningkatkan pelayanan program transmigrasi.
  - b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap program transmigrasi.
- 3) Kebijakan
- a) Meningkatkan kualitas dan pengembangan program/pola ketrasmigrasian serta mengupayakan penuntasan



sis eks pengungsi transmigrasi.

- b) Meningkatkan fasilitasi/mediasi kerjasama di bidang ketrasmigrasian.
- c) Mengembangkan kerjasama bidang ketrasmigrasian dengan luar daerah.
- d) Penyebarluasan informasi program transmigrasi pada masyarakat.
- e) Mempermudah prosedur pelayanan transmigrasi.

#### 4) Program

- a) Program Transmigrasi Lokal.
- b) Program Transmigrasi Regional.
- c) Program Pengembangan Transmigrasi.

### 6. Fungsi Ketertiban dan Ketentraman

#### a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

##### 1) Masalah

- a) Semakin besarnya tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Kecenderungan terjadinya kerawanan atau konflik sosial.
- c) Semakin rendahnya tingkat kepatuhan pada norma dan aturan.
- d) Kecenderungan perkembangan perbedaan pandangan hidup dan perbedaan keyakinan yang melemahkan kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

##### 2) Sasaran

- a) Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan

bernegara.

- b) Meningkatnya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
- c) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap agama dan keyakinan masyarakat.
- d) Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama.
- e) Meningkatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam kehidupan sosial.

#### 3) Kebijakan

- a) Meningkatkan wawasan kebangsaan, keamanan, ketertiban dan peran media komunikasi dengan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh semangat persatuan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.
- b) Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana yang tertib dan aman.
- c) Menyempurnakan berbagai kebijakan yang merintangi aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pemahaman keagamaan yang komprehensif.
- d) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia pendidikan keagamaan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan



pemahaman masyarakat terhadap kehidupan sosial keagamaan.

- e) Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan tempat-tempat ibadah bagi pemeluknya.
- 4) Program
  - a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  - b) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - c) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - d) Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
  - e) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
  - f) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
  - g) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB VIII

### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Dengan berdasarkan pada sasaran dan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun rangkaian program dan kegiatan pembangunan daerah untuk Tahun 2008-2013. Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dikelompokkan untuk mendukung penjabaran misi. Program dan kegiatan juga diurai dalam kelompok fungsi dan urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

1. **Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**
  - a. Urusan Penataan Ruang  
Program Prioritas
    - a) Program Perencanaan Tata Ruang.
    - b) Program Pemanfaatan Ruang.
    - c) Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Non-Pertanian
    - d) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - b. Urusan Lingkungan Hidup  
Program Prioritas
    - a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
    - b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.



- c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya alam.
- d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- e) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- c. Urusan Pertanahan  
Program Prioritas
  - a) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah.
  - b) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
  - d) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- d. Urusan Perumahan  
Program Prioritas
  - a) Program Pengembangan Perumahan.
  - b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
  - c) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
  - d) Program Pembangunan Kinerja Persampahan.
  - e) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.
  - f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- e. Urusan Pekerjaan Umum  
Program Prioritas
  - a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - c) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
  - d) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

- e) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
  - f) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
  - g) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
  - h) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
2. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum**
- a. Urusan Perencanaan Pembangunan  
Program Prioritas
    - a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - b) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
Program Prioritas
    - a) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
    - b) Program Legislasi Daerah.
    - c) Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Wilayah.
    - d) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
    - f) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - c. Urusan Kearsipan  
Program Prioritas
    - a) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.



- b) Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
  - d. Urusan Statistik  
Program Prioritas  
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
  - e. Urusan Komunikasi dan Informatika  
Program Prioritas  
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
  - f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Program Prioritas  
Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**
- a. Urusan Industri  
Program Prioritas
    - a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
    - b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
  - b. Urusan Perdagangan  
Program Prioritas
    - a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
    - b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
  - c. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Program Prioritas

- a) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- c) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- d. Urusan Penanaman Modal  
Program Prioritas
  - a) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
  - b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - c) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
- e. Urusan Pertanian  
Program Prioritas
  - a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  - b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
  - c) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
  - d) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
  - e) Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Peternakan
- f. Urusan Kehutanan  
Program Prioritas
  - a) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- g. Urusan Kelautan dan Perikanan  
Program Prioritas



- a) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- b) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- h. Urusan Ketahanan Pangan
  - Program Prioritas
  - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Peternakan).
- i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Program Prioritas
  - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- j. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
  - Program Prioritas
  - a) Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan.
  - b) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
- k. Urusan Perhubungan
  - Program Prioritas
  - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- l. Urusan Pariwisata
  - Program Prioritas
  - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 4. **Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.**
  - a. Urusan Pendidikan
    - Program Prioritas
    - a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

- b) Program Pendidikan Menengah.
- c) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- d) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- e) Program Pendidikan Non Formal.
- f) Program Pendidikan Luar Biasa.
- g) Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
  - Program Prioritas
  - a) Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga.
  - b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
  - c) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
  - d) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- c. Urusan Perpustakaan
  - Program Prioritas
  - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- d. Urusan Kesehatan
  - Program Prioritas
  - a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - b) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
  - c) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - d) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
  - e) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
  - f) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
  - g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.



- h) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- i) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- j) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- k) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
- l) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- m) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
- n) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS Mata.
- o) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
- p) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.
- e. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Program Prioritas
  - a) Program Keluarga Berencana.
  - b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - c) Program Pelayanan Kontrasepsi.
  - d) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri.
  - e) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
  - f) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.
- f. Urusan Kebudayaan  
Program Prioritas
  - a) Program Pengembangan Nilai Budaya.

- b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- g. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil  
Program Prioritas  
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Program Prioritas
  - a) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
  - b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- i. Urusan Sosial  
Program Prioritas
  - a) Program Pembinaan Anak Terlantar.
  - b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
  - c) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
  - d) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- j. Urusan Ketenagakerjaan  
Program Prioritas
  - a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- k. Urusan Transmigrasi  
Program Prioritas
  - a) Program Pengembangan Transmigrasi
- l. Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri  
Program Prioritas



- a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- b) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- c) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- e) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

#### **A. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.



Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kerja daerah yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan akan bermanfaat dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi utama dan sumber informasi pelengkap. Sasaran evaluasi meliputi semua pelaksanaan program dalam rangka upaya pencapaian visi pembangunan daerah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam periode tahun anggaran dan periode masa akhir jabatan Kepala Daerah.

## B. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

### 1. Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja pembangunan daerah ini, dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dalam program pemerintah yang sesuai dengan kapasitas fiskal daerah serta memanfaatkan program-program Provinsi dan program-program pusat. Kabupaten Banyumas telah menetapkan 4 target sasaran indikator kinerja makro sebagai berikut :

#### a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga dalam

wilayah eks Karesidenan Banyumas, pertumbuhan ekonomi Banyumas tahun 2007 menempati posisi kedua setelah Kabupaten Purbalingga seperti dalam Tabel 9.1 sebagai berikut :

**Tabel 9.1.**

**Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas (%)**

No.	Tahun	Kabupaten			
		Banyumas	Banjarnegara	Cilacap	Purbalingga
1.	2002	4,51	-0,65	8,59	4,13
2.	2003	3,71	2,96	6,33	3,14
3.	2004	4,17	3,81	6,65	3,35
4.	2005	3,21	3,95	7,72	4,18
5.	2006	4,48	4,32	5,00	5,06
6.	2007	5,30	5,01	2,64	6,19

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2007.

Selanjutnya dapat diketahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 pada tabel 9.2 berikut ini.

**Tabel 9.2.**

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah (%)**

No.	Tahun	Kab. Banyumas	Prop. Jawa Tengah
1.	2002	4,51	3,55
2.	2003	3,71	4,98
3.	2004	4,17	5,13
4.	2005	3,21	5,35
5.	2006	4,48	5,33
6.	2007	5,30	5,59

Sumber : [www.Jateng.BPS.go.id](http://www.Jateng.BPS.go.id) (diolah)



Pada Tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi dan selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi.

Dari kondisi tersebut diatas Pemerintah Daerah perlu menekankan kembali percepatan pertumbuhan ekonomi agar Banyumas tidak tertinggal bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Dan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.3.**  
**Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,41 %</b>	<b>5,61 %</b>	<b>5,81 %</b>	<b>6,01 %</b>	<b>6,21 %</b>	<b>6,41 %</b>

- b) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah Barlingmascakeb seperti dalam tabel 9.4 berikut:

**Tabel 9.4.**  
**IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 1999-2006**

Kabupaten	1999	2002	2003	2004	2005	2006	Peringkat IPM Tahun 2006	
							Jateng	Kabupaten
Banyumas	66.0	66.7	68.2	70.3	70.7	70.8	14	1
Cilacap	63.1	65.3	64.8	68.8	69.5	69.7	22	3
Purbalingga	63.0	65.0	65.9	68.7	69.3	69.9	20	2
Banjarnegara	63.6	63.7	65.2	66.9	67.3	68.3	30	5
Kebumen	64.9	65.6	65.7	68.0	68.9	69.5	23	4
Jawa Tengah	64.6	66.3	66.2	68.7	69.6	70.1		

Sumber : BPS, 2007

Untuk IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 adalah 71,6 %, sehingga apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka IPM Kabupaten Banyumas hampir mendekati target Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan target IPM Kabupaten Banyumas untuk Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.5.**  
**Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>71,0</b>	<b>71,2</b>	<b>71,4</b>	<b>71,6</b>	<b>71,8</b>	<b>72,0</b>

- c) Menurunkan angka kemiskinan Indikator angka kemiskinan dapat disajikan perbandingan dengan Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap seperti dalam tabel 9.6 berikut :



**Tabel 9.6.**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap**

Kabupaten	Tahun	Angka Kesmiskinan
Banyumas	2008	34,60 %
Purbalingga	2008	29,80 %
Banjarnegara	2008	35,37 %
Cilacap	2008	36,00 %

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2009

Dari data pada tabel tersebut di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan target indikator angka kemiskinan untuk Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.7.**  
**Indikator Angka Kemiskinan**

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Kemiskinan	34,60%	32,89%	30,85%	28,14%	26,86%	24,80%

- d) Menurunkan angka pengangguran  
Dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah Barlingmascakeb, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas lebih tinggi seperti kondisi dalam tabel 9.8 berikut :

**Tabel 9.8.**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di**  
**Wilayah Barlingmascakeb**

Kabupaten	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
Banyumas	2008	8,48 %
Purbalingga	2008	3,00 %
Banjarnegara	2008	4,90 %
Cilacap	2007	13.943 orang
Kebumen	2008	8,06 %

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2009

Dari gambaran kondisi seperti pada tabel diatas maka akan dilaksanakan program nyata untuk membuka lapangan kerja guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator angka pengangguran untuk tahun 2008-2013 seperti dalam tabel 9.9. berikut :

**Tabel 9.9.**  
**Indikator Angka Pengangguran**

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,48 %	8,47 %	8,31 %	8,16 %	7,92 %	7,70 %

2. Indikator Kinerja Misi  
Dalam indikator kinerja pembangunan daerah juga telah ditetapkan target dan sasaran sebagai payung kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan indikator kinerja Misi yang dijabarkan secara operasional kedalam 4 kelompok kebijakan kinerja pembangunan, sebagai berikut :



a.) Misi 1

Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas pada saat ini cukup memadai dan berkualitas dalam segala bidang, hal ini dapat dilihat dari makin meratanya sarana prasarana di hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2008-2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan menetapkan target dan sasaran dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1). Urusan Penataan Ruang, dengan indikator rasio ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, evaluasi dan revisi peraturan daerah tentang RT RW Kabupaten Banyumas dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto dan penurunan bangunan yang tidak ber-IMB.
- 2). Urusan Lingkungan Hidup, dengan indikator penurunan jumlah kegiatan usaha yang tanpa dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL).
- 3). Urusan Pertanahan, dengan indikator penurunan jumlah bidang tanah belum terdaftar.
- 4). Urusan Perumahan, dengan indikator pengendalian pembangunan perumahan yang dilaksanakan pengembang, rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan penyediaan air bersih, peningkatan pembangunan jaringan sanitasi dan peningkatan

pengelolaan sampah.

- 5). Urusan Pekerjaan Umum, dengan indikator peningkatan kualitas jaringan jalan, pengurangan titik rawan kecelakaan lalu lintas, penyusunan studi manajemen rekayasa lalu lintas, penyusunan master plan jaringan drainase, peningkatan pembangunan jaringan drainase, penurunan jumlah bangunan irigasi yang rusak, dan optimalisasi debit aliran air irigasi.

b). Misi 2

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance) didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.

Fungsi Pemerintah Daerah sebagai aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat diharapkan lebih dinamis sesuai perkembangan kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan prima secara nyata, memberikan suasana yang kondusif dan demokratis, serta penerapan penegakan hukum yang pada saat ini cukup baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien, untuk itu diperlukan peningkatan integritas moral dan profesionalisme penyelenggara pemerintah, pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana penunjang. Untuk itu pada Tahun 2008 - 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan target dan sasaran dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :



- 1). Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator evaluasi dan tindak lanjut hasil studi dan perencanaan yang telah ada dan prosentase kesesuaian kegiatan APBD terhadap RKPD.
- 2). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian, dengan indikator evaluasi dan revisi peraturan daerah, peningkatan income per kapita 15%/tahun, penurunan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian.
- 3). Urusan Kearsipan, dengan indikator peningkatan pengarsipan dokumen.
- 4). Urusan Statistik, dengan indikator tersedianya data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kebijakan makro, dan pengembangan data statistik daerah.
- 5). Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan indikator jumlah SKPD pengguna IT dalam penyampaian informasi publik.
- 6). Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah.
- 7). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan indikator partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pilkades.

### c). Misi 3

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup baik, demikian pula diharapkan pada 5 (lima) tahun kedepan dapat terjadi kenaikan yang signifikan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada tahun 2013 dengan skenario dapat mencapai 6,41%, maka optimalisasi kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas diarahkan pada pilihan alternatif kebijakan di bidang ekonomi yang dapat menciptakan multiplier effect yang besar dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2008 - 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan target dan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, untuk target dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- 1). Urusan industri, dengan indikator jumlah perusahaan industri dan PDRB sektor industri.
- 2). Urusan perdagangan, dengan indikator PDRB sektor perdagangan, stabilitas harga, perlindungan terhadap konsumen, keserasian hubungan antara pedagang formal dan informal dan ekspor bersih perdagangan.



- 3). Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dengan indikator jumlah koperasi aktif dan jumlah UKM.
- 4). Urusan Penanaman Modal, dengan indikator investasi daerah dan jumlah tenaga kerja terserap.
- 5). Urusan pertanian, dengan indikator PDRB sektor pertanian, luas panen padi atau bahan pangan lainnya, stabilitas harga komoditas pertanian, produktifitas padi atau bahan pangan lainnya, nilai tukar petani dan produksi peternakan.
- 6). Urusan kehutanan, dengan indikator peningkatan areal hutan rakyat rehabilitasi lahan kritis.
- 7). Urusan perikanan, dengan indikator peningkatan produk perikanan dan penebaran benih ikan di sungai / perairan umum.
- 8). Urusan ketahanan pangan, dengan indikator pola pangan harapan.
- 9). Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan indikator nilai swadaya masyarakat dan jumlah organisasi masyarakat.
- 10). Urusan energi dan sumber daya mineral, dengan indikator rasio elektrifikasi dan prosentase penambangan tanpa ijin.
- 11). Urusan perhubungan, dengan indikator rasio ijin trayek dan terealisasinya trayek/wilayah operasi angkutan pada jaringan transportasi di Kabupaten Banyumas.
- 12). Urusan pariwisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisata.

d) Misi 4

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyumas yang sejahtera maka upaya- upaya Pemerintah Daerah beserta pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengembangan pariwisata dan budaya, pengembangan sosial dan budaya masyarakat yang semakin baik dan penguatan jatidiri dan karakter masyarakat berbasis pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kearifan lokal.

Pada Tahun 2008 - 2013 Pemerintah Daerah telah menetapkan target dan sasaran guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sebagai berikut :

- 1). Urusan pendidikan, dengan indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan, penurunan jumlah penyandang buta aksara, melanjutkan program wajar dikdas, melanjutkan program pendidikan kejuruan dan program pendidikan luar sekolah.
- 2). Urusan Pemuda dan Olahraga, dengan indikator prestasi kepemudaan, prestasi olahraga dan pembinaan karang taruna.
- 3). Urusan perpustakaan, dengan indikator jumlah pengunjung perpustakaan pertahun.
- 4). Urusan kesehatan, dengan indikator kesehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan yang terjangkau, penyalahgunaan obat terlarang, angka kematian bayi, angka



kematian ibu, status gizi balita, angka kesakitan dan prosentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

- 5). Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dengan indikator tingkat fertilitas, rasio akseptor KB dan rasio keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- 6). Urusan seni budaya, dengan indikator jumlah benda situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas, dan pengembangan potensi pariwisata.
- 7). Urusan kependudukan dan catatan sipil, dengan indikator rasio penduduk ber-KTP, rasio penduduk ber-KK dan rasio penduduk berakta kelahiran.
- 8). Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator prosentase penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan.
- 9). Urusan sosial, dengan indikator prosentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penanganan bencana alam.
- 10). Urusan ketenagakerjaan, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka.
- 11). Urusan ketransmigrasian, dengan indikator prosentase pengiriman transmigran.
- 12). Urusan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator penanganan kasus-kasus pelanggaran perda.

- 13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan indikator partisipasi masyarakat dalam pilkada

Indikator kinerja misi tersebut secara rinci akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



# A.MISI 1

**Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.**

No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
1.	Penataan Ruang	a. Terwujudnya pembangunan kawasan yang seimbang dalam upaya memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar lapisan/kelompok masyarakat.	a. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW dan RUTRK setempat	Evaluasi dan Revisi Perda RTRW Kab. Banyumas dan RUTRK setempat	Perda Rencana Tata Ruang yang ada belum sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto (2 buah)	a. Perencanaan Tata Ruang.
		b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang.	b. Ruang terbuka hijau di perkotaan kurang dari 30% dari luas kawasan	Meningkatkan Jumlah Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan	Jumlah Kawasan Perkotaan di Kabupaten Banyumas sebanyak 24 Kawasan, dimana untuk kota Purwokerto RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 7,8 Ha.	Meningkatkan/menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Banyumas	b. Pemanfaatan Ruang.
			c. Belum efektifnya Perda No. 6 tahun 1995 tentang Bangunan	Menurunkan pelanggaran terhadap perda tentang penataan ruang dan perda tentang bangunan	91% belum ber IMB	80 % belum ber IMB	c. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Non-Pertanian
2.	Lingkungan hidup	a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.	Banyak kegiatan usaha tanpa Amdal, UKL maupun UPL	Penurunan jumlah kegiatan usaha yang tanpa Amdal, UKL maupun UPL	Belum semua kegiatan mempunyai dokumen lingkungan	100% seluruh usaha baru yang berijin harus mempunyai dokumen lingkungan	d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
		b. Meningkatnya kesadaran dan peran serta					a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
							b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
3.	Pertanahan	masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.					d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
		c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.					e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
		a. Meningkatnya pengelolaan administrasi pertanahan.	Kesadaran masyarakat akan sertifikasi hak atas tanah masih kecil	Peningkatan kesadaran masyarakat akan sertifikasi hak atas tanah	76,40% dari 994.659 bidang tanah di Kabupaten Banyumas belum terdaftar (759.919 bidang)	Persentase Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar pada Tahun 2013 ditargetkan sekitar 71% atau 706.207 bidang	a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah.
		b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.					b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
							c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.
							d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.







## B. MISI 2

**Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (*Good Governance*), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.**

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
1.	Perencanaan Pembangunan	a. Proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel. b. Terpenuhiya SOM rencana yang handal. c. Perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral berjalan sinergis. d. Terciptanya dokumen perencanaan yang implementatif.	a. Relatif banyak perencanaan yang kurang efektif atau tidak ditindaklanjuti b. Belum tertampungnya kegiatan APBD dalam RKPD	Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil studi dan perencanaan yang telah ada Memasukkan kegiatan APBD dalam RKPD	24 SKPD 100 %	48 SKPD 100 %	a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Perangkat daerah, Kepegawaian	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama pada dimensi keadilan dan persamaan dalam pelayanan publik. b. Tersosialisasikannya berbagai produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. c. Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang daerah, termasuk peningkatan administrasi pengelolaan aset/barang	a. Banyak Perda yang tidak efektif b. Income per kapita rendah c. Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan d. Belum optimalnya penggalan PAD e. Pelayanan kepada masyarakat yang kurang profesional	Evaluasi dan Revisi Perda Peningkatan income per kapita 15%/tahun Memperkecil kesenjangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Peningkatan PAD Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	22 Perda Rp. 5.363.497,- Rp. 5.582.299 6,34 % 91 SKPD	60 Perda Rp. 6.859.155,- s.d. Rp. 9.919.838,- Rp. 4.465.839,- 7,54 % 100 %	a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. b. Program Legislasi Daerah. c. Program Fasilitas Pengembangan Ekonomi Wilayah. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		manajemen aset/barang daerah, termasuk peningkatan administrasi pengelolaan aset/barang daerah pada SKPD. d. Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana inventaris kantor secara bertahap sesuai kebutuhan. e. Meningkatnya setoran dana revolving/pemberdayaan ke Kas Daerah. f. Meningkatnya efektivitas penanganan pemeriksaan didukung dengan pengawas yang handal dan memadai. g. Tersusunnya standar analisis belanja. h. Tersusunnya standar satuan harga, kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, KUA APBD, PPAS per tahun	kurang profesional f. Masih terdapat ego antar perangkat daerah g. Pelaksanaan tugas yang kurang profesional	Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian	25 kali Masih ada pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan keahlian	24 kali Meningkatnya kesesuaian keahlian dengan tupoksi	e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.



No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		<p>i. Tersusunnya anggaran kas dan surat penyediaan dana untuk SKPD.</p> <p>j. Tersusunnya Perda atau Perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per tahun.</p> <p>k. Terselenggaranya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>l. Terselenggaranya pembinaan keuangan daerah.</p> <p>m. Tercapainya peningkatan pengelolaan investasi daerah, termasuk dari aspek perijinannya.</p> <p>n. Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah.</p> <p>o. Terselenggaranya evaluasi rancangan peraturan desa, antara lain tentang APB Desa dan pendapatan desa.</p>					

No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		<p>p. Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa setiap tahun.</p> <p>q. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan (bimbingan teknis) pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>r. Meningkatnya pengelolaan administrasi pengendalian pembangunan.</p> <p>s. Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>t. Tercapainya peningkatan pelayanan melalui kegiatan seremonial dan protokol kedinasan Kepala dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>u. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional.</p>					



No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		v. Meningkatkan kualitas penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional. w. Terlaksananya aplikasi program SIMPEG.					
3.	Kearsipan	Terkelolanya kearsipan secara teratur, terarah dan terpadu.	Kurang memahami arti penting dokumen	Peningkatan pengarsipan dokumen	196 SKPD dan Desa	260 SKPD dan Desa	a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. b. Program Penyabutan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
4.	Statistik	a. Tersedianya data dan informasi pembangunan Kabupaten Banyuwangi. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan informasi daerah.	a. Kurang memahami arti penting data dalam pembangunan. b. Masih kurangnya data statistik daerah	Melengkapi tersedianya data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kebijakan makro Pengembangan data statistik daerah	Masih ada beberapa data belum tersedia 5 buah	Tersedia jenis data sesuai capaian indikator kinerja RPJM 100% 14 buah	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik daerah.
5.	Komunikasi dan Informatika	a. Tersedianya layanan informasi cepat dan akurat berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah. b. Meningkatnya arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutuhkan informasi dan media yang membantukan. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan	Belum dimanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika secara optimal	Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika secara optimal	35 % (8 SKPD)	45 %	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika.

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		pelaksanaan pembangunan daerah lewat media massa. d. Meningkatnya peran serta masyarakat didalam membangkitkan komunikasi sebagai wahana saling memberikan informasi bagi pemerintah daerah. e. Meningkatnya akses informasi yang valid bagi masyarakat. f. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik. g. Meningkatkan kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan Komunikasi dan informasi					
6.	Politik dalam negeri	a. Mencegah terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal. b. Meningkatnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. c. Meningkatnya pemahaman tentang kehidupan berpolitik yang benar di lingkungan masyarakat. d. Terpantaunya dan tertanganinya korban bencana alam. e. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum oleh masyarakat. f. Ketenteraman dan ketertiban umum terjaga. g. Meningkatnya wawasan kebangsaan. h. Meningkatnya kehidupan demokrasi di masyarakat.	a. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih kurang b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada	72,9 % 80,0 %	80,0 % 82,0 %	Program Pendidikan Politik Masyarakat.



### C. MISI 3

**Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
1.	Industri	<p>a. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri.</p> <p>b. Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Meningkatnya ketrampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar global.</p> <p>d. Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar.</p> <p>e. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mengembangkan dunia usaha industri.</p>	<p>a. Pendapatan sektor industri relatif rendah</p> <p>b. Industri sedang dan kecil memung-kinkan untuk dikembangkan</p>	<p>Peningkatan PDRB dari sektor industri</p> <p>Pengembangan jumlah perusahaan industri sedang dan kecil</p>	<p>Rp. 1.387.000 juta</p> <p>39.546 unit</p>	<p>Rp. 1.751.000 juta s.d. Rp. 2.483.000 juta</p> <p>40.078 unit</p>	<p>a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</p> <p>b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.</p>
2.	Perdagangan	a. Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen	a. Pendapatan sektor perdagangan dan jasa memungkinkan untuk dikembangkan	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan dan jasa	Rp. 1.214.000 juta	Rp. 1.598.000 juta s.d. Rp. 2.411.000 juta	a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		<p>pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas dan standarisasi barang dan jasa.</p> <p>b. Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha.</p> <p>c. Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global.</p> <p>d. Pengelolaan pedagang kaki lima.</p>	<p>b. Harga yang tidak stabil</p> <p>c. Kualitas barang dagangan yang tidak memenuhi syarat</p> <p>d. Hubungan yang kurang serasi antara pedagang formal dan pedagang informal</p>	<p>Menjaga stabilitas harga</p> <p>Peningkatan perlindungan terhadap konsumen</p> <p>Menciptakan keserasian hubungan antara pedagang formal dan informal</p>	<p>Inflasi 12.06% / Tahun</p> <p>Telah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap barang yang beredar di pasaran.</p> <p>Sudah ada upaya untuk menjembatani hubungan yang sinergis antara pedagang formal dan non-formal</p>	<p>Inflasi dibawah 10% / Tahun</p> <p>Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap barang yang beredar di pasaran.</p> <p>Terwujudnya hubungan yang sinergis antara pedagang formal dan non-formal</p>	
3.	Koperasi dan UKM	<p>a. Meningkatnya produktivitas serta keunggulan kompetitif UKM.</p> <p>b. Meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan UKM.</p> <p>c. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.</p>	Kualitas kualitas Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan	<p>1. Peningkatan jumlah koperasi</p> <p>2. Peningkatan jumlah UKM</p>	<p>498 unit</p> <p>579.024 unit</p>	<p>575 unit</p> <p>582.406 unit</p>	<p>a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.</p> <p>b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.</p> <p>c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi</p>



No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
4.	Penanaman modal	a. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap pada bidang-bidang potensi daerah, sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat. b. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif. c. Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan investasi.	a. Jumlah investasi perlu ditingkatkan	Peningkatan jumlah investasi	Rp. 321.633.000 juta	Rp. 531.551.000 juta	a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. c. Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
			b. Tenaga kerja terserap relatif kecil	Peningkatan jumlah tenaga kerja terserap	5.835 orang	9.656 Orang	
5.	Kehutanan	Memperbaiki sistem pengelolaan sumber-daya hutan sebagai ekosistem secara optimal berdasarkan sistem dan pemanfaatan hutan	a. Penurunan luas area hutan rakyat	Peningkatan areal hutan rakyat	9.579 Ha	15.579 Ha (Hutan Rakyat)	a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
			b. Rehabilitasi lahan kritis belum optimal	Rehabilitasi lahan kritis	17.775 Ha	15.525 Ha (450 Ha/th)	

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
6.	Pertanian	a. Meningkatnya produksi dan produktivitas serta berkembangnya usaha pertanian/ perkebunan. b. Meningkatnya sistem agribisnis. c. Meningkatnya pengolahan pasca panen. d. Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi. e. Meningkatnya pertumbuhan populasi dan produktivitas ternak.	a. PDRB sektor pertanian perlu ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor pertanian	Rp. 1.834.000 juta	Rp. 2.317.000 juta s.d. Rp. 3.290.000 juta	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. e. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Peternakan.
			b. Penurunan area lahan sawah	Peningkatan luas panen padi atau bahan pangan lainnya	61.326 Ha.	74.300 Ha. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	
			c. Harga komoditas pertanian tidak stabil	Stabilitas harga komoditas pertanian	Harga tidak stabil	1. Upaya-upaya menstabilkan harga 2. Meningkatkan mutu	
			d. Produktifitas padi atau bahan pangan lainnya masih rendah	Peningkatan produktifitas padi atau bahan pangan lainnya - Padi sawah (ton/ha) - Padi gogo (ton/ha) - Jagung (ton/ha) - Kedelai (ton/ha)	5,50 3,49 4,90 1,35	5,70 3,70 5,65 1,50	
			e. Kemampuan tukar produk-produk pertanian masih relatif rendah	Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani	102,79	103,54	
			f. Produksi peternakan masih rendah	Peningkatan produksi peternakan - Susu (liter) - Daging (kg) - Telur (kg)	1.427.003 14.161.811 4.820.934	1.615.719 18.074.458 5.322.701	



No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
7.	Perikanan	a. Terjaganya kesinambungan produksi perikanan	a. Produksi masih belum memenuhi kebutuhan pasar	Peningkatan produk perikanan	4.939.899 kg	6.905.512 kg	a. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. b. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
		b. Meningkatnya konsumsi ikan	b. Aliran sungai belum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan	Penebaran benih ikan di sungai / perairan umum	400.000 benih per tahun	1.000.000 benih per tahun	
8.	Ketahanan Pangan	a. Terbangunnya suatu sistem ketahanan pangan yang handal bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan potensi keragaman sumberdaya yang dimiliki b. Terwujudnya diversifikasi pangan pada masyarakat	Tingginya ketergantungan konsumsi pada bahan pokok beras (padi)	Peningkatan Pola Pangan Harapan	82,00 %	85,00 %	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Peternakan).
9.	Pemberdayaan Masyarakat dan desa	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.	Masih rendahnya Nilai Swadaya Masyarakat	Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat	Rp. 1.916.801.000,-	Rp. 2.703.114.000,-	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
		b. Meningkatnya keterlibatan lembaga sosial masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.	Belum semua organisasi masyarakat yang terdata	Peningkatan Jumlah Organisasi masyarakat	69 buah	79 buah	

No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
10.	Energi dan Sumber Daya Mineral	c. Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.					
		a. Meningkatnya pengawasan kegiatan pertambangan masyarakat.	a. Belum seluruh wilayah di Kab. Banyumas yang teraliri listrik	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	69,93 %	81,70 %	a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan b. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan
		b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. c. Tersedianya peta potensi pertambangan. d. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan diversifikasi energi (bioetanol, biodiesel, biogas, batubara, dll) bagi masyarakat.	b. Masih tingginya penambangan tanpa ijin	Penurunan penambangan tanpa ijin	59 %	14 %	
11.	Perhubungan	a. Terwujudnya peningkatan jumlah dan fungsi fasilitas perlengkapan jalan. b. Terwujudnya fungsi dan daya dukung sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. c. Peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	Belum seluruh wilayah di Kab. Banyumas tersedia jaringan transportasi	Peningkatan jaringan trayek	85 %	90 %	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
12.	Pariwisata	a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata. b. Pengembangan pelestarian dan pengembangan budaya Banyumasan. c. Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan meningkatkan kerjasama kepariwisataan. d. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata. f. Mengembangkan kualitas SDM pariwisata.	Jumlah pengunjung yang cenderung menurun	Peningkatan jumlah pengunjung dengan kenaikan 3,8 % per tahun	588.179 Orang	714.718 Orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Masih banyak potensi pariwisata yang belum dikembangkan	Peningkatan pengembangan potensi pariwisata Banyumas	4 objek pariwisata (Pangsar Sudirman, Sendangmas, Baturraden, Kalibacin)	5 objek wisata (Pangsar Sudirman, Sendangmas, Baturraden, Kalibacin dan Serayu River Voyage)	
13.		Komponen PDRB	a. Pendapatan sektor industri relatif rendah	Peningkatan PDRB dari sektor industri	Rp. 1.387.000 juta	Rp. 1.751.000 juta s.d. Rp. 2.483.000 juta	a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
			b. Pendapatan sektor perdagangan memungkinkan untuk dikembangkan	Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan dan jasa	Rp. 1.214.000 juta	Rp. 1.598.000 juta s.d. Rp. 2.411.000 juta	a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
							Dalam dan Luar Negeri b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			c. PDRB sektor pertanian perlu ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor pertanian	Rp. 1.834.000 juta	Rp. 2.317.000 juta s.d. Rp. 3.290.000 juta	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. e. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Peternakan.
			d. PDRB sektor bangunan/konstruksi memungkinkan untuk ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor bangunan/konstruksi	Rp. 788.000 juta	Rp. 1.049.000 juta s.d. Rp. 1.611.000 juta	Program prioritas pada urusan pekerjaan umum



No	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
			e. PDRB sektor angkutan memungkinkan untuk ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor angkutan	Rp. 752.000 juta	Rp. 1.030.000 juta s.d. Rp. 1.653.000 juta	Program prioritas pada urusan perhubungan
			f. PDRB sektor keuangan dan sewa memungkinkan untuk ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor keuangan dan sewa	Rp. 758.000 juta	Rp. 1.040.000 juta s.d. Rp. 1.677.000 juta	Program prioritas pada urusan perdagangan dan urusan industri
			g. PDRB sektor jasa memungkinkan untuk ditingkatkan	Peningkatan PDRB sektor jasa	Rp. 1.386.000 juta	Rp. 1.873.000 juta s.d. Rp. 2.942.000 juta	Program prioritas pada urusan perdagangan dan urusan industri
			h. PDRB sektor penggalian	Peningkatan PDRB sektor penggalian	Rp. 114.000 juta	Rp. 148.000 juta s.d. Rp. 212.000 juta	Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan
			i. PDRB sektor listrik, gas dan air bersih	Peningkatan PDRB sektor listrik, gas dan air bersih	Rp. 109.000 juta	Rp. 134.000 juta s.d. Rp. 183.000 juta	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan air bersih

#### D. MISI 4

**Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan**

No	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
1.	Pendidikan	Meningkatnya akses, pemerataan, kualitas, relevansi dan daya saing serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan melalui berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan.	a. Masih rendahnya angka melek huruf	Meningkatnya angka melek huruf	92,80 %	97,53 %	a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
			b. Rata-rata lama sekolah belum optimal	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	1. SD/MI = 6,23 % 2. SMP/MTs = 6,29 % 3. SMA/SMK/MA = 2,99 %	1. SD/MI = 6,55 % 2. SMP/MTs = 3,14 % 3. SMA/SMK/MA = 3,24 %	b. Program Pendidikan Menengah.
			c. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM)	Pemenuhan target APM	1. SD/MI = 89,27 % 2. SMP/MTs = 70,54 % 3. SMA/SMK/MA = 16,89 %	1. SD/MI = 93,82 % 2. SMP/MTs = 74,14 % 3. SMA/SMK/MA = 17,75 %	c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
			d. Belum tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK)	Pemenuhan target APK	1. SD/MI = 104,38 % 2. SMP/MTs = 95,05 % 3. SMA/SMK/MA = 65,27 %	1. SD/MI = 109,70 % 2. SMP/MTs = 99,90 % 3. SMA/SMK/MA = 68,60 %	d. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
			e. Masih tingginya angka putus sekolah	Penurunan angka putus sekolah	1. SD/MI = 0,23 % 2. SMP/MTs = 0,37 % 3. SMA/SMK/MA = 0,35 %	1. SD/MI = 0,20 % 2. SMP/MTs = 0,35 % 3. SMA/SMK/MA = 0,33 %	e. Program Pendidikan Non Formal.
			f. Masih rendahnya angka melanjutkan	Meningkatnya angka melanjutkan	1. SD/MI = 94,63 % 2. SMP/MTs = 97,42 % 3. SMA/SMK/MA = 96,12 %	1. SD/MI = 99,46 % 2. SMP/MTs = 99,88 % 3. SMA/SMK/MA = 99,04 %	f. Program Pendidikan Luar Biasa.
			g. Masih rendahnya	Meningkatnya	1. SD/MI = 94 %	1. SD/MI = 100 %	g. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



No.	Unit	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
			g. Masih rendahnya angka kelulusan	Meningkatnya angka kelulusan	1. SD/MI = 94% 2. SMP/MTs = 102,79% 3. SMA/SMK/MA = 81,51 %	1. SD/MI = 100% 2. SMP/MTs = 103,30% 3. SMA/SMK/MA = 85,67%	
			h. Masih relatif banyaknya Buta Aksara	Menurunkan jumlah penyandang Buta Aksara	9.419 Orang	1.888 Orang	
			i. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu dilanjutkan	Melanjutkan program Wajib Dikdas 9 tahun	1. SD inklusi = 4 SD 2. SMP=1 SMP (Al Irsyad)	1. SD= 11 SD 2. SMP=6 SMP	
			j. Pendidikan menengah umum/kerajinan perlu dilanjutkan	Melanjutkan program pendidikan menengah umum / kerajinan	1. SMK= 58 sekolah 2. SMA= 33 sekolah	1. SMK= 63 sekolah 2. SMA= 33 sekolah	
			k. Pendidikan luar sekolah perlu dilanjutkan	Melanjutkan program pendidikan luar sekolah	Paket A : 11 Kelompok 203 warga belajar Paket B : 46 Kelompok 1.582 warga belajar Paket C : 42 Kelompok 2.643 warga belajar	Paket A : 20 Kelompok Paket B : 55 Kelompok Paket C : 60 Kelompok	
2.	Pemuda dan Olah Raga	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga b. Optimalisasi pemanfaatan Gedung Olah Raga Satria	a. Pembinaan prestasi olahraga perlu ditingkatkan b. Wawasan kepemudaan perlu ditingkatkan c. Pembinaan Karangtaruna perlu ditingkatkan	Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan wawasan kepemudaan Peningkatan pembinaan Karangtaruna	Provinsi : 71 medali emas Nasional : 26 medali emas Internasi : 2 medali emas Ada 3 jenis kegiatan kepemudaan yaitu: Kapal Pemuda Nusantara, Pasikbraka, Pertukaran Pemuda. Prestasi Provinsi : 2 kegiatan Nasional : 2 kegiatan Internasional : 1 kegiatan Tumbuh : 265 Berkembang : 58 Maju : 5 Percontohan : 3	Provinsi : 90 medali emas Nasional : 37 medali emas Internasi : 5 medali emas Prestasi Provinsi : 3 kegiatan Nasional : 3 kegiatan Internasional : 1 kegiatan Tumbuh : 212 Berkembang : 92 Maju : 20 Percontohan : 7	a. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga. b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. d. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
3.	Perpustakaan	a. Meningkatnya jumlah pengunjung dan jumlah anggota perpustakaan daerah.	a. Jenis dan jumlah pustaka yang relatif kecil	Peningkatan jumlah koleksi pustaka 4,2 % per tahun	23.665eks.	28.947eks.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

No.	Unit	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		b. Optimalisasi peran perpustakaan sebagai sumber informasi.	b. Jumlah pengunjung yang cenderung menurun	Peningkatan jumlah pengunjung 8 % per tahun	18.085 Orang	26.573 Orang	
4.	Kesehatan	a. Meningkatnya kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. b. Meningkatnya kemandirian masyarakat sebagai peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (IPKMM) c. Meningkatnya status gizi masyarakat. d. Meningkatnya derajat kesehatan keluarga. e. Menurunnya angka kesakitan dan kematian. f. Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi. g. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar (per jenis layanan). h. Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional. i. Meningkatnya kinerja sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.	a. Masih banyak lingkungan yang belum memenuhi persyaratan kesehatan b. Program penanggulangan penyakit menular perlu dilanjutkan dan ditingkatkan c. Biaya kesehatan relatif mahal d. Masih banyak kasus penyalahgunaan obat terlarang e. Masih tingginya angka kematian bayi f. Masih tingginya angka kematian ibu g. Penanganan status gizi balita belum optimal h. Penanganan angka kesakitan belum optimal	Peningkatan kesehatan lingkungan Melanjutkan program penanggulangan penyakit menular mengupayakan pelayanan kesehatan yang terjangkau Peningkatan program penyalahgunaan penggunaan obat terlarang Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian ibu Optimalisasi penanganan status gizi balita Optimalisasi penanganan angka kesakitan	1. SPAL = 182.696 2. Jamban berseptic tank = 881.451 3. Rumah sehat perdesaan = 160.772 4. Rumah sehat perkotaan = 237.505 6 penyakit menular: Malaria, DBD, Paru-paru, HIV, ISPA, Diare Retribusi Puskesmas Rp. 5.000,- 603 kali 10 / 1.000 KH 100 / 100.000 KH 1. Gizi Lebih = 2,3 % 2. Gizi Baik = 85,0 % 3. Gizi Kurang = 11,9 % 4. Gizi buruk = 1,0 % 1. Malaria = 1 / 100.000 2. DBD = 43 / 100.000 3. TB Paru = 70 % 4. HIV AIDS = 30 ODHA	1. SPAL = 310.548 2. Jamban berseptic tank = 1.401.151 3. Rumah sehat perdesaan = 237.505 4. Rumah sehat perkotaan = 292.314 8 penyakit menular : Malaria, DBD, Paru-paru, HIV, ISPA, Diare, Flu Burung, chikungunya Retribusi Puskesmas tetap Rp. 5.000,- 1.055 kali 9 / 1.000 KH 90 / 100.000 KH 1. Gizi Lebih = 1,8 % 2. Gizi Baik = 88,2 % 3. Gizi Kurang = 8,9 % 4. Gizi buruk = 1,0 % 1. Malaria = 7 / 100.000 2. DBD = 20 / 100.000 3. TB Paru = 70 % 4. HIV AID = 45 ODHA	a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat b. Program Pengembangan lingkungan sehat c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat d. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular. h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat i. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.



No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		j. Meningkatnya manajemen sistem pelayanan kesehatan			5. ISPA/Pneumonia= 80% 6. Diare = 20% 95 %	5. ISPA = 90% 6. Diare = 14 / 1.000	j. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
		k. Meningkatnya pembinaan pengawasan dan pengendalian farmasi, perbekalan kesehatan makanan serta minuman.	i. Rendahnya cakupan desa /kel yang melaksanakan imunisasi	Perluasan cakupan desa/kel yang melaksanakan imunisasi	95 %	100 %	k. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan l. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RSJ / RS Paru-paru / RS Mata n. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS / RSJ / RS Paru-paru / RS Mata. o. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. p. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
5.	KB dan Keluarga Sejahtera	a. Meningkatnya peserta KB Aktif dan turunnya angka drop out (DO) bagi peserta KB. b. Menurunnya perkawinan usia muda bagi perempuan di bawah umur 20 tahun. c. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	a. Program pelayanan KB perlu dilanjutkan b. Program Kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan	Penurunan fertilitas penduduk Peningkatan jumlah akseptor aktif Penurunan jumlah Pra KS dan KS 1	TFR 2,31 Akseptor KB : 73,21% Pra KS dan KS 1 : 45,16 %	TFR 2,20 Akseptor KB : 76,20% Pra KS dan KS 1 : 33 %	a. Program Keluarga Berencana. b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. c. Program Pelayanan Kontrasepsi. d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. e. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. f. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.
6.	Seni Budaya	Meningkatnya pelestarian, pengembangan budaya lokal	a. Masih banyak potensi budaya yang belum tergali secara optimal b. Masih banyak potensi budaya Banyumas yang belum dibina dan dikembangkan c. Program pelestarian benda cagar yang belum optimal	Peningkatan penggalan potensi budaya Banyumas Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi budaya Banyumas Optimalisasi pelestarian benda cagar budaya	42 seni budaya 1.456 organisasi / group 53 buah situs	42 seni budaya 10469 organisasi / group 110 situs	a. Program Pengembangan Nilai Budaya. b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
7.	Kependudukan dan Pencatatan, Sipil	a. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan guna mendukung penyediaan dokumen pendaftaran penduduk. b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat pendaftaran penduduk dan catatan sipil.	Pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran perlu ditingkatkan	Peningkatan pelayanan KTP	61,21 %	67,41 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan.
				Peningkatan pelayanan KK	66,94 %	70,12 %	
				Peningkatan pelayanan Akta Kelahiran	39,08 %	50,15 %	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan.	a. Keterlibatan kaum perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan masih relatif kecil	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	10 %	30 %	a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		b. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. c. Meningkatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.	b. Kasus KDRT perlu ditindaklanjuti	Menindaklanjuti kasus KDRT	64 orang yang tertangani	100 % tertangani dari kasus yang dilaporkan	
9.	Sosial	a. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	a. Masih banyak penyandang masalah sosial yang belum tertangani	Peningkatan penanganan kasus penyandang masalah sosial	35 %	25 %	a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

No.	Urusan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Eksisting)	Target 2013	Program Prioritas
		b. Meningkatkan penanganan keluarga miskin. c. Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemukiman dan perumahannya.	b. Adanya bencana alam yang terjadi	Penanganan bencana alam yang terjadi	105 Bencana yang tertangani	100 % Bencana yang dilaporkan tertangani	b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. c. Program Pembinaan Anak Terlantar. d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
10.	Ketenagakerjaan	a. Peningkatan kompetensi, daya saing, kemandirian, profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja. b. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. c. Penyebarluasan informasi di bidang ketenagakerjaan. d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan	Masih relatif banyaknya penganggur	Usaha menurunkan jumlah penganggur	8,43%	7,70%	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
11.	Ketransmigrasian	a. Meningkatkan pelayanan program transmigrasi. b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap program transmigrasi.	Relatif kecilnya jumlah pengiriman transmigran	Meningkatkan jumlah pengiriman transmigran	Tercapai 39,47 % dari target 41,67 %	25 % sesuai dengan kuota provinsi/nasional	Program Pengembangan Transmigrasi



No.	Urutan	Sasaran	Permasalahan	Indikator	Kondisi Awal (Existing)	Target 2013	Program/Prioritas
12.	Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri	a. Terpilihnya rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. b. Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap agama dan keyakinan masyarakat. d. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama. e. Meningkatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam kehidupan sosial.	Kecilnya partisipasi masyarakat dalam PILKADA  Rendahnya cakupan penanganan kasus pelanggaran Perda	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PILKADA  Peningkatan cakupan penanganan kasus pelanggaran PERDA	72,90 %  1.473 Orang	80 %  1.792 Orang	a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. b. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. c. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. d. Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

## BAB X

### PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati selama lima tahun mendatang. RPJM Daerah ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra-SKPD yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Banyumas.

#### A. Program Transisi

Program transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJM Daerah dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya untuk Tahun Anggaran 2014. Program transisi disusun dalam rangka menyediakan acuan perencanaan pembangunan tahun pertama masa jabatan Bupati Banyumas periode 2013-2018. Hal ini diperlukan karena perencanaan pembangunan tahun 2014 dilakukan pada masa jabatan Bupati periode sebelumnya.

##### 1. Kebijakan Umum Pembangunan Lanjutan.

Kebijakan perencanaan Tahun 2014 secara umum masih dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemantapan 4 (empat) penjabaran kebijakan sebagai berikut:

- Memantapkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam rangka pembangunan berkelanjutan.



- b. Memantapkan kinerja perwujudan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance) didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.
- c. Memantapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- d. Memantapkan kinerja perwujudan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

## 2. Program Prioritas Pembangunan Lanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 masih mengacu pada RPJM Daerah sebagai pembangunan lanjutan yang didasarkan pada 4 penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dan dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program prioritas lanjutan. Program prioritas pembangunan lanjutan sebagai berikut:

- a. Memantapkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
  - 1) Urusan Penataan Ruang dengan Program prioritas lanjutan : program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, program pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan non-pertanian, program pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH).

- 2) Urusan Lingkungan Hidup dengan program prioritas lanjutan : program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian polusi.
- 3) Urusan Pertanahan dengan program prioritas lanjutan : program pembangunan sistem pendaftaran tanah, program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, program pengembangan sistem informasi pertanahan.
- 4) Urusan Perumahan dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan, program lingkungan sehat perumahan, program pembangunan kinerja persampahan, program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- 5) Urusan Pekerjaan Umum dengan program prioritas lanjutan : program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, program



pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, program penyediaan dan pengelolaan air baku, program tanggap darurat jalan dan jembatan, program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong, program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong.

b. Memantapkan kinerja perwujudan tata pemerintahan yang baik dan benar (good governance) didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.

- 1) Urusan Perencanaan Pembangunan dengan Program Prioritas lanjutan : program perencanaan pembangunan daerah, dan program sistem perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Urusan Otonomi Daerah dengan program prioritas lanjutan : program penataan peraturan perundang-undangan, program legislasi daerah, program fasilitasi pengembangan ekonomi wilayah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur.
- 3) Urusan Kearsipan dengan program prioritas lanjutan :

program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dan program penyelamatan data pelestarian dokumen/arsip daerah.

- 4) Urusan Statistik dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
- 5) Urusan Komunikasi dan informatika dengan program prioritas lanjutan : program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan program prioritas lanjutan : Program pendidikan politik masyarakat.

c. Memantapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

- 1) Urusan Industri dengan program prioritas lanjutan : Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), dan program peningkatan kemampuan teknologi industri.
- 2) Urusan Perdagangan dengan program prioritas lanjutan : program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri.
- 3) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan program prioritas lanjutan : program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan program



peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

- 4) Urusan Penanaman Modal dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
- 5) Urusan Pertanian dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan program peningkatan produksi peternakan dan hasil peternakan.
- 6) Urusan Kehutanan dengan program prioritas lanjutan : Program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.
- 7) Urusan Perikanan dan Kelautan dengan program prioritas lanjutan : Program optimalisasi pengelolaan, pemasaran produksi perikanan dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- 8) Urusan Ketahanan Pangan dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/peternakan).
- 9) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program prioritas lanjutan : program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

- 10) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan program prioritas lanjutan : program pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan, dan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
- 11) Urusan Perhubungan dengan program prioritas lanjutan : program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 12) Urusan Pariwisata dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan pemasaran pariwisata.

d. Memantapkan kinerja perwujudan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

- 1) Urusan pendidikan dengan program prioritas lanjutan : program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan menengah, program manajemen pelayanan pendidikan, program pendidikan anak usia dini, program pendidikan non formal, program pendidikan luar biasa dan program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.
- 2) Urusan Pemuda dan Olah raga dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan kebijakan manajemen olah raga,



program peningkatan peran serta kepemudaan dan program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.

3) Urusan Perpustakaan dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

4) Urusan Kesehatan dengan program prioritas lanjutan : program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program upaya kesehatan masyarakat, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program standarisasi pelayanan kesehatan, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, program perbaikan gizi masyarakat, program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, program pengawasan obat dan makanan, program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya, program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru dan RS mata, program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata, program peningkatan sumber daya kesehatan dan program kebijakan dan manajemen kesehatan.

5) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera dengan program prioritas lanjutan : program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dan program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

6) Urusan Seni Budaya dan Olah Raga dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan nilai budaya dan program pengelolaan kekayaan budaya.

7) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan program prioritas lanjutan : program penataan administrasi dan kependudukan.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

9) Urusan Sosial dengan program prioritas lanjutan : program pembinaan anak terlantar, program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, program pelayanan dan



rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

- 10) Urusan Ketenagakerjaan dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan kualitas dan produktifitas dan produktifitas tenaga kerja, dan program peningkatan kesempatan kerja.
- 11) Urusan Transmigrasi dengan program prioritas lanjutan : program pengembangan transmigrasi.
- 12) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan program prioritas lanjutan : program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pengembangan wawasan kebangsaan, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPJM Daerah yang telah disusun ini secara normatif telah diupayakan memuat program- program atau rencana kerja seluruh tugas Bupati/Wakil Bupati meliputi tugas- tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi , tugas- tugas pembantuan dan tugas- tugas pemerintahan umum. Namun demikian dalam menjalankan peran sebagai wakil Pemerintah Provinsi dan wakil Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak sepenuhnya dapat

direncanakan sejak awal, sejalan dengan proses penyusunan RPJM Daerah.

Dokumen RPJM Daerah ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan komitmen. Oleh karena itu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJM Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD.
3. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan Sektoral. RPJM Nasional Tahun 2004-2009 dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
4. RPJM Daerah ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah, Bappeda Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM Daerah kedalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sampai Tahun 2013.



## **BAB XI PENUTUP**

RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah dipresentasikan dan dipromosikan pada saat kampanye. Dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan program dalam RPJM Daerah ini mengacu kepada program yang secara hirarkis berada pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah Provinsi, RPJM Daerah Provinsi, RPJP Daerah dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat, misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJM Daerah ini secara normatif telah diupayakan memuat program atau rencana kerja seluruh tugas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas pemerintahan umum. Namun demikian dalam menjalankan tugas pembantuan tidak dapat direncanakan sepenuhnya dalam RPJM Daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah keikutsertaan Daerah termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

RPJM Daerah tahun 2008 - 2013 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2013, namun secara substansial juga berlaku sebagai RPJM Daerah transisi, sehingga berlaku sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2014 sebelum tersusunnya RPJM Daerah tahun 2013 - 2018 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian visi daerah Banyumas 2008-2013 "Menyejajarkan Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan Melebihi" sangat diperlukan untuk membangun konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada masyarakat serta menumbuhkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

**BUPATI BANYUMAS,**

ttd

**MARDJOKO**